

**PENGUATAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI
(PSE) SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
PADA UMAT GEREJA PAROKI ST. PETRUS
TUKUNENO.**

**(Studi Kasus PSE di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Keuskupan
Atambua)**

Tesis

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**



Oleh :

**Petrus Ans Gregorius Taek
NIM: 176120300111001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL
BKU KAJIAN KEMISKINAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN**TESIS****PENGUATAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI (PSE)
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PADA UMAT
GEREJA ST. PETRUS TUKUNENO
(Studi Kasus PSE di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-
Keuskupan Atambua)****Oleh :****Petrus Ans Gregorius Taek
NIM: 176120300111001**

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS

NIP. 195612271983121001

Pembimbing I

Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph. D.

NIP 197408012008011009

Pembimbing II

KPS Magister Ilmu Sosial

Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph. D.

NIP 197408012008011009

Malang,

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dekan,

Prof. Dr. UNTI LUDIGDO, SE., M.Si., Ak
NIP. 196908141994021001

IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS

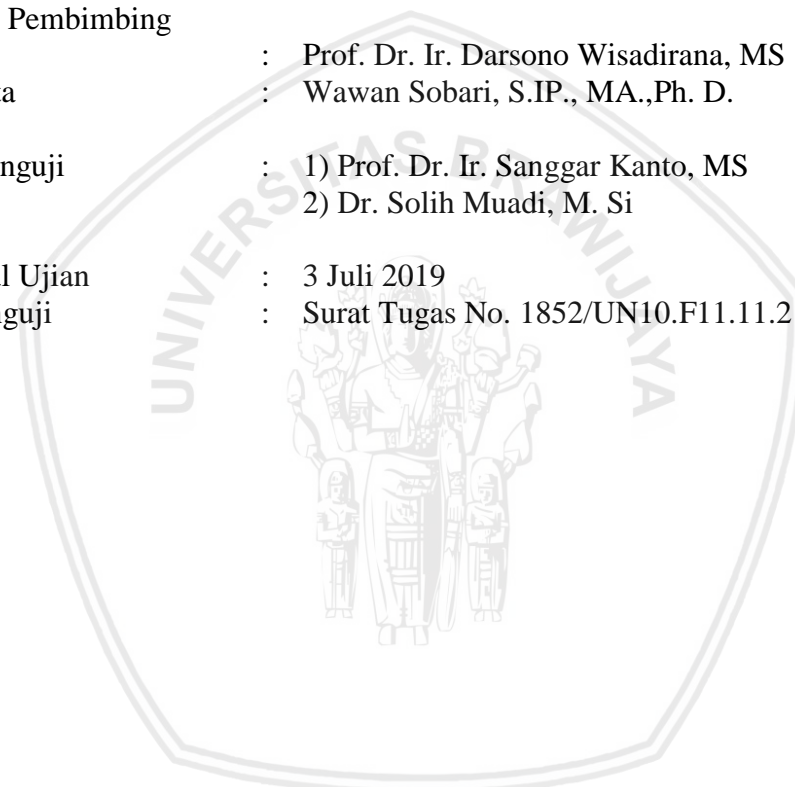
Judul Tesis : Penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Umat Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno. (Studi Kasus PSE di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Keuskupan Atambua)

Nama : Petrus Ans Gregorius Taek
NIM : 176120300111001
Program Studi : Magister Ilmu Sosial-BKU Kajian Kemiskinan

Komisi Pembimbing
Ketua : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS
Anggota : Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph. D.

Tim Penguji : 1) Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS
2) Dr. Solih Muadi, M. Si

Tanggal Ujian : 3 Juli 2019
SK Penguji : Surat Tugas No. 1852/UN10.F11.11.21/PP/2019



PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



Malang, 3 Juli 2019
Yang Menyatakan,

Petrus Ans Gregorius Taek
NIM.176120300111001

MOTTO

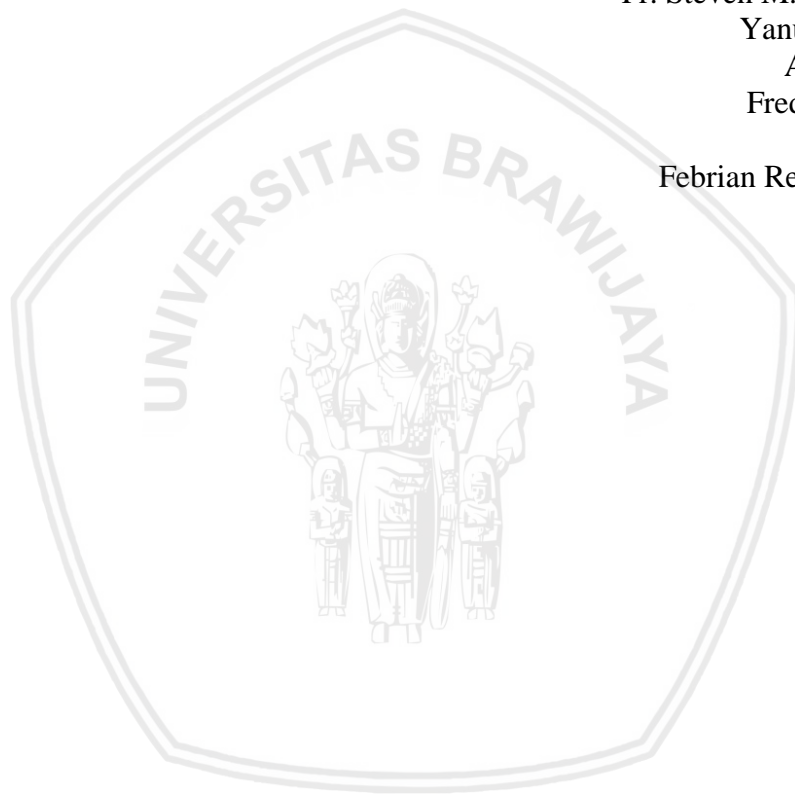
**“Kalah Mata Kalah Uang,
Kalah Waktu Kalah Nilai”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tri Tunggal Mahakudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Ijinkan aku membahagiakan mereka, bapa dan mama tercinta serta keluarga besarku...

Yoseph Taek Bere
Maria Sina Watti
Frederik M. Taek
Zeraldina
Fr. Steven M. Taek, Cmf
Yanuaris Taek
Aprilia Bere
Frederiko Taek
Riki Taek
Febrian Reynald Taek
Neak



RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

1. Nama Lengkap : Petrus Ans Gregorius Taek
2. Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 5 Februari 1987
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Katholik
5. Instansi Asal : -
6. Alamat Instansi : -
7. No. Telp/Fax Instansi : -
8. Alamat Rumah : Kampung Jati,
RT/RW : 012/004
Kelurahan : Bardao
Kecamatan : Atambua Barat
9. No. Telp. / HP Rumah : +62821 4506 1043
10. Email : Petrusgregorius87@gmail.com

PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Pendidikan	Jurusan	Tahun	Tempat
1.	SD	SDI Tanah Merah 1	-	1994-2000	Atambua-Belu-NTT
2.	SLTP	SLTPN 1	-	2000-2003	Atambua-Belu-NTT
3.	SLTA	Seminari Menengah Sta. Maria Immaculata Lalian	Bahasa	2003-2007	Atambua-Belu-NTT
4.	Pra-S1	Novisiat SVD Nenuk	Seminari	2007-2009	Atambua-Belu-NTT
5.	S-1	Universitas Nusa Cendana	Fisip-Sosiologi	2009-2014	Kupang-NTT
6.	S-2	Universitas Brawijaya	Magister Ilmu Sosial-BKU Kajian Kemiskinan	2017-2019	Malang-Jawa Timur

PENGALAMAN KERJA

No.	RINCIAN	TAHUN
1.	Tenaga Surveyor Kompas TV- NTT	2014
2.	Staf Pengajar mata pelajaran Sosiologi Kelas X di SMAK Suria Atambua-Belu-NTT	2015-2017

PENGALAMAN SEMINAR/LOKAKARYA/PELATIHAN

No.	RINCIAN	TAHUN
1.	Instruktur Kabupaten Mata Pelajaran Sosiologi Kurikulum SLTA Kabupaten Belu-NTT TA 2016/2017	2016
2.	Seminar “Peluang dan Tantangan Pengembangan Bisnis di Era Revolusi Industri 4,0” 2 Mei 2019 di Fakultas Pertanian-Universitas Brawijaya-Malang	2019

KETERANGAN KELUARGA**1. ORANG TUA**

No.	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1.	Yoseph Taek Bere	Betun	09-09-1956	Petani
2.	Maria Sina Wati	Tahak	14-09-1964	Ibu Rumah Tangga

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah atas rahmat dan Kasih-Nya sehingga tesis dengan judul: “*Penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Umat Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno. (Studi Kasus PSE Di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Keuskupan Atambua)*” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penelitian dan penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Sosial-Kajian Kemiskinan-FISIP Universitas Brawijaya-Malang dan merupakan kesempatan berharga sekali untuk menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam situasi dunia nyata. Tanpa kesempatan, bimbingan, masukan serta dukungan semangat dari berbagai pihak, tentunya tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana bentuknya saat ini.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil yaitu:

- (1) **Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS selaku Rektor Universitas Brawijaya Peiode 2018-2023**
- (2) **Prof. Dr. Ir. M. Bisri, MS selaku mantan Rektor Univesitas Brawijaya Periode 2013-2018**
- (3) Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik **Universitas Brawijaya Periode 2016-2020.**
- (4) Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik **Universitas Brawijaya.**
- (5) Prof.Dr.Ir. Darsono Wisadirana, MS selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan tesis ini.
- (6) Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk perbaikan tesis ini.
- (7) Para Tim Penguji: 1) Prof. Dr. Sanggar Kanto, MS dan 2) Dr. Solih Muadi, M. Si
- (8) Para dosen pada Program Studi Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik **Universitas Brawijaya.**
- (9) **Para Pegawai dan Staf Administrasi (Mas Afnan, Mas Irul, Mas Hendra) pada Program Studi Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.**
- (10) **Bapak Uskup Atambua (Mgr. Dominikus Saku, Pr), Ketua KPSE-KA sekaligus menjabat sebagai Pastor Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno (Rm. Urbanus Hala, Pr), para Pastor Pembantu, OMK, umat Tukuneno, khususnya bagi para informan yang telah berpartisipasi dalam memberikan data penelitian ini.**
- (11) **Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BKU Kajian Kemiskinan, BKU Sosiologi Pembangunan, BKU Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi angkatan 2017) Universitas Brawijaya.**

Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, juga penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga karena dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya maka tesis ini dapat diselesaikan penulisannya dengan baik.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian bagi kejayaan Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Amin.

**Malang, 3 Juli 2019
Penulis,**

**Petrus Ans Gregorius
Taek
NIM. 176120300111001**



PETRUS ANS G. TAEK. 2019. Magister Ilmu Sosial-BKU Kajian Kemiskinan-Fisip-Universitas Brawijaya Malang

PENGUATAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI (PSE) SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PADA UMAT GEREJA ST. PETRUS TUKUNENO (Studi Kasus PSE di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Keuskupan Atambua)

Pembimbing I. Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS
Pembimbing II. Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph. D.

ABSTRAK

Studi kasus kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui proses PSE; mengkaji kontribusi KPSE dalam mengentaskan kemiskinan; mengetahui hambatan yang dihadapi SSP Tukuneno dalam melaksanakan program PSE; untuk menganalisis penguatan KPSE dalam menyukkseskan program dan strategi KPSE dalam mempertahankan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menemukan bahwa proses PSE dilakukan melalui pengajuan proposal sehingga mendapatkan persetujuan KPSE yang disahkan Uskup Atambua. Ada 6 program strategis dan 7 kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan KPSE dan SSP Tukuneno yang telah sedikit menekan angka kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaan program PSE seperti situasi lingkungan sosial, struktur politik, budaya dan adat istiadat, akses-akses publik, mental dan kepribadian umat. Dengan adanya penguatan kelembagaan dan evaluasi yang terus menerus baik secara internal dan eksternal kelembagaan telah meningkatkan kepercayaan publik sehingga kesuksesan program pengentasan kemiskinan dan keberlanjutannya melalui kerjasama dengan Pemerintah pusat, daerah dan LSM dapat membawa umat keluar dari masalah kemiskinan. Pendekatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan Gereja Katolik Keuskupan Atambua melalui KPSE lebih berorientasi pada nilai-nilai agama dan dinilai efektif dalam menekan angka kemiskinan.

Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan PSE, Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan.

PETRUS ANS G. TAEK. 2019. Masters in Social Sciences-BKU Poverty-Social Studies-University of Brawijaya Malang.

STRENGTHENING OF SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT (PSE) AS AN EFFORT OF POVERTY REDUCTION IN THE CHURCH OF ST. PETRUS TUKUNENO (PSE Case Study in St. Peter's Tukuneno-Diocese Of Atambua)

Advisor I. Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS

Advisor II. Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph. D.

ABSTRACT

This qualitative case study aims to find out the PSE process, assessing KPSE's contribution to alleviating poverty; knowing the obstacles faced by the SSP Tukuneno in implementing the PSE program; to analyze the strengthening of KPSE in the success of the KPSE program and strategy in maintaining the sustainability of poverty alleviation programs. The results of the study found that the PSE process was carried out through the submission of proposals so as to obtain the KPSE approval approved by Bishop Atambua. There are 6 strategic programs and 7 empowerment activities held by Tukuneno KPSE and SSP which have slightly reduced poverty. However, in its implementation there were various challenges which hampered the implementation of the PSE program such as the situation of the social environment, political structure, culture and customs, public accesses, mental and personality of the people. With the existence of institutional strengthening and continuous evaluation both internally and externally the institution has increased public trust so that the success of the poverty alleviation and sustainability program through collaboration with the central, regional and NGO governments can bring people out of the problem of poverty. The approach to alleviating poverty by the Catholic Church of Atambua diocese through KPSE is more oriented towards religious values and is considered effective in reducing poverty.

Keywords: Strengthening Institutional PSE, Poverty Alleviation Priority Program.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena melalui bimbingan, ijin dan rahmat-Nya penulis telah menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Umat Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno. (Studi Kasus Pse Di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno- Keuskupan Atambua)*” ini dapat terselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya.

Gereja Katolik Keuskupan Atambua melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonominya ingin menunjukkan keberpihakan Gereja di tengah dunia melalui pelayanan kepada kaum miskin dan papa sebab kehadiran Gereja di tengah dunia bukan saja untuk dirinya sendiri tetapi ingin melayani umat manusia secara nyata melalui bidang pelayanan sosial kemanusiaan. Melalui program prioritas (Tanggap Darurat, Pertanian Lahan Kering, Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih, Pemberdayaan dan Advokasi Perempuan dan Anak dan Peternakan Babi), Gereja Katolik berkomitmen untuk membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberantas kemiskinan khususnya di wilayah pastoral Keuskupan Atambua. Salah satu bukti nyata keberhasilan dalam pelaksanaan program-program itu adalah mulai berkurangnya umat prasejahtera yang keluar dari persoalan kemiskinan di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno. KPSE berkomitmen untuk terus menguatkan kelembagaannya secara internal dan eksternal sehingga dapat melaksanakan program-program prioritas pengentasan kemiskinan yang akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan bagi umat di Keuskupan Atambua.

Akhir kata, yang sempurna hanyalah Sang Pemilik Kehidupan di mana penulis menyadari bahwa karya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu banyak masukan dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikannya.

Malang, 3 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	i
IDENTITAS TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
GLOSARIUM	xix
BAB	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penulisan	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4 Orisinalitas Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Teori Kemiskinan	20
2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan	21
2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan	24
2.1.1.3 Perangkap Kemiskinan	28
2.1.1.4 Pendekatan Kemiskinan	29
2.1.2 Konsep Pemberdayaan	30
2.1.2.1 Pengertian Pemberdayaan	30
2.1.2.2 Hakekat Pemberdayaan	34
2.1.3 Selayang Pandang Tentang Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Atambua (KA)	42
2.1.3.1 Orientasi Karya PSE	42
2.1.3.2 Keterlibatan Sosial Gereja dalam Kehidupan Sosial Ekonomi	45
2.2 Penelitian Terdahulu	47
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	57

	Hal.
III. METODE PENELITIAN	63
3.1 Metode Penelitian	63
3.2 Teknik Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian	64
3.3 Fokus Penelitian	65
3.4 Sumber Data	70
3.5 Teknik Pengumpulan Data	73
3.6 Uji Keabsahan Data	75
3.7 Pengolahan Data	82
3.8 Analisis Data	82
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	89
4.1 Profil Keuskupan Atambua	89
4.2 Profil Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (KPSE-KA)	100
4.3 Profil Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno- Keuskupan Atambua	104
4.4 Karakteristik Umat/Komunitas Sasaran Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno Yang Diberdayakan	121
1. Keadaan Demografis, Jumlah Keluarga, Pendidikan dan Tingkat Pendapatan	121
2. Kelompok Sasaran, Pendekatan dan Karakteristik Informan	124
4.5 Pemberdayaan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Indikator Keberhasilan Kegiatan Pemberdayaan	132
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	147
5.1 Proses Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno	147
5.2 Kontribusi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno.....	149
5.3 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno Dalam Melaksanakan Program Prioritas Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE)	151
5.4 Strategi Penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno	155

	Hal.
5.5 Strategi Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi- Keuskupan Atambua (KPSE-KA) Dalam Mempertahankan Keberlanjutan Program-Program Pengentasan Kemiskinan	172
5.6 Rekonstruksi Teori dan Proposisi	177
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	187
6.1 Kesimpulan.....	187
6.2 Saran	189
DAFTAR PUSTAKA	192



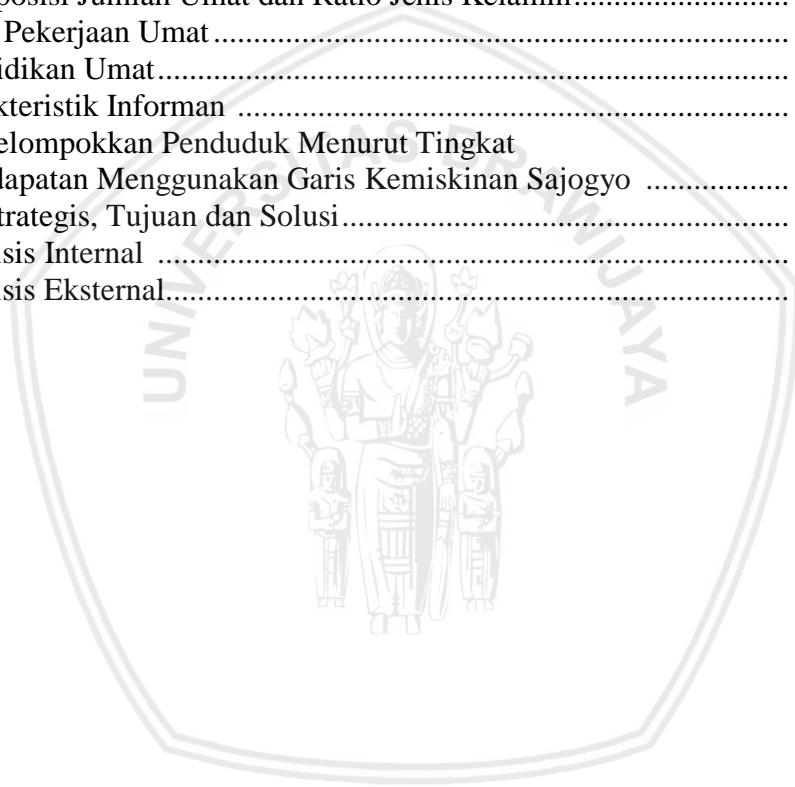
DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
LAMPIRAN 1. Dokumentasi Dan Observasi Penelitian	196
LAMPIRAN 2. Kegiatan Pengembangan Sosial Ekonomi Oleh Seksi Sosial Paroki Tahun 2018 di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno- Atambua	202
LAMPIRAN 3. Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan	211
LAMPIRAN 4. Transkrip Hasil Wawancara	224
Kalender Kegiatan Pastoral Keuskupan Atambua-KPSE KA Tahun 2018 LOA dan <i>JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019</i>	



DAFTAR TABEL

	Hal.
3.1 Fokus Penelitian	67
3.2 Informan, Kapasitas dan Informasi yang Diperoleh	71
3.3 Teknik Pengumpulan Data	73
4.1 Jumlah Pemeluk Agama	95
4.2 Batas Wilayah	109
4.3 Komposisi Jumlah Umat dan Ratio Jenis Kelamin.....	122
4.4 Jenis Pekerjaan Umat	122
4.5 Pendidikan Umat.....	123
4.6 Karakteristik Informan	131
4.7 Pengelompokkan Penduduk Menurut Tingkat Pendapatan Menggunakan Garis Kemiskinan Sajogyo	138
5.1 Isu Strategis, Tujuan dan Solusi.....	159
5.2 Analisis Internal	160
5.3 Analisis Eksternal.....	162



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
2.1 Perangkat Kemiskinan/ <i>Deprivation Trap</i> (Chambers)	29
2.2 Skema Kerangka Konsep Penelitian	62
3.1 Analisis data jenis reduksi menjadi Kondensasi (pengembunan) data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana	85
4.1 Struktur Organisasi Dewan Pastoral Keuskupan Atambua	98
4.2 Struktur Organisasi Dewan Inti Pastoral Keuskupan Atambua	99
4.3 Struktur Organisasi Dewan Pleno Pastoral Keuskupan Atambua	100
4.4 Peta Wilayah Pastoral KA Yang Meliputi 3 Kabupaten (Belu, Malaka dan TTU)	109
4.5 Peta Kabupaten Belu, Salah Satu Wilayah Wilayah Administrasi Pastoral KA	110
4.6 Peta Geografi Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno Terletak Dalam Wilayah Kecamatan Atambua Selatan	110
4.7 Peta Geografi Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno	111
4.8 Struktur Organisasi Dewan Pastoral Paroki St. Petrus Tukuneno-Dekenat Belu Utara Masa Bakti 2015-2018	120
4.9 Klasifikasi Penduduk Menurut Pengeluaran Perkapita Perbulan	137
Gambar 5.2 Konsep Pemberdayaan oleh Eddy Ch. Papilaya	
5.1 Struktur Organisasi Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi (PPSE)-Keuskupan Atambua Periode 2017-2021	165
5.2 Konsep Pemberdayaan Oleh Edy Ch. Papilaya	177

GLOSARIUM

No.	Istilah	Arti/Kepanjangan
1.	ACF	Action Contre la Faim.
2.	AMAN	Aliansi Masyarakat Adat
3.	AusAID	Australian Agency For International Development
4.	BKIA	Balai Kesehatan Ibu dan Anak
5.	BKSN	Bulan Kitab Suci Nasional
6.	BOS	Bantuan Operasional Siswa
7.	CBDRM	Comunity Based Disaster Risk Management
8.	CRS	Catholic Relief Services
9.	CU	Kredit Union
10.	DAP	Development Activity Programme
11.	DPP	Dewan Pastoral Paroki
12.	GK	Garis Kemiskinan
13.	GMIM	Gereja Masehi Injili di Minahasa
14.	GMIT	Gereja Masehi Injili di Timor
15.	GS	Gandum et Spes
16.	HPS	Hari Pangan Sedunia
17.	IDT	Impres Desa Tertinggal
18.	ILO	International Labour Organisation
19.	JAMKESMAS	Jaminan Kesehatan Masyarakat
20.	JMJ	Kongregasi Jesus Maria Joseph
21.	JPS	Jaringan Pengaman Sosial
22.	KA	Keuskupan Atambua
23.	KARINA	KARINA atau Caritas Indonesia secara hukum sebagai Yayasan kemanusiaan milik KWI (Konferensi Waligereja Indonesia).
24.	KEUSKUPAN	Wilayah Adminidtrasi yang diatur oleh seorang Uskup
25.	KIP	Kampung Improvement Program
26.	KKI	Keluarga Katolik Indonesia
27.	KKPPMP	Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau
28.	Kom. HAK	Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan.
29.	KOMDIK	Komisi Kependidikan
30.	KOMKAT	Komisi Kataketik
31.	KOMKEP	Komisi Kepemudaan
32.	KOMKIT	Komisi Kitab Suci
33.	KOMSOS	Komisi Sosial
34.	KPSE	Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi
35.	KUB	Kelompok Umat Basis
36.	KUBE	Kelompok Usaha Bersama
37.	KUR	Kredit Usaha Rakyat
38.	KWI	Konfrensi Waligereja Indonesia
39.	KYM	Kongregasi Suster Kasih dari Yesus dan Maria Bunda Pertolongan Baik

40.	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
41.	MAMPU	Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan
42.	MISEREOR	Organisasi Kerjasama Pembangunan Katolik Jerman.
43.	MUSPAS	Musyawaharah Pastoral
44.	OFMcov	Ordo Fratrum Minorum conventual
45.	OMK	Orang Muda Katolik
46.	OP	Ordo Passionis
47.	OSF	Kongregasi Suster Santo Fransiskus dari tobat dan cinta kasih Kristiani.
48.	OXFAM-GB	Badan amal bantuan dan pembangunan yang terkenal secara global dengan 70 tahun pengalaman, bekerja dan berkampanye dengan mitra di lebih dari 90 negara di seluruh dunia.
49.	P2KP	Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
50.	P2SDT	Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal
51.	P3A	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52.	P3DT	Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal
53.	P4K	Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil.
54.	PAROKI	Komunitas kaum beriman yang dibentuk secara tetap dengan batas-batas kewilayahan tertentu dalam sebuah keuskupan.
55.	PDM-DKE	Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
56.	PERDAKHI	Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia
57.	PKH	Program Keluarga Harapan
58.	PKBL	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
59.	PKPS-BBM	Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak.
60.	PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
61.	PNPM Mandiri	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
62.	PPK	Penguatan Pendidikan Karakter
63.	PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
64.	PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
65.	PPSE	Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi
66.	Pr	Projo (Pastor Diosesan)
67.	ProGAS	Program Gizi Anak Sekolah
68.	Prr	Kongregasi Putri Reinha Rosari
69.	PSE	Pengembangan Sosial Ekonomi
70.	PUAP	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
71.	RPH	Rumah Potong Hewan
72.	RTS	Rumah Tangga Sasaran
73.	SAGKI	Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia
74.	SDA	Sumber Daya Alam
75.	SDM	Sumber Daya Manusia

76.	SJ	Serikat Jesuit
77.	SNV	Netherlands Development Organisation
78.	SSP	Seksi Sosial Paroki
79.	SSpS	Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti
80.	SVD	Societas Verbi Divini
81.	TAMPIK	Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim
82.	TAP	Transition Activity Programme
83.	THS-THM	Tunggal Hati Seminari-Tunggal Hati Maria
84.	TIFA	Organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui penyaluran dana hibah kepada berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal.
85.	TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
86.	TPSP-KUD	Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa
87.	TTS	Timor Tengah Selatan
88.	TTU	Timor Tengah Utara
89.	TUP	Tanaman Umur Panjang
90.	UEDSP	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
91.	UKM	Industri Kecil dan Menengah
92.	WALHI	Wahana Lingkungan Hidup
93.	WFP	World Food Programme's
94.	WRSE	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
95.	YASRA	Yayasan Regina Angelorum
96.	YAYASAN BAKTI	Sebagai unit pertukaran pengetahuan <i>Support Office for Eastern Indonesia (SOEI)</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Gereja Katolik Keuskupan Atambua memiliki 3 wilayah administratif pastoral yakni Kabuten Malaka, Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan jumlah Gereja Paroki sebanyak 61 yang tersebar di tiga kabupaten. Tiga kabupaten ini memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak jauh berbeda. Khusus Kota Atambua, Ibu Kota Kabupaten Belu sebagai kota perbatasan (Perbatasan Negara Demokratik Timor Leste) memiliki jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 3.395 jiwa dari total jumlah penduduk sebesar 213.596 jiwa atau sekitar 1,592 % dengan GK sebesar Rp 319.280/kapita/bulan. (BPS Kabupaten Belu, 2018). Kabupaten Malaka pada tahun 2016, menurut BPS Malaka Tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 181.404 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.114 dengan presentase penduduk miskin 1,73 %, sementara GK-nya sebesar Rp. 302.584 /Kap/Bulan. (BPS Malaka Tahun 2017). Sementara Kabupaten TTU pada tahun 2017, menurut BPS TTU Tahun 2018, memiliki jumlah penduduk sebesar 253.587 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.959 dengan presentase penduduk miskin 2,35 % sementara GK-nya sebesar Rp. 335.517 /Kap/Bulan. (BPS TTU Tahun 2018).

Berbagai upaya mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Belu, TTU dan Malaka telah dilakukan dengan melalui bantuan-bantuan yang dianggarkan Pemerintah Pusat. Seperti strategi penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat dilakukan mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden

Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY hingga masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Program-program Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati seperti IDT, P2SDT, PPK, P2KP, PDM-DKE, PARUL dan PSEM, KIP, P4K, KUBE, TPSP-KUD, UEDSP, PKPS-BBM. Misi utama dari proram penanggulangan kemiskinan dari Pemerintahan Soeharto ini terutama dalam penciptaan kesempatan kerja produktif, pengembangan kapasitas administrasi pembangunan, konstruksi pembangunan, peningkatan kegiatan ekonomi produktif rakyat dan penanggulangan dampak krisis. Program-program ini sedikit membantu pengentasan kemiskinan tetapi dinilai kurang menjawab persoalan lapangan karena kebijakan-kebijakan yang diambil tidak secara merata mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah pelosok dan kurangnya data penduduk miskin sehingga anggaran-anggaran yang ditetapkan untuk membantu orang miskin malah salah sasaran.

Sementara di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, program-program pengentasan kemiskinan yang terkenal berasal dari TNP2K seperti RTS Raskin, PKH, BOS, Jamkesmas, PNPM Mandiri kota dan desa dan KUR, PKBL, P3DT dan JPS . Semua program ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia dan berdampak pada sebagian kecil kesejahteraan rakyat namun tidak secara menyeluruh mengentaskan kemiskinan kerana aspek keberlanjutan dari program-program ini diragukan. Buktinya timbulnya kekisruhan dalam masyarakat karena salah sasaran. Kecemburuan sosial timbul karena warga yang kurang mampu justru yang tidak mendapat bantuan. Lemahnya data masyarakat miskin mengakibatkan masih banyak warga miskin tetap miskin. Dalam era Pemerintahan Joko widodo juga dinilai

hanya mengkopi paste dari program-program yang pernah dikerjakan Pemerintahan SBY seperti TNP2K, pemberian jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan sebagainya namun buktinya masih saja ada jumlah orang miskin yang mengkhawatirkan. Meskipun pemerataan pembangunan terjadi di wilayah-wilayah bagian Timur Indonesia, namun masih saja ada warga miskin yang berkekurangan dalam akses-akses dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dodi Prayogo (2012) menemukan bahwa ditinjau dari institusi pelaksanaannya selama ini, upaya pengentasan kemiskinan banyak dibebankan dan dikerjakan oleh pemerintah sebagai agen utama pembangunan. Pemerintah sebagai lembaga negara, adalah institusi paling bertanggung jawab atas masalah kesejahteraan dan keamanan warganya. Namun, karena masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks, tidak hanya karena keterbatasan sumber daya manusia dan potensi ekonomi, melainkan juga masalah struktural (kelembagaan yang korup) mengakibatkan upaya pengentasan kemiskinan secara nasional menjadi terhambat. Pada sekitar dua dekade terakhir, khususnya setelah reformasi politik 1998, peran LSM secara langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan mulai berkembang dan tampak secara nyata. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan reformasi politik (1998), banyak program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dikerjakan oleh kalangan LSM, baik yang sumber dananya dari pemerintah sendiri seperti Jaring Pengaman Sosial, maupun dari sumber lain seperti lembaga asing dan korporasi. Banyak program pengentasan kemiskinan dikembangkan yang terkait dengan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, serta sektor lainnya dikerjakan oleh

kalangan LSM. Namun upaya seperti ini pun belum menunjukkan hasil yang cukup luas dan signifikan, melainkan terbatas pada cakupan wilayah secara mikro pada lokasi dan masyarakat tertentu saja.

Bäckstrand, (2006) dalam Sambung (2012) menjelaskan bahwa peran pemerintah di negara berkembang seringkali dibatasi oleh berbagai isu krusial seperti aspek kebijakan, ketersediaan dana operasional, keterbatasan kapasitas lembaga dan sumber daya pemerintahan, akses sosial, teknis pelaksanaan program dan jaringan pendukung keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai sebuah permasalahan yang kompleks, penanganan permasalahan tersebut membutuhkan peran multi pihak. Berbagai pendekatan dalam pembangunan masyarakat terbaru meyakini bahwa pelibatan komponen-komponen non pemerintahan menjadi sangat penting. Saat ini, banyak negara berkembang mendorong peran aktif kelompok masyarakat lewat berbagai organisasi kemasyarakatan dan LSM untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan ini, peneliti melakukan penelitian pada lembaga swasta dari Gereja Katolik Keuskupan Atambua dimana lembaga ini bergerak di bidang pengembangan sosial ekonomi jemaat/umat yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi kreatif terutama kepada masyarakat miskin sehingga dapat membantu meringankan pekerjaan Pemerintah Daerah dalam pengentasan masalah kemiskinan khususnya dalam wilayah administratif pastoral Keuskupan Atambua. Wilayah fokus studi penelitian ini hanya pada salah satu paroki dalam wilayah Keuskupan Atambua yaitu Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Atambua. Secara umum karakteristik kemiskinan yang

dialami oleh umat Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno adalah karakteristik kemiskinan perkotaan karena letak wilayah ini terletak di daerah perkotaan sehingga secara umum dipastikan kemiskinan yang khas pada umat Gereja paroki ini adalah kemiskinan struktural yakni akibat akses yang sulit diperoleh karena faktor pendidikan dan faktor politik sehingga perlu sekali untuk diberi pelatihan dalam bentuk pemberdayaan agar mereka dapat keluar dari permasalahan ekonomi mereka.

Adalah Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, disingkat KPSE. Sebuah badan yang dibentuk para uskup untuk tingkat nasional atau yang dibentuk oleh seorang uskup untuk tingkat keuskupan dengan tugas pokok memperhatikan dan memajukan gerakan kerasulan sosial ekonomi dalam gereja. Mulanya Komisi PSE disebut Panitia Sosial atau Pansos (Sejak 1955) dan dalam perkembangan diganti namanya menjadi Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Pada tingkat Konferensi Wali Gereja Indonesia disebut Komisi PSE KWI, di tingkat Keuskupan disebut Komisi PSE Keuskupan, sedangkan di tingkat Paroki disebut Seksi Sosial Paroki/SSP.

Kerasulan Pengembangan Sosial Ekonomi (KPSE) adalah salah satu bentuk kerasulan dalam Gereja Katolik. Kerasulan ini memberikan perhatian utama pada persoalan kemanusiaan, utamanya mereka yang berkekurangan, miskin dan papa "*Preferential option for the Poor*," "*help for the poor*," "*solidarity with the poor*," "*action with the poor*," "*option for the poor*" (ensiklik Rerum Novarum" Paus Leo XIII). Kehadiran Gereja di dunia tidak hanya demi dirinya sendiri atau mengasingkan diri tetapi demi mengabdikan dunia. Gereja sebagai lembaga maupun persekutuan hidup orang beriman, hadir sebagai sahabat sesama bagi semua orang. Gereja adalah Sosial karena dari dirinya Gereja

merupakan suatu komponen persaudaraan antar umat manusia. Persoalan kemanusiaan dalam hal pangan bukanlah hanya persoalan teknis tetapi juga persoalan etis hidup manusia. Untuk itu Kehadiran gereja selalu dalam dimensi etis.

Uskup Bali, Mgr. San dalam pertemuan Penggerak Kerasulan PSE Regio Nusra di Bali, menegaskan agar umat Katolik menyadari bahwa kemiskinan merupakan masalah global yang menimpa sebagian besar umat manusia di zaman ini. Realitas ini sungguh-sungguh memprihatinkan karena menyangkut hak hidup setiap manusia. Dalam keadaan ini, Gereja tidak boleh mendiamkan hal ini atau memposisikan diri sebagai penonton saja. Gereja hendaknya mengambil bagian dalam urusan kemiskinan yang dialami manusia, lewat karya-karya yang dapat dilakukannya. Karya pelayanan Gereja atau PSE hendaknya merupakan suatu keberpihakan kepada mereka yang miskin atau kurang beruntung dalam hidupnya. (<http://www.mirifica.net/2014/02/06/penggerak-kerasulan-pse-regio-nusra-bertemu-di-bali/> [31/10/2018]).

Dalam kemitraan dengan lembaga non pemerintah/NGO, Komisi PSE Keuskupan Atambua mendukung pengentasan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan teknis seperti bidang pertanian, peternakan, perikanan, lembaga keuangan mikro atau credit Union, wirausaha dan industri rumahan. Konkretisasi kegiatan PSE yaitu gerakan pertanian yang selaras alam, berorientasi organik, reboisasi, hemat energi, hemat BBM, hemat sampah, budi daya dan pengolahan pangan lokal. Sedangkan program prioritas yang dirancang untuk dilaksanakan di tahun 2018 ini adalah Tanggap darurat,

Pertanian Lahan Kering, Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi, Advokasi dan Pemberdayaan serta Peternakan.

Mohammad Amin Abdullah (dalam Gunawan, dkk: 2010) menegaskan bahwa agama secara inheren memiliki nilai emansipasi transformatif karena itu dalam sejarah agama telah menempatkan dirinya sebagai penggerak perubahan. Dalam konteks Indonesia, “ketertinggalan” yang berarti “kemiskinan” merupakan tantangan yang harus diatasi dengan partisipasi dan keberpihakan agama, karena dari komposisi masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Namun potensinya belum tergali secara signifikan guna membebaskan masyarakat dari berbagai masalah. Sebagai bangsa yang religius, kita perlu berpikir serius tentang tanggungjawab moral-sosial terkait apa yang dihadapi bangsa ini. Agama dengan iman dan kepercayaannya diharapkan ada pada garda terdepan perubahan sosial dan perbaikan derajat kualitas hidup dan kehidupan umat-Nya. Mungkin tidak berlebihan menempatkan nilai-nilai iman yang emansipatif menjadi obor penerang ritual sosial yang membangkitkan bangsa. Pada batasnya, tugas mulia hadirnya agama adalah untuk membangkitkan umat dari ketertinggalan. Ketertinggalan yang berarti kemiskinan dalam Islam dianggap sebagai persoalan serius sekaligus berbahaya karena kemiskinan terkadang menjadikan tingkat keimanan menjadi terganggu dan justeru dikhawatirkan hilang atau dengan kata lain menjadi kafir. (Gunawan, dkk, 2010: 51)

Misi utama Kerasulan PSE Gereja adalah menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam pergumulan hidup manusia yaitu buah-buah cinta kasih dalam kehidupan sosial ekonomi. Tanda kelihatan Kerajaan Allah adalah keadilan, perdamaian, persaudaraan dan kesejahteraan sosial ekonomi bagi

semua orang. Oleh karena itu tidaklah benar jika karya kerasulan PSE dianggap dan bahkan diperlakukan sebagai beban tambahan dalam keseluruhan karya pastoral Gereja.

Program yang telah dan sementara dilaksanakan sejak berdirinya, PPSE-KA antara lain: 1) Program *Emergency Peace Bulding dan Emergency NEAR* kerja sama PPSE & CRS. 2) Program Kesehatan dan PKP (TAP/*Transition Activity Programme*) kerja sama PPSE & CRS. 3) Program Kesehatan dan PKP(DAP/*Development Activity Programme*) kerja sama PPSE & CRS. 4) Program *Lifelihood* kerja sama PPSE dengan Oxfam GB-Kupang. 5) Program Pendidikan Krakter dan Life Skill kerja sama PPSE dengan ILO (*International Laboure Organization*). 6) Program Pengentasan Kemiskian melalui Migrasi Aman kerjasama PPSE dengan TIFA-*Foundation*. 7) Program SAfER (*Sustainable Agriculture for Enhanced Reselience*) kerja sama PPSE dengan CRS Indonesia. 8) Program TaMPIk (Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim) kerja sama PPSE dengan CRS Indonesia. 9) Program MAMPU (*Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan*) kerjasama PPSE dan Yayasan BaKTI- Makasar. 10) Program ProGAS (Program Gizi Anak Sekolah) kerja sama PPSE dengan PT. CARGILL dan WFP. (sumber: Rencana Strategis Periode 2014-2019 Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA)). Kegiatan-kegiatan di atas telah berjalan dan telah dievaluasi secara keseluruhan dan dinilai sedikit membawa perubahan dalam hal kesejahteraan ekonomi umat.

Secara umum kegiatan-kegiatan praktis yang sementara berjalan di Gereja Paroki-Paroki se-Keuskupan Atambua untuk menyukseskan visi dan misi PSE-KA seperti: peternakan babi, tenun ikat, pertanian lahan kering,

perkebunan, pemberdayaan ekonomi kreatif (pengolahan biji cabe menjadi abon, pengolahan kopi, pembuatan jus kacang hijau, pelatihan masak dari ibu-ibu PKK Kabupaten Belu kepada Orang Muda Katolik (OMK), pengolahan pisang menjadi keripik, singkong menjadi kripik/getuk/gaplek, pengolahan kacang tanah menjadi kacang sukro, kacang hijau menjadi bubur kacang hijau (semacam energen), pengolahan labu siam menjadi kue basah) pelatihan pembuatan website kepada OMK bekerja sama dengan guru-guru SMK, pelatihan membuat sablon dengan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Belu, budi daya sengan laut, produksi dan pemasaran abon ikan, pembuatan pupuk organik dan lain sebagainya.

Hasil-hasil dari kegiatan ekonomi kreatif di atas dan lain sebagainya sangat dirasakan manfaatnya dimana produk-produk hasil kegiatan di atas dijual di Gereja saat selesai misa Hari Minggu, dijual ke toko-toko makanan ataupun dijual di pasar-pasar tradisional di tiga wilayah KA. Hasil penjualan dipakai sebagai modal untuk permodalan untuk usaha selanjutnya dan sebagian disimpan ke kas kelompok dan sebagian dipakai untuk membayar uang saku/uang transportasi para pemuda OMK atau umat yang mengikuti kegiatan PSE. Romo Bob, pastor pembantu di Gereja Paroki Nualain yang dihubungi via telpon seluler menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sangat berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan karena umat dilatih untuk mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha profesional sehingga dapat memandirikan diri umat secara ekonomis.

Umat secara sadar dan antusias menyambut baik segala program pemberdayaan yang dibuat oleh Gereja karena mereka percaya apa yang dibuat oleh Gereja pasti akan berhasil berkat campur tangan Tuhan. Seberapa

jauh tingkat keberhasilan dari kegiatan PSE ini masih terus diupayakan oleh pihak Keuskupan Atambua karena tidak semua program yang dirancang oleh Gereja KA dapat berhasil 100%. Tantangan-tantangan situasi lingkungan sosial, struktur politik, budaya dan adat istiadat, akses-akses publik, mental dan kepribadian umat sangat menentukan keberhasilan dari program-program PSE Keuskupan Atambua. Kemiskinan menjadi prioritas utama yang harus diberantas, paling tidak melalui PSE yang telah dirancang Konferensi Wali Gereja Indonesia dapat sedikit membantu mengurangi permasalahan kemiskinan di wilayah-wilayah paroki se-Keuskupan Atambua.

KPSE dipandang sangat bertanggungjawab untuk kegiatan pemberdayaan di atas sehingga perlu untuk memberdayakan organisasi di luar pemerintah yaitu perlu dipikirkan model-model pemberdayaan yang tepat sesuai karakteristik masyarakat lokal. Sebagai halnya sebuah organisasi, KPSE-KA perlu memiliki kelembagaan yang kuat yakni kemampuan manajemen, sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kinerja. Strategi atau usaha untuk menguatkan kelembagaan PSE-KA perlu dilakukan terus-menerus untuk menyukseskan visi dan misi PSE-KA sehingga dapat menunjang permodalan, tata kelola/ manajemen kelembagaan, jaringan kerja sama dengan pihak luar sehingga keberlanjutan setiap rancangan kegiatan PSE dapat terus berjalan dan berhasil dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan dalam wilayah Pastoral Keuskupan Atambua. Strategi Penguatan seperti; efisiensi struktur, gaya kepemimpinan, pelayanan, fungsi dan peran/kontribusi, kemampuan manajemen/tata kelola, sumber daya, kinerja yang kuat, modal sosial, jaringan kerja sama dengan pihak luar, status

pengakuan legalitas hukum, keuangan, aset-aset (sarana-prasarana) dan program-program prioritas pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian singkat di atas peneliti ingin mencari tahu lebih dalam atau lebih lanjut tentang segala macam kegiatan, proses, peran, modal sosial dan strategi yang digunakan PSE-KA sehingga dapat menguatkan kelembagaan PSE-KA dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah pastoral Keuskupan Atambua dan atas dasar pemikiran di atas maka peneliti hendak mengangkat tesis ini dengan judul "*Penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Umat Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno (Studi Kasus PSE di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno- Keuskupan Atambua)*". Alasan pemilihan judul ini sangat terkait dengan bidang studi kemiskinan pada Program magister Ilmu Sosial dan juga minat peneliti terhadap masalah-masalah sosial terutama kemiskinan agar dapat dientaskan sehingga dapat mengurangi jumlah warga miskin di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Keuskupan Atambua pada khususnya. Mengingat jumlah warga yang miskin di wilayah pastoral Keuskupan Atambua sangat mengkhawatirkan sehingga perlunya campur tangan Gereja Katolik Keuskupan Atambua untuk juga turut melerai permasalahan kemiskinan ini dengan berbagai program prioritas dari KPSE-KA yang juga secara tidak langsung membantu pemerintah daerah setempat dalam memberantas kemiskinan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1 Bagaimana proses Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) yang dijalankan di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno Atambua?
- 1.2.2 Bagaimana Kontribusi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno Atambua?.
- 1.2.3 Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno dalam melaksanakan program prioritas Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE)?
- 1.2.4 Bagaimana strategi penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno Atambua?.
- 1.2.5 Bagaimana strategi Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (KPSE) dalam mempertahankan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1.1 Untuk menjelaskan proses Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Keuskupan Atambua.
- 1.3.1.2 Untuk menjelaskan kontribusi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam mengentaskan masalah kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Keuskupan Atambua.

1.3.1.3 Untuk menjelaskan dan mencari tahu hambatan yang dihadapi oleh Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno dalam melaksanakan program prioritas Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE)

1.3.1.4 Untuk menjelaskan strategi penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam mengentaskan masalah kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno.

1.3.1.5 Untuk menjelaskan strategi Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (KPSE) dalam mempertahankan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan.

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Sebagai sumbangan kepada almamater dalam rangka memperkaya kepustakaan dan bahan acuan untuk penulisan karya-karya berikutnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

1.3.2.2. Manfaat Praktis.

- a. Untuk pembuat kebijakan dalam hal ini KPSE KWI, KPSE Keuskupan Atambua dan Seksi Sosial Paroki (SSP) St. Petrus Tukuneno agar semakin gencar dan tekun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sehingga upaya pemberantasan masalah kemiskinan dapat mengurangi angka

kemiskinan khususnya di wilayah pastoral Keuskupan Atambua.

- b. Sebagai sumber informasi bagi Gereja-Gereja paroki se-Keuskupan Atambua untuk tetap terus giat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan di Paroki-Paroki setempat.

1.4 ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini berjudul "*Penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Umat Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno*" (Studi Kasus PSE di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Keuskupan Atambua). Penelitian ini dianggap sangat penting mengingat permasalahan kemiskinan di wilayah Pastoral Keuskupan Atambua sangat mengkhawatirkan dan sangat mendesak untuk diatasi karena akan berdampak pada semua lini kehidupan seseorang atau masyarakat jika tidak segera diatasi. Persoalan kemiskinan tidak mampu hanya diurus Pemerintah NKRI saja tetapi menjadi tugas bersama termasuk agama atau Gereja dalam hal ini untuk memberantasnya.

Tulisan ini merupakan karya asli dari peneliti dan bukan merupakan hasil plagiat karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penulis, kajian tentang "Penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan" masih minim, walaupun ada tetapi permasalahan yang dikaji dan pendekatan yang diteliti juga berbeda.

Ada beberapa jurnal yang terkait dengan tema ini, misalnya yang ditulis oleh Sambung, dkk (2012). Dalam penelitiannya, Sambung, dkk menganalisa tentang peran GMIM dalam memberdayakan masyarakat sekitar di Kota Tomohon-Sulawesi Utara. Letak perbedaan penelitian Sambung, dkk dengan penelitian pada Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PSE-KA) ini adalah, penelitian PSE-KA ingin mencari tahu bagaimana strategi penguatan seperti efisiensi struktur, gaya kepemimpinan, pelayanan, fungsi dan peran/kontribusi, kemampuan manajemen/tata kelola, sumber daya, kinerja, modal sosial, jaringan kerja sama dengan pihak luar, status pengakuan legalitas hukum, keuangan, aset-aset (sarana-prasarana) dan program-program prioritas pengentasan kemiskinan. Sementara Sembung, dkk hanya melihat satu sisi yakni peran GMIM. Peneliti lainnya hanya meneliti tentang peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan. Letak perbedaan dengan penelitian mereka dengan penelitian PSE-KA ini jelas sangat jauh sekali karena peran lembaga swasta dan pemerintah memiliki orientasi, peran, proses, pendekatan dan spritualitas yang berbeda.

Sebelumnya juga telah ada studi yang menemukan bahwa penguatan kelembagaan cukup diukur dari aspek hukum, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dan kerja sama dengan pihak ketiga, dapat efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan pada program PNPM mandiri di Kecamatan Balangpagong, Kabupaten Gresik. (Lianto,dkk. 2015).

Kemudian studi yang dilakukan oleh (Lady Vironica Janiari dan Aris Soelistyo, 2017) tentang peran kelembagaan (pemerintah dan perbankan) serta pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat berperan kuat bagi peningkatan kesejahteraan bagi pengentasan kemiskinan.

Studi lain dilakukan oleh (Kristiyanto, 2011) tentang Penguatan Kebijakan Publik sebagai Usaha Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Industri Mikro Olahraga di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penguatan kebijakan publik yang jelas, dapat memberikan kesempatan bagi industri olahraga dalam mengembangkan usaha bisnis olahraga sehingga dapat juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Subekti, dkk. 2015) di Kabupaten Jember menunjukkan penguatan kelompok tani yaitu dengan meningkatkan hubungan sinergis antara kelompok tani dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dapat mendukung penguatan kelompok tani adalah petani, gapoktan, Departemen Pertanian, Lembaga Penelitian, Laboratorium hama dan penyakit, PPAH, lembaga keuangan, HIPPA, pedagang, fasilitas produksi kios dan universitas. Dengan penguatan itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Studi yang dilakukan oleh (Hermanto dan Dewa K.S Swastika, 2011) di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan menemukan bahwa penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses

permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agus Supriono, 2013) dkk di Desa Tambak Ukir-Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, menemukan strategi memperkuat kelompok tani adalah dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Artinya bahwa potensi keunggulan yang dimiliki berupa faktor-faktor kekuatan internal yang ada dapat dikelola menjadi kekuatan pendorong guna meraih peluang-peluang serta sekaligus meminimalkan pengaruh negatif dari ancaman eksternal dapat berdampak pada penghasilan petani.

Dari sekian banyak temuan yang ada, peneliti menemukan hal berbeda bahwa melalui Penguatan kelembagaan pada aspek; Struktur, SDM, Keuangan, Pendanaan Dan Asset Organisasi, Monitoring dan Evaluasi, Legalitas, Data dan Informasi dan Jaringan kerja sama dapat menentukan keberhasilan lembaga (KPSE) dalam mengentaskan kemiskinan dan keberlanjutan program prioritas pengentasan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran penerima manfaat program. Penguatan pada aspek-aspek tersebut lebih efisien dan efektif karena seluruh aspek dalam internal dan eksternal kelembagaan dikuatkan sehingga dapat merealisasikan visi dan misi kelembagaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. LANDASAN TEORI.

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Levitan (1980) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. (Suyanto, 2013: 1).

Menurut Schiller (1979) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. (Suyanto, 2013: 1).

John Friedman (1979), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau *assets* (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna. (Suyanto, 2013: 2).

John Friedman (Safi'l, 2011), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau *assets* (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang

dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna. (Safi'l, 2011:25)

Mubyarto (1994) (dalam Safi'l, 2011) misalnya melihat bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Inti dari pada definisi ini adalah situasi serba kekurangan yang tidak dapat dihindari oleh si miskin. Mubyarto (1998) memberikan definisi kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya ketrampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Rendahnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan rendahnya produktivitas dan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat. Sejalan dengan pengertian tersebut Bank Dunia menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum. Atas dasar itu dibuat dua macam standar indeks berdasarkan tingkat konsumsi dan standar hidup minimum. Indeks pertama adalah kemiskinan yang spesifik di setiap negara. Indeks kedua bersifat global yang membandingkan secara silang di antara negara. Indeks kedua ini menghasilkan garis kemiskinan tinggi dan garis kemiskinan rendah yang meliputi pendapatan perkapita antara US \$ 275, 0 – US \$ 370, 0. (Safi'l, 2011:24-25).

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Munurut Bagong Suyanto (2013) faktor yang melatarbelakanginya akar penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlakukan atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional seperti pola hubungan *patron-clien*, jiwa gotong royong dan kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial. Kedua, kemiskinan buatan yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai secara ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. (Suyanto, 2013: 8-9).

Menurut Safi,i (2011) kemiskinan dilihat dari faktor penyebabnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan struktural, kemiskinan sumber daya ekonomi dan kemiskinan kultural. Menurut Surbakti (dalam Safi,i, 2011) kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Kemiskinan sumber daya ekonomi lebih melihat akar kemiskinan itu terletak kepada

ketidakpunyaan sumber daya ekonomi seperti tanah dan modal, pendidikan dan keterampilan karena pertambahan penduduk yang pesat tidak seiring dengan sumber daya ekonomi yang tersedia. Akibatnya tidak hanya semakin banyak petani gurem dan buruh tani tetapi juga surplus tenaga kerja.

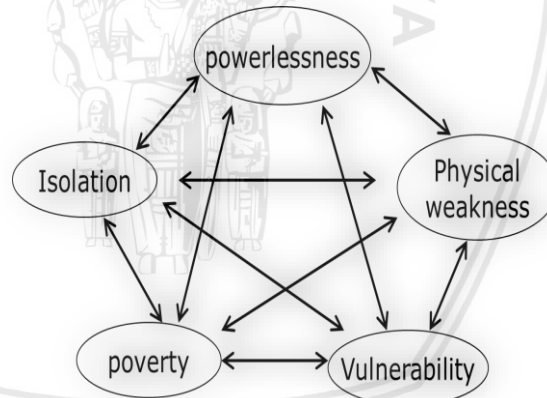
Chriswardani Suryawaty (2005), mensinyalir kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor budaya ternyata dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berkembang dan maju. Di negara-negara maju, transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern berhasil dilakukan. Namun di sejumlah negara yang sedang berkembang atau negara-negara dunia ketiga, transformasi menuju modernitas dihalang oleh hambatan sosial budaya berupa nilai-nilai tradisional yang sangat kuat dalam segala aspek kehidupan. Ini menyebabkan mereka hidup dalam keterbelakangan, tidak maju dan miskin. (Suryawati, 2005)

2.1.1.3 Perangkap Kemiskinan

Salah satu definisi kemiskinan yang lebih lengkap dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Menurut Chambers, inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur yaitu: 1) kemiskinan itu sendiri, 2) kelemahan fisik, 3) keterasingan atau kadar isolasi, 4) kerentanan dan 5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling berkait satu sama lain sehingga merupakan perangkap

kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

Dari kelima dimensi di atas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama. Kerentanan, menurut Chambers dapat dilihat dari ketidakberdayaan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan *poverty racket* atau “roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya. (Suyanto, 2013:12).



Gambar 2.1 Perangkap Kemiskinan/*Deprivasi Trap*
(Chambers)

2.1.1.4 Pendekatan Kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dilakukan adalah untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Menurut Korten dalam

Teguh (2017) ada dua pendekatan dalam pembangunan yang dilakukan selama ini yakni pendekatan *top-down* dan *bottom up*. Pendekatan *top-down* merupakan *blue-print strategi* (cetak biru) merupakan pendekatan yang bersumber pada pemerintah dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau obyek pembangunan saja. Sebaliknya pendekatan *bottom-up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat di dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini disebut juga sebagai *people centered development*.

Pendekatan pembangunan yang berusaha menumbuhkan keberdayaan kepada masyarakat hendaknya menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan, bukan sebaliknya hanya berposisi sebagai obyek pembangunan. Di samping itu di dalam memandang kemiskinan tidak secara strotip dan seragam karena setiap daerah memiliki variasi persoalan yang berbeda dan khas. Pendekatan pembangunan sudah selayaknya mampu menampung permasalahan yang beranekaragam. Oleh karena itu, harus memberi peluang kepada masyarakat untuk secara lebih leluasa mencari solusi terhadap persoalan yang menimpa. Orientasi terhadap bentuk kegiatan yang seragam merupakan distorsi dalam pembangunan itu sendiri. Bertolak dari pendapat tersebut sebuah pembangunan masyarakat miskin hendaknya lebih bernuansa pemberdayaan. (Teguh, 2017: 37-38)

2.1.2 Konsep Pemberdayaan.

2.1.2.1 Pengertian Pemberdayaan.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti “kekuatan” atau “kemampuan”. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-sikap perilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki daya/kemampuan/kekuatan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain. Senada dengan pengertian in Priyono dan Pranarka (dalam Teguh, 2017) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang

kurang/belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Bertolak pada kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk konteks Barat apa yang disebut dengan *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan dari pada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di Barat merupakan suatu reaksi atas pergulatan kekuasaan. Sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya.

Mengingat perbedaan latar belakang sosial, budaya, politik dan lingkungan maka dalam mengadopsi teori tidak dapat dilakukan secara mutlak. Seperti halnya dalam mengadopsi teori pemberdayaan. Kesadaran tentang perbedaan konteks memberikan sinyal bahwa dalam adopsi teori hendaknya tidak sekedar mentransformasikan dari suatu konteks ke dalam konteks lain entah itu negara, budaya, politik, maupun lingkungan. Dalam hal ini perlu dilakukan adaptasi yaitu suatu proses transformasi teori dari suatu konteks ke dalam konteks lain secara selektif yaitu mempertimbangkan perbedaan latar belakang. Bahwa dalam memahami *empowerment* antara konteks Barat dengan konteks Indonesia hendaknya berbeda. Dalam aplikasi konsep pemberdayaan ke dalam bentuk pendekatan teknis tidak mengalami hambatan sosial budaya, politik dan lingkungan. Oleh karenanya pemberdayaan yang dilakukan menjadi sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Winarni (dalam Teguh, 2017:77-79) mengungkapkan bahwa inti pemberdayaan meliputi tiga hal yakni pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), tercipta kemandirian. Berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini berdasarkan asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya hanya tidak disadari saja atau belum diketahui sehingga perlu digali saja dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan hendaknya tidak menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), sebaliknya harus mengantarkan kepada proses kemandirian.

Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah: 1) Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan mandiri). 2) Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.

2.1.2.2 Hakekat Pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. (Eddy Ch. Papilaya dalam Zubaeda, 2013:24).

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering and sustainable*". Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). (Zubaeda, 2013:25).

Secara Substantif, pemberdayaan masyarakat erat hubungannya dengan pengembangan masyarakat karena ketika terjadi proses pemberdayaan berarti telah terjadi pengembangan masyarakat secara bertahap menuju ke tahap yang lebih baik demi keadilan sosial. Pengembangan masyarakat adalah sebuah proses restrukturisasi masyarakat dengan cara menawarkan pola-pola swadaya-partisipatif dalam mengelola dan mengorganisasikan kehidupan sosial-ekonomi sehingga akan lebih memungkinkan mereka memenuhi kebutuhannya sendiri dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Pengembangan

masyarakat adalah tahapan awal menuju proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan pemberdayaan jenis ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. *Kedua*, melakukan konsientisasi/*consientizatio*. Konsientisasi merupakan proses penumbuhan kesadaran dan pemahaman terhadap situasi yang sedang terjadi baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi dan sosial. Seseorang sudah berada dalam tahap konsientisasi jika ia sanggup menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. Dalam kerangka ini, pemberdayaan diidentikan dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. (Zubaeda, 2013:vi-viii).

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: *pluralis*, *elits*, *strukturalis* dan *post-strukturalis*.

- a. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran,
- b. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfirmasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu disadari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

Faktor lain yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat di luar faktor ketiadaan daya (*powerless*) adalah faktor ketimpangan. Ketimpangan yang sering kali terjadi di masyarakat meliputi:

- a. Ketimpangan struktural yang terjadi di antara kelompok primer seperti perbedaan kelas seperti antara orang kaya (*the have*) dengan orang miskin (*the have not*) dan antara buruh dengan majikan; ketidaksetaraan gender; perbedaan ras maupun perbedaan etnis

yang tercermin pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan mayoritas.

- b. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan muda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah *gay-lesby*,

Oleh karena itu, kegiatan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan sosial. Dalam konteks ini, perlu diklarifikasi apakah akar penyebab ketidakberdayaan berkaitan dengan faktor kelangkaan sumber daya atau faktor ketimpangan, ataukah kombinasi keduanya. Upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan strategi: *Pertama*, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka. (Zubaeda, 2013:25-28).

2.1.2.3 Pendekatan Pembedayaan

Pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda mengakibatkan lahirnya dua sudut pandang yang saling berkontradiktif.

Pertama, Pendekatan yang memahami pemberdayaan sebagai suatu sudut pandang konfliktual. Munculnya cara pandang tersebut didasarkan pada perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya/kekuatan dengan pihak yang lemah. Perspektif konflik memandang bahwa pihak yang kuat berhadapan dengan pihak yang lemah yang saling berkompetisi untuk mendapatkan daya. Hal ini berakibat pada berkurangnya daya pada kelompok yang kuat dan menambah daya bagi kelompok yang lemah. Sudut pandang ini lebih populer dengan istilah *zero-sum*.

Kedua, bertentangan dengan pandangan pertama, bahwa jika pemberdayaan dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah maka justru akan menambah kekuatan bagi kelompok yang kuat. Pemberian daya akan memperoleh manfaat yang positif berupa peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan terhadap pihak yang lemah. Penekanan keyakinan ini lebih pada aspek generatif. Sudut pandang ini kemudian terkenal dengan nama *positive-sum*. (Teguh, 2007:90-91)

2.1.3 Selayang Pandang Tentang Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Atambua (KA)

2.1.3.1 Orientasi Karya PSE.

a. Sebagai Animator / Motivator / Inspirator / Inovator

Mengadvokasi dan memberikan pencerahan dalam menemukan gagasan baru lewat Kitab Suci, Ajaran Sosial Gereja, tradisi-tradisi Gereja, perkembangan riset dan teknologi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasarnya.

b. Karya Karitatif

Adalah pelayanan kasih untuk meringankan sesaat penderitaan sesama seperti pemberian makanan, dan obat-obatan (situasi emergensi akibat bencana alam dan Politik). Karya ini selalu berorientasi untuk mendukung rasa kepedulian atau perhatian terhadap mereka yang korban akibat dampak bencana alam dan kekerasan politik.

c. Pendidikan Pembangunan

PSE memberikan pendidikan serta pembinaan keimanan bagi umat kristiani, agar mereka semakin tumbuh dalam semangat rela berbagi dan semakin mengembangkan diri seutuhnya dalam mengelola tata keduniaan demi memerangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan manusia.

d. Peningkatan Taraf Hidup Sosial Ekonomi Umat.

Komisi PSE meningkatkan taraf hidup umat melalui transformasi budaya, pendidikan ekonomi keluarga, membentuk jaringan kerja melalui peran PPSE, membangun gerakan alternatif

yang memberdayakan masyarakat melalui kelompok miskin, lemah dan tertindas melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pertanian, Peternakan, industri dan berbagai kegiatan wirausaha.

e. Gerakan APP

Aksi Puasa Pembangunan/APP merupakan sarana pendewasaan iman umat atau gerakan iman dan tobat bersama untuk membangun sikap rela berbagi dan berkorban menuju kekudusan hidup Kristiani. Konkretisasi dari gerakan APP adalah pendalaman iman APP, bakti sosial APP, katekese sosial APP, latihan rohani selama masa APP seperti: ibadat tobat, jalan salib, pendalaman Kitab Suci, rajin merayakan Ekaristi, retreat APP, rekoleksi APP, dana APP, (olah iman, olah karsa, dan olah uang/dePastora). Gerakan APP di Indonesia telah hadir sejak tahun 1972 dan menjadi gerakan seluruh umat Katolik di Indonesia.

f. Gerakan HPS

Membangkitkan kesadaran umat manusia terhadap peran sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat terhadap pengembangan pangan, pentingnya pangan yang cukup, sehat dan berkelanjutan, serta mendukung pengentasan kemiskinan. HPS diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober. Persoalan kemanusiaan dalam hal pangan bukanlah hanya persoalan teknis tetapi juga persoalan etis hidup manusia. Untuk itu Kehadiran gereja selalu dalam dimensi etis. Dalam kemitraan dengan lembaga non pemerintah / NGO, Komisi PSE Keuskupan Atambua mendukung pengentasan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan teknis seperti bidang

pertanian, peternakan, perikanan, lembaga keuangan mikro atau credit Union, wirausaha dan industri. Konkretisasi kegiatan HPS: Gerakan pertanian yang selaras alam, berorientasi organik, reboisasi, penanaman pohon kembali, hemat energi, hemat BBM, hemat sampah, budi daya dan pengolahan pangan lokal.

2.1.3.2 Keterlibatan Sosial Gereja Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi

Dalam kehidupan sosial ekonomi, martabat pribadi manusia serta panggilannya yang seutuhnya, begitu pula kesejahteraan seluruh masyarakat, harus dihormati dan dikembangkan. Sebab, manusia yang menjadi pencipta, pusat dan tujuan seluruh kehidupan sosial ekonomi itu (GS 63). Demikian konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* memulai pembahasannya tentang kehidupan sosial ekonomi. (Soetoprawiro, 2003:191).

Paus Yohanes XXIII melalui ensiklik *Mater et Magistra* mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi harus disertai dengan kemajuan sosial yang sepadan sehingga segenap lapisan masyarakat dapat ikut memanfaatkan produktivitas yang senantiasa meningkat itu. Dalam kerangka ini kita memerlukan kewaspadaan dan usaha yang amat intensif untuk menjamin agar kesenjangan sosial tidak bertambah melainkan justru berkurang. (MM 73). Namun demikian tidaklah mungkin untuk menetapkan dengan seksama suatu struktur ekonomi yang sesuai dengan martabat manusia. Oleh karena itu, Paus Pius XII, menurut Paus Yohanes XXIII, membantu kita dengan pedomannya bahwa usaha-usaha kecil dan menengah di bidang pertanian, seni dan kerajinan, industri dan

perdagangan hendaknya direksa dan didukung. Akan tetapi usaha kerajinan dan koperasi tersebut harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan sarana dan metoda produksi atas dasar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, usaha kecil dan menengah dilakukan sendiri oleh para pekerja dan anggota koperasi yang bersangkutan. Atas dasar itu perlu ada pembinaan terhadap para pekerja dan anggota koperasi tersebut, disamping upaya perlindungan dari pihak pemerintah (MM 87-90). (Soetoprawiro, 2003:198-199).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini beberapa jurnal yang dipakai oleh peneliti untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian lainnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.

NO.	NAMA, TAHUN DAN JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Lianto, dkk (2015) <i>"Penguatan Kelembagaan Pengelola Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik"</i>	<p>Dalam penelitiannya tentang penguatan kelembagaan merupakan salah satu pilar keberlanjutan program PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini mengkaji penguatan aspek hukum, penguatan kelembagaan dan kemandirian lembaga pengelola dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Balongpanggung. Hasil penelitian menunjukkan penguatan aspek hukum dilakukan dengan melengkapi legalitas pendirian BKAD sebagai payung hukum kegiatan dana bergulir. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan penyusunan mekanisme pengelolaan dana bergulir, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan kelembagaan, serta kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan usaha kelompok masyarakat.</p> <p>Penelitian Lianto dkk dalam menganalisis penguatan kelembagaan hampir mirip dengan penelitian PSE KA, dimana mereka melihat penguatan pada aspek hukum dan Penguatan kelembagaan. Berbeda dengan penelitian PSE-KA, dimana penguatan kelembagaan PSE</p>

		dianalisis dari banyak aspek yakni efisiensi struktur, kepemimpinan, pelayanan, fungsi dan peran/kontribusi, kemampuan manajemen/tata kelola, sumber daya, kinerja, modal sosial/jaringan kerja sama dengan pihak luar, status pengakuan legalitas hukum, keuangan, aset-aset (sarana-prasarana), fungsionalisasi hubungan dan komunikasi interaktif.
2.	Apando Ekardo, dkk (2014) <i>"Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir selatan"</i>	<p>Dalam penelitiannya tentang PKH. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan sumber air minum. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya adalah PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Punggasan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan efektivitas PKH bagi rumah tangga miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah efektif jika dilihat dari tujuan program. Namun di sisi lain penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir Punggasan belum bisa dikatakan efektif karena belum tepat sasaran.</p> <p>Penelitian Ekardo, dkk ini sangat berbeda dengan penelitian pada PSE-KA karena Ekardo, dkk hanya mendeskripsikan secara umum efektifitas keberhasilan PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan. Sementara analisis dari sisi proses, kontribusi/peran, modal sosial dan strategi yang digunakan PKH tidak dilakukan.</p>
3.	Grace Sumbang, dkk (2012) <i>"Peran Gereja Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Tomohon Sulawesi Utara"</i>	<p>Dalam penelitiannya untuk menganalisa peran GMIM dalam memberdayakan masyarakat sekitar di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Narasumber dalam penelitian ini adalah para aktor yang terlibat langsung dalam pengembangan UKM pengolahan kelapa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pola pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh GMIM adalah melalui BLPT (Training Center) Kaaten-Tomohon berdasarkan pengolahan kelapa-kayu telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pola yang dilakukan oleh GMIM adalah pemberdayaan ekonomi. Dalam menjalankan usahanya, BLPT melibatkan setiap workfoce siswa drop-out dari sekolah atau tidak menyelesaikan sekolah tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, mengurangi jumlah putus sekolah, meningkatkan pengembangan bisnis kreatif, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatkan pendapatan untuk kas GMIM.</p>

		<p>Perbedaan penelitian pada Gereja Katolik dengan GMIM sangat mencolok karena GMIM tidak memiliki lembaga resmi Gereja yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi bagi kaum miskin, papa dan tertindas, sementara Gereja Katolik melalui Komisi PSE menjalin kerja sama dengan Pemerintah, LSM lokal dan Internasional dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan. Pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan GMIM melalui BLPT Kaaten, Tomohon adalah pemberdayaan ekonomi berbasis pengolahan kayu kelapa. Sementara pola pendekatan yang dilakukan oleh PSE-KA berbasis masyarakat lokal karena sesuai dengan kondisi di lapangan dan menyentuh kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat lokal. Melalui program-program prioritas (Tanggap Darurat, Pertanian Lahan Kering, Kesehatan, Air Bersih Dan Sanitasi, Advokasi dan Pemberdayaan dan Peternakan) yang bervariasi dipastikan dapat mengentaskan masalah kemiskinan.</p>
4.	<p>Asaad, (2015) <i>"Efektivitas Program Bantuan Dana Bergulir Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan"</i></p>	<p>Dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program bantuan dana bergulir khususnya program PDMDKE dan UEDSP di kota Medan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan dana bergulir pada dasarnya dapat meningkatkan usaha masyarakat penerima bantuan khususnya kegiatan usaha informal. Pemberian bantuan modal bergulir dapat meningkatkan kesejahteraan mayoritas masyarakat miskin. Kesejahteraan meningkat sesudah menerima bantuan. Demikian pula dengan keperluan pokok sehari-hari seperti keperluan untuk makanan dan sekolah dapat dipenuhi sesudah menerima bantuan. Program bantuan dana bergulir sudah dilaksanakan secara efektif untuk pengentasan kemiskinan di Kota Medan.</p> <p>Penelitian ini menarik karena hasil dari penelitiannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun analisis kekuatan, peran modal sosial dan strategi yang digunakan program PDMDKE dan UEDSP tidak dilakukan sehingga hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat ini perlu dianalisis lebih lanjut.</p>
5.	<p>Agustinus Longa Tiza, dkk (2014) <i>"Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur</i></p>	<p>Dengan penekanan pada model implementasi <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i> dimana terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Program "Anggur Merah" merupakan inovasi kebijakan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dengan pendekatan pemberdayaan berdasarkan potensi yang</p>

	<p><i>Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)”</i></p>	<p>ada pada masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi diantara pelaku program dari tingkat propinsi sampai tingkat desa belum terlaksana secara maksimal; Masyarakat penerima program belum memahami secara baik manfaat dan kegunaan program sehingga mereka kurang partisipatif; Belum meratanya alokasi bantuan dana sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat desa; Pendampingan yang belum maksimal; Kesiapan tenaga pendamping belum memadai; Akses untuk memperoleh informasi program bagi masyarakat belum optimal; Pengawasan belum maksimal.</p> <p>Penelitian ini sangat menarik karena menganalisis realitas pembangunan masyarakat desa di Kabupaten TTU melalui Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Perbedaan cukup jauh dengan penelitian pada PSE-KA karena Anggur Merah berasal dari program pemerintah sedangkan PSE berasal dari Gereja Katolik namun pelayanannya sama yakni untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tiza, dkk tidak menganalisis strategi, kontribusi dan kekuatan modal sosial yang digunakan oleh program “anggur merah” sehingga misinya belum tercapai. Sedangkan PSE dengan kekuatan modal sosial yang kuat melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan LSM-LSM lokal dan internasional menyebabkan program-program prioritas yang dilaksanakan mengena pada situasi kebutuhan masyarakat “akar rumput” sehingga dapat menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Pola pendampingan dan evaluasi capaian program prioritas yang kuat dan berkala membuat masyarakat miskin merasa terlayani dengan baik dalam pemberdayaan maupun pelatihan-pelatihan ekonomi. Program “Anggur Merah” teridentifikasi banyak kekisruhan oleh karena kontrol dan pendampingan serta jaringan kerja sama yang lemah.</p>
6.	<p>Akhmadi, dkk (2016)</p>	<p>Dalam penelitiannya tentang Program PUAP merupakan salah satu program pengurangan kemiskinan di perdesaan di bawah koordinasi PNPM sebagai program pemberdayaan masyarakat. Program PUAP memberikan bantuan modal usaha bagi petani anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani. Tujuan penelitian ini adalah untuk memformulasikan strategi terbaik penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Hasilnya menunjukkan bahwa program PUAP telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi per hektar dan pendapatan petani di Desa Jati masing-masing sebesar 641,14 kg dan Rp 878.358</p>

		<p>lebih besar dibandingkan dengan produksi padi dan pendapatan petani di Desa Jamali yang tidak menerima Program PUAP. Hasil analisis QSPM, yaitu dengan mengelaborasi delapan strategi kunci tersebut dengan faktor-faktor strategis internal dan eksternal untuk mendapatkan strategi yang terbaik. Hasil perhitungan <i>Total Attractiveness Scores (TAS)</i> menunjukkan bahwa strategi penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan petani melalui program pendidikan khusus pengembangan manajemen agribisnis bagi petani adalah strategi yang terbaik.</p> <p>Penelitian Akhmadi ini menarik karena mereka mencari tahu strategi penanggulangan kemiskinan di perdesaan dan hasilnya program PUAP telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi per hektar dan pendapatan petani di Desa Jati. Tujuan penelitian ini hampir sama dengan penelitian pada PSE-KA yang diangkat oleh penulis ini yakni dengan mencari tahu strategi penguatan kelembagaan sehingga dapat menyukkseskan program pengentasan kemiskinan di Gereja Tukuneno Atambua. Namun letak perbedaan penelitian PSE-KA dengan Program PUAP yakni Program PUAP memberikan bantuan modal usaha bagi petani anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani sedangkan PSE-KA memberikan perhatian kepada kaum miskin dengan memberikan pengetahuan pemberdayaan sehingga mereka mampu hidup mandiri dan mengembangkan dirinya setelah diberdayakan bukan dengan memberikan mereka uang untuk modal usaha tetapi modal pengetahuan.</p>
7.	<p>Fajarwati, dkk (2017) <i>"Strategi untuk Mengatasi Permasalahan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)"</i></p>	<p>Dinas Sosial mengelompokkan penduduk yang menjadi target yaitu kelompok penduduk PMKS. Menurut Dinas Sosial, setidaknya terdapat 22 definisi operasional dan karakteristik dari masing-masing jenis PMKS, salah satunya adalah WRSE. Hasil studi menunjukkan: 1) jumlah WRSE terbesar di Kabupaten Temanggung menurut data statistik adalah di Kecamatan Temanggung yaitu sebanyak 691 WRSE dan terkecil di Kecamatan Bulu yaitu sebanyak 22 WRSE; 2) faktor-faktor yang menyebabkan wanita menjadi WRSE di desa ini adalah perceraian/kematian suami, tingkat pendidikan rendah, pekerjaan dengan gaji rendah; 3) upaya-upaya yang telah dilakukan Dinsos untuk mengatasi WRSE yaitu dana ternak, pelatihan pembuatan kue dan pelatihan sulam pita; 4) faktor-faktor penghambat dalam upaya pengentasan WRSE adalah terbatasnya waktu senggang, tingkat pendidikan rendah, usia, jumlah tanggungan, terbatasnya akses finansial; dan 5) strategi yang dapat</p>

		<p>direkomendasikan untuk mengentaskan WRSE dari kemiskinan: akses ke pendidikan formal, pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas, bantuan dana untuk penghidupan dan anak-anak WRSE, membuka akses pada keuangan mikro, pendampingan spiritual/psikologis, memperkuat jaringan pendukung WRSE dan pelibatan WRSE dalam perencanaan maupun program pengentasan kemiskinan.</p> <p>Penelitian ini menarik dimana Fajarwati, dkk mampu mencari tahu penyebab wanita menjadi WRSE dan mencari strategi untuk mengatasi permasalahan ini dan merekomendasikan untuk penyelesaiannya melalui pendidikan, pelatihan, kredit mikro dan pendampingan. Secara perencanaan rekomendasi ini mirip dengan yang direncanakan oleh PSE-KA untuk mengatasi permasalahan kemiskinan khususnya pada pemberdayaan wanita dan anak-anak di Gereja Tukuneno Atambua. Rencana strategi yang menjadi prioritas PSE-KA salah satunya adalah pemberdayaan dan pendampingan kepada wanita dan anak-anak rentan miskin. Perbedaan kedua penelitian ini adalah PSE-KA melalui program strategisnya dapat membantu masyarakat miskin keluar dari masalah hidupnya salah satunya pendampingan terhadap kaum perempuan dan anak. Pola pendekatan pemberdayaan PSE adalah pendekatan berbasis masyarakat lokal sesuai kebutuhannya, sementara penelitian WRSE menangani perempuan miskin dengan pemberdayaan yang berbasis kemampuan individu.</p>
8.	<p>Girsang (2009) <i>"Strategi Pengentasan Kemiskinan di Pulau Kecil di Propinsi Maluku"</i></p>	<p>Dalam penelitiannya menemukan bahwa kemiskinan disebabkan karena kesenjangan akibat ketidakmerataan pembangunan ekonomi antara ibu kota provinsi kota Ambon dengan ibu kota kabupaten lain dan tingginya angka pengangguran. Bagian terbesar dari penduduk miskin itu adalah petani, khususnya petani tanaman pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani miskin yang aktif secara ekonomi tersebar di pulau-pulau kecil. Mereka memiliki pola usaha tani subsistem dan berpendapatan rendah serta kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kajian ini merekomendasikan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan agribisnis komoditi unggulan di tiap pulau yang didukung subsidi input produksi, fasilitasi akses terhadap pasar serta revitalisasi atau penguatan kapasitas kelembagaan kelompok produktif di pedesaan.</p> <p>Salah satu fokus rencana PSE-KA adalah di bidang pertanian seperti pendampingan kepada para petani dalam pembuatan pupuk kompos, analisis hama dan pestisida, pelatihan pertanian sayur-mayur. Penelitian yang dibuat Girsang menarik karena merekomendasikan</p>

		<p>untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan agribisnis komoditi unggulan di tiap pulau yang didukung subsidi input produksi, fasilitasi akses terhadap pasar serta revitalisasi atau penguatan kapasitas kelembagaan kelompok produktif di pedesaan namun aksi nyata dari rekomendasi itu belum terwujud sementara kegiatan dari PSE-KA sudah dirancang dan sementara berjalan.</p>
9.	<p>Zakiah, dkk (2107), <i>"Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani"</i></p>	<p>Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pembangunan perekonomian desa yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Kecamatan Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ditinjau dalam perspektif ekonomi mikro Islam. Hasil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti kesehatan dan sandang pangan. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Program Pembangunan Desa memahami bagaimana cara melaksanakan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Evaluasi kinerja Program Pembangunan Perdesaan juga bisa dilakukan melalui kajian evaluatif terhadap proses hasil kerja pelaksanaan kegiatan program Pembangunan Desa.</p> <p>Penelitian ini hanya mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa sementara tidak menganalisis bagaimana strategi dan penguatan modal sosial yang digunakan dalam program pembangunan desa untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian terhadap PSE-KA ingin mencari tahu bagaimana strategi PSE, kontribusi PSE-KA dan faktor-faktor pendorong yang digunakan PSE dalam mengentaskan kemiskinan.</p>

2.3 KERANGKA KONSEP PENELITIAN.

Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, disingkat KPSE, adalah sebuah badan yang dibentuk para uskup untuk tingkat nasional atau yang dibentuk oleh seorang uskup untuk tingkat keuskupan dengan tugas pokok

memperhatikan dan memajukan gerakan kerasulan sosial ekonomi dalam Gereja. Pada tingkat Konferensi Waligereja Indonesia disebut Komisi PSE KWI. Di tingkat Keuskupan disebut komisi PSE Keuskupan, sedangkan di tingkat Paroki disebut Seksi Sosial Paroki/SSP.

Agar dapat melaksanakan mandat secara efektif, Program kerja PPSE-KA dilaksanakan berdasarkan Struktur Organisasi:

Direktur adalah pimpinan tertinggi pada PPSE-KA yang bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kerjasama program PPSE-KA dengan mitra kerja.

TIM SP adalah sebuah tim yang terdiri para Koordinator Program dan Sekretaris Komisi PSE dan Staf senior yang bertugas dalam perumusan kerangka kerja/master plan PPSE-KA. Tim SP bersifat konsultatif dan diberi surat tugas oleh direktur.

Koordinator Program adalah staf yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh program/ proyek kerjasama dengan lembaga mitra mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengembangan program, pengendalian dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, koordinator Program bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan menjalin komunikasi dan memiliki garis koordinasi dengan Program Manejer lembaga mitra.

Supervisor adalah staf yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir pelaksanaan program di lapangan dan melaporkan kepada Koordinator Program.

Pendamping Lapangan adalah staf pelaksanaan program/proyek di lapangan. Dalam menjalankan tugasnya PL bertanggungjawab kepada Supervisor Program, begitu juga sebaliknya Supervisor memberikan supervisi kepada PL.

Staf Monitoring Dan Evaluasi adalah staf yang bertanggungjawab atas berjalannya mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala di PPSE-KA serta menjaga arah strategis program. Staf Monitoring dan Evaluasi bertanggungjawab langsung kepada Koordinator Program.

Divisi Keuangan Dan Admin adalah divisi yang bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan keuangan dan administrasi PPSE-KA baik kepada internal lembaga maupun eksternal. Divisi KA dipimpin oleh seorang kepala divisi. Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Direktur terkait urusan keuangan dan admin internal lembaga dan bertanggungjawab kepada Koordinator program terkait dengan keuangan dan administrasi lembaga mitra.

Staf Keuangan adalah staf yang bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi keuangan, system pencatatan dan penyusunan laporan keuangan program/proyek mitra kerja PPSE-KA. Seluruh transaksi keuangan harus mengacu pada anggaran yang ditetapkan dan proses pencairan dana mengacu kepada prosedur lembaga mitra yang telah ditetapkan bersama. Staf keuangan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada divisi keuangan dan admin.

Staf Administrasi adalah staf yang bertanggungjawab pada pekerjaan administrasi kantor, personalia, pengadaan barang dan jasa, operasional terhadap pengelolaan dana kas kecil mulai dari pengeluaran

dan penerima kas kecil, pencatatan transaksi kas kecil dan administrasi keuangan kas kecil. Staf administrasi bertanggungjawab kepada Divisi Keuangan dan Admin dalam fungsinya sebagai pelaksana administrasi kantor. Sedangkan yang terkait dengan pengelolaan dana kas kecil bertanggungjawab kepada Divisi KA.

Kerasulan Pengembangan Sosial Ekonomi dalam Gereja Katolik dilaksanakan oleh setiap Gereja Paroki yang ada dalam Keuskupan Atambua. Setiap Gereja Paroki memiliki struktur organisasi PSE sendiri dalam melaksanakan visi, misi, mandat dan nilai yang telah dirumuskan.

Mandat: Bekerja untuk Mengatasi Dehumanisasi Kaum Marginal Akibat Kemiskinan dan Kekerasan HAM.

Visi: Mewujudkan masyarakat marginal yang berdaya untuk memperjuangkan hak asasinya melalui pelayanan dan persekutuan yang tumbuh dari semangat persaudaran.

Misi: Dalam upaya mewujudkan visi, PPSE-KA mengembangkan misi: 1) Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Marginal Melalui Pendampingan Dan Pengorganisasian Secara Intensif. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat marginal dengan semangat pengabdian, kejujuran dan ketulusan dalam terang Roh Kudus. 3) Mendorong regulasi untuk pemenuhan hak kaum marginal.

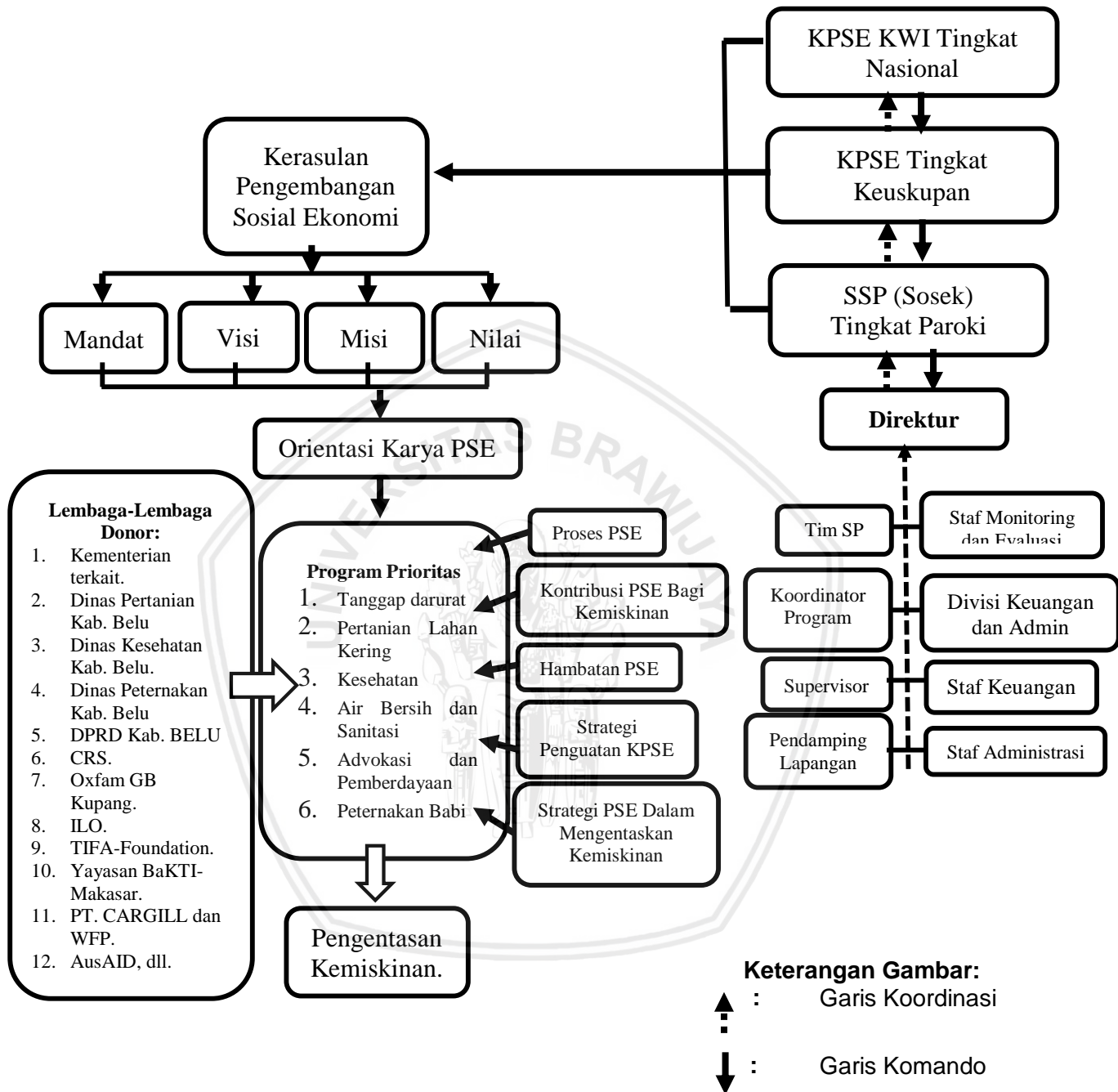
Nilai-nilai (value) yang dimiliki Lembaga dalam mengaktualisasi peran dan fungsinya: 1) Non Profit: Tidak mencari keuntungan/laba material selama menjalankan Program / kegiatan. 2) Solidaritas: Peduli terhadap masyarakat-komunitas-perempuan dan anak yang memerlukan pertolongan, demi kemanusiaan. 3) Non diskriminasi: Tidak membeda-

bedakan orang satu sama lain karena Perbedaan kelas sosial, kasta, suku, ras, agama dan golongan. 4) Kolektivitas: kebersamaan, membangun nilai-nilai hidup dan cita-cita bersama Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan Pribadi. 5) Transparansi dan akuntabilitas: Jujur, Terbuka dan bertanggungjawab dalam mengelola lembaga. 6) Kesetaraan: Semua manusia sama kedudukannya dan tidak boleh dibedakan dengan alasan apapun. 7) Independensi: Tidak tergantung atau terikat pada pemerintah; lembaga donor; atau individu. 8) Non partisan: Tidak mendukung atau terikat kedalam golongan politik tertentu. 9) Pro Keadilan/HAM: Berjuang membela keadilan dan kebenaran hak Asasi kaum marginal. 10) Responsive Gender: Keberpihakan terhadap hak-hak kaum perempuan, anak dan kaum marginal.

Program Prioritas yang menjadi orientasi karya PSE dalam 5 tahun ke depan (2014-2019) akan menitik beratkan pekerjaannya pada lima program utama yaitu: 1) Tanggap darurat. 2) Pertanian Lahan Kering. 3) Kesehatan. 4) Air Bersih dan Sanitasi. 5) Advokasi dan Pemberdayaan. 6) Peternakan. Untuk menyukseskan program-program prioritas ini PSE-KA menjalin atau telah membangun kemitraan dengan berbagai lembaga donor diantaranya: Dinas Pertanian Kab. Belu, Dinas Kesehatan Kab. Belu, Dinas Peternakan Kab. Belu, DPRD Kab. BELU, CRS, Oxfam GB Kupang, ILO, TIFA-Foundation, Yayasan BaKTI- Makasar, PT. CARGILL dan WFP, AusAID, MISEREOR, ACF, KARINA, SNV, PERDAKHI dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaan proses PSE terutama seluruh program tersebut selalu saja ada hambatan-hambatan karena itu perlu sekali dilakukan penguatan dalam kelembagaan PSE sehingga strategi

yang terus dievaluasi dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan di seluruh wilayah Keuskupan Atambua.





Gambar 2.2 Skema Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena metode ini merupakan metode yang sangat strategis dan cocok bila pernyataan dari suatu penelitian berkaitan dengan rumusan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”. Selain metode studi kasus, masih ada metode lain seperti eksperimen, survei, historis, dan analisis informasi dokumenter tetapi peneliti lebih tertarik kepada metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena sangat membantu peneliti dalam menganalisis kasus yang akan diteliti dan dalam mendefinisikan kasus yang akan diselidiki. Studi kasus juga dapat menentukan bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar relevan dan apa yang seharusnya dikerjakan sehubungan dengan data yang sudah dikumpulkan. (Yin, 2015)

Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno dianggap berhasil menyelenggarakan kegiatan-kegiatan prioritas PSE-KA sehingga peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih dalam kiat-kiat apa yang digunakan oleh Seksi Sosial Paroki/SSP St. Petrus Tukuneno dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan. Peneliti telah mengidentifikasi program-program pengentasan kemiskinan yang ada di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno dan program-program tersebut telah membantu mengatasi permasalahan kemiskinan. Dari penelitian ini, peneliti telah mendapat pengetahuan lebih lanjut dan mendalam secara ilmiah tentang strategi

penguatan; efisiensi struktur, gaya kepemimpinan, pelayanan, fungsi dan peran/kontribusi, kemampuan manajemen/tata kelola, sumber daya, kinerja, modal sosial/jaringan kerja sama dengan pihak luar, legalitas hukum, keuangan, aset-aset (sarana-prasarana) dan program-program prioritas pengentasan kemiskinan.

3.2. TEKNIK PENETAPAN LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

Lokasi pelaksanaan penelitian ini di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno Keuskupan Atambua-Kabupaten Belu-NTT. Teknik penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* yakni dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian dan dari hasil penelitian telah menjawab permasalahan penelitian.

Alasan pemilihan lokasi ini, karena Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno dianggap berhasil dalam menyukkseskan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang direncanakan oleh SSP St. Petrus Tukuneno. Di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno bermayoritas penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan swasta dengan jumlah warga yang berpendidikan tinggi masih sedikit sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah orang miskin di wilayah Gereja Paroki ini masih banyak atau mendominasi warga yang sejahtera. Wilayah Gereja Paroki ini terletak di pinggiran Kota Atambua sehingga karakteristik kemiskinan di wilayah Gereja ini lebih pada karakteristik kemiskinan perkotaan. Ciri-ciri kemiskinan ini lebih pada keterbatasan akses atau disebut kemiskinan struktural di mana warga miskin di kota dikatakan miskin karena akses (lapangan pekerjaan yang terbatas, pendidikan rendah, kurang mampu

mengakses layanan kesehatan dan daya beli lemah) terbatasnya akses pada sektor partisipasi politik, kekuatan politik, pendidikan dan kesehatan sehingga mereka terdampar pada posisi yang terendah dalam struktur sosial masyarakat.

Situs penelitian ini telah diangkat untuk menjadi bahan kajian ilmiah karena peneliti melihat bahwa umat yang kurang mampu secara ekonomi mendominasi umat yang dianggap sejahtera. Pemberdayaan telah dilakukan melalui program prioritas dari PSE-KA sehingga umat secara perlahan-lahan dapat keluar dari permasalahan ekonomi dan secara bertahap mampu hidup mandiri. Gereja melalui karya kerasulan PSE ini telah “menyelamatkan” kaum miskin dan papah dari ketidakberdayaan sosial dan terbukti mereka dapat menikmati keadilan sosial sama seperti umat lainnya.

3.3. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian dimaksud untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga tidak terjebak dalam ruang lingkup yang sifatnya umum dan luas. Agar penelitian ini tidak membias, maka peneliti membatasi masalah atau dalam penelitian kualitatif disebut dengan batasan masalah. (Sugiyono: 2017: 207)

Penelitian ini berfokus pada Penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) seperti; efisiensi struktur, gaya kepemimpinan, pelayanan, fungsi dan peran/kontribusi, kemampuan manajemen/tata kelola, sumber daya, kinerja, modal sosial, jaringan kerja sama dengan pihak luar, legalitas hukum, keuangan, aset-aset (sarana-prasarana) dan program-program

prioritas pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh Komisi PSE-KA, dimana melalui program-program itu telah mampu membantu mengatasi permasalahan kemiskinan. Program-program itu seperti: Tanggap Darurat, Pertanian Lahan Kering, Kesehatan, Air Bersih Dan Sanitasi, Advokasi dan Pemberdayaan dan Peternakan Babi.

Berikut ini tabel beberapa indikator fokus penelitian yang saling berhubungan yang telah digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dan telah menjawab permasalahan penelitian.

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

No.	Fokus	Definisi Fokus	Definisi Operasional	Instrumen
1.	Penguatan PSE	Strategi Penguatan; Efisiensi Struktur, Kepemimpinan, Pelayanan, Fungsi dan Peran/Kontribusi, Kemampuan Menajemen/Tata Kelola, Sumber Daya, Kinerja, Modal Sosial, Jaringan Kerja Sama, Legalitas Hukum, Keuangan, Aset-Aset (Sarana-Prasarana) dan Program-Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan.	Untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan.	Dokumentasi, Wawancara dan Observasi Lapangan.
2.	Tanggap Darurat	Sasarannya adalah: 1) Melakukan komunikasi dengan pemerintah dan stakeholder dalam upaya pemenuhan hak-	Mendukung rasa kepedulian atau perhatian terhadap mereka yang menjadi korban akibat dampak bencana alam dan kekerasan politik.	Dokumentasi, Wawancara dan Observasi Lapangan.

		<p>hak korban bencana alam dan politik.</p> <p>2) Pemenuhan kebutuhan sembako, air bersih, obat-obatan, salter dan MCK</p> <p>3) Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan bencana (perempuan, anak dan kaum marginal)</p>		
3.	Pertanian Lahan Kering	<p>Sasarannya adalah:</p> <p>1) Meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan pertanian kering</p> <p>2) Masyarakat mampu menerapkan teknologi konservasi tanah dan air. Pola pendekatan ini perlu melibatkan partisipasi pemerintah dalam hal ini dinas teknis terkait teknologi pertanian, konservasi tanah dan air</p>	Mendukung produksi pertanian dan kerja para petani dalam memanfaatkan lahan tidur agar dapat berproduksi.	Dokumentasi, Wawancara dan Observasi Lapangan.

Lanjutan Tabel 3.1

No.	Fokus	Definisi Fokus	Definisi Operasional	Instrumen
-----	-------	----------------	----------------------	-----------

4.	Kesehatan	<p>Sasarannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendampingan rutin kepada masyarakat terkait upaya penataan lingkungan dan halaman yang bersih serta tertata rapih b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan status rumah layak huni guna memberikan rasa nyaman bagi keluarga c. Melakukan kampanye sanitasi total. d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memanfaatkan pangan lokal yang bergizi sebagai pangan keluarga e. Membangun jejaring dengan stakeholder dalam upaya menekan Angka kematian ibu dan anak. 	<p>Meningkatkan pola hidup bersih sehat masyarakat/umat dan Meningkatkan status gizi keluarga</p>	<p>Dokumentasi, Wawancara dan Observasi Lapangan.</p>
----	-----------	--	---	---

5.	Air Bersih Dan Sanitasi	<p>Sasarannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membentuk kelompok masyarakat pengguna air bersih 2) Mendekatkan akses air bersih kepada masyarakat. 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam memiliki MCK sehat. 	Meningkatkan dan mewujudkan Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk Hidup yang Lebih Baik.	Dokumentasi, Wawancara dan Observasi Lapangan.
----	-------------------------	---	---	--

Lanjutan Tabel 3.1

No.	Fokus	Definisi Fokus	Definisi Operasional	Instrumen
6.	Advokasi dan Pemberdayaan	<p>Sasarannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan, anak dan masyarakat terpinggirkan. 2) Adanya perubahan perilaku para pengambil kebijakan terhadap hak-hak perempuan, anak dan masyarakat terpinggirkan. 3) Adanya mekanisme penanganan 	Meningkatkan upaya pemenuhan tanggungjawab atas penegakkan hak-hak kaum perempuan, anak dan masyarakat terpinggirkan.	Dokumentasi, Wawancara dan Observasi Lapangan.

		kasus atas pelanggaran hak-hak perempuan, anak dan masyarakat terpinggirkan.		
7.	Peternakan Babi	Sasarannya adalah: a) Meningkatkan sumber daya dan keterampilan masyarakat dalam bidang peternakan. b) Mengorganisir masyarakat untuk beternak. c) Meningkatkan keterampilan masyarakat untuk pengelolaan pakan ternak. d) Mengolah limbah ternak untuk menjadi pupuk organik. e) Mendekatkan akses pasar. f) Peningkatan modal usaha melalui LKM dan perbankan.	Mewujudkan tanah Timor sebagai lumbung ternak.	Dokumentasi, Wawancara dan Observasi Lapangan.

3.4 SUMBER DATA

Peneliti telah memperoleh sumber data untuk menganalisis penelitian ini yaitu dengan mewawancarai beberapa informan kunci serta mengambil gambar/foto-foto kegiatan pemberdayaan.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik/prosedur *purposive sampling* dimana informan telah ditentukan sebelum peneliti turun ke lapangan. Informan yang telah diwawancarai adalah

informan utama dan informan pendukung dan informan telah menjawab 5 (lima) pertanyaan rumusan masalah penelitian.

Pengambilan informan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga telah menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri khusus yang dimaksud adalah informan yang dianggap memiliki pengaruh dan mengetahui segala proses PSE sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Informan yang berhasil diwawancarai adalah Para Staf pengelola/Pengurus PSE-KA, Pastor Paroki dan Pastor Pembantu Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno, Para Ketua Lingkungan KUB, OMK dan umat Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Uskup Atambua tidak berhasil dijumpai namun peneliti berhasil mewawancarai salah satu pastor yang menjabat sebagai sekretaris Uskup. Uskup Atambua dipilih karena kapasitasnya sebagai gembala umat yang memimpin seluruh umat katolik di wilayah pastoral Keuskupan Atambua sehingga perlu dilakukannya koordinasi dengan Uskup sebelum kegiatan-kegiatan prioritas PSE dilaksanakan. Para informan ini merupakan orang-orang yang dapat diandalkan dalam memberikan data karena memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing terkait tugas dan perannya dalam keorganisasian PSE-KA. Peristiwa yang diobservasi adalah mengikuti setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh SSP St. Petrus Tukuneno.

Tabel 3.2 Informan, Kapasitas dan Informasi yang diperoleh.

Infoman dan Kapasitas infoman	Informasi yang diperoleh
1. Rm. HM, Pr / Sekretaris Uskup (informan utama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh OMK-OMK di masing-masing paroki. 2. Alasan Mengapa Seksi Sosek di Gereja-Gereja Paroki tidak menjalankan tugasnya. 3. Seksi SSP yang paling aktif atau yang paling hidup di Keuskupan Atambua. 4. Proses PSE yang terjadi di paroki-paroki. 5. Tindak lanjut dari KPSE terkait program-program yang berhenti masa kontraknya. 6. Keterlibatan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dalam menanggapi dan melanjutkan program yang sudah pernah dibuat PPSE. 7. Pelibatan kelompok sasaran dalam rapat evaluasi internal Komisi PSE.
2. Rm. UH, Pr / Pastor Paroki Tukuneno (Informan utama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses PSE yang dijalankan di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno Atambua. 2. Dana untuk melancarkan kegiatan pemberdayaan. 3. Kontribusi PSE terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah Gereja Paroki Tukuneno. 4. Strategi penguatan kelembagaan PSE sehingga mampu meyakinkan masyarakat akar rumput. 5. Hambatan yang dihadapi oleh PSE dalam melaksanakan program prioritas PSE.
3. Ibu IT/Staf/ Bendahara KPSE-KA (Informan Pendukung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengelolaan keuangan dalam KPSE.
4. Bapak AS / Ketua DPP Paroki St. Petrus Tukuneno merangkap Ketua Lingkungan Tini (Informan Pendukung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran DPP terhadap perkembangan usaha OMK. 2. Bantuan dari para orang tua terhadap perkembangan usaha OMK. 3. Keterlibatan umat atau pengurus DPP dalam tugas pastoral pastor paroki.

Lanjutan Tabel 3.2

Infoman dan Kapasitas infoman	Informasi yang diperoleh
5. Nona VT/Ketua OKM Tukuneno (Informan Pendukung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prospek Rumah Estribi dan pengunjung Rumah Estribi. 2. Manfaat dari pendirian Rumah Estribi.

6. Rm. AA, Pr/Pastor Moderator OMK Tukuneno (Informan Utama)	1. Jenis kegiatan pemberdayaan yang dibuat oleh OMK Tukuneno.
7. Nona MGRT/Ketua Kelompok Peternakan Babi (Informan Pendukung)	1. Dampak usaha peternakan babi 2. Hambatan dalam kelompok peternakan babi

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data

No.	Teknik	Siapa/Apa/Bagaimana?
1.	Dokumentasi Dokumentasi dilakukan untuk menambah bukti dari sumber-sumber yang lain dan mendukung informasi dari sumber lain.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dokumen-dokumen administratif ❖ Foto-foto. ❖ Video kegiatan pemberdayaan. ❖ Data-data program prioritas pengentasan kemiskinan PSE-KA.
2.	Rekaman Arsip	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rekaman layanan di sekretariat kantor PSE-KA. ❖ Rekaman keorganisasian seperti bagan dan anggaran. ❖ Peta dan bagan karakteristik geografis. ❖ Data survei seperti rekaman data sensus.
3.	Wawancara Mendalam Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara studi kasus bertipe <i>open-ended</i> dimana peneliti dapat bertanya tentang fakta-fakta sebuah peristiwa dan	<p>Informan yang dipilih adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sekretaris Uskup Atambua. ❖ Para Staf/Pengurus PSE-KA ❖ Pastor Paroki dan Pastor Pembantu. ❖ Para Ketua Lingkungan KUB. ❖ OMK. ❖ Umat yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.

	meminta responden menyetujui pendapatnya terhadap peristiwa.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Daftar Rencana Pertanyaan Wawancara</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kegiatan-kegiatan praktis apa yang sudah dilakukan PSE-KA di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno? Bagaimana hasilnya?</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Seberapa efektifkah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PSE-KA dalam menuntaskan masalah kemiskinan?</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bagaimana strategi yang dipakai PSE-KA dalam menarik minat umat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan?</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bagaimana respon umat secara nyata dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan PSE-KA?</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Bagaimana jaringan kerja sama dengan pihak-pihak luar dalam mendukung karya kerasulan PSE-KA?</td> </tr> </tbody> </table>	Daftar Rencana Pertanyaan Wawancara		No.	Pertanyaan	1.	Kegiatan-kegiatan praktis apa yang sudah dilakukan PSE-KA di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno? Bagaimana hasilnya?	2.	Seberapa efektifkah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PSE-KA dalam menuntaskan masalah kemiskinan?	3.	Bagaimana strategi yang dipakai PSE-KA dalam menarik minat umat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan?	4.	Bagaimana respon umat secara nyata dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan PSE-KA?	5.	Bagaimana jaringan kerja sama dengan pihak-pihak luar dalam mendukung karya kerasulan PSE-KA?
Daftar Rencana Pertanyaan Wawancara																
No.	Pertanyaan															
1.	Kegiatan-kegiatan praktis apa yang sudah dilakukan PSE-KA di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno? Bagaimana hasilnya?															
2.	Seberapa efektifkah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PSE-KA dalam menuntaskan masalah kemiskinan?															
3.	Bagaimana strategi yang dipakai PSE-KA dalam menarik minat umat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan?															
4.	Bagaimana respon umat secara nyata dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan PSE-KA?															
5.	Bagaimana jaringan kerja sama dengan pihak-pihak luar dalam mendukung karya kerasulan PSE-KA?															
4.	Observasi Langsung Diharapkan dapat menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks penelitian.	Mengikuti secara langsung kegiatan pemberdayaan di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno. Pengamatan juga dilakukan dengan cara mengidentifikasi program-program pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh PSE-KA untuk melengkapi data primer dan data sekunder penelitian.														
5.	Focus Group Discussion (FGD)	Dilakukan dengan: ❖ Para Pengurus PSE-KA														

	<p>Untuk menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pastor Paroki dan Pastor Pembantu. ❖ Para Ketua Lingkungan KUB. ❖ OMK. ❖ Umat.
--	---	---

3.6 Uji Keabsahan Data

Agar penelitian ini dapat terjamin nilai akuratnya, maka peneliti melakukan keabsahan data karena apabila terdapat kesalahan data maka akan berakibat pula pada kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dari setiap penelitian adalah untuk terwujudnya suatu kajian ilmu pengetahuan yang benar-benar valid, beretika dan tepat sasaran (Bachri, 2010).

Dalam penelitian ini, penulis menguji keabsahan data dengan metode yang ditawarkan oleh Moleong yang terdiri dari:

3.6.1. Credibility (Derajat Kepercayaan)

Dikatakan sebagai uji kredibilitas karena pengujian tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain diselesaikan dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan turun kembali ke lapangan, melakukan observasi, wawancara dengan narasumber yang sudah ditemui dan juga yang baru

sehingga hubungan antara peneliti dengan narasumber semakin dekat sehingga peluang untuk terbukanya informasi semakin besar.

Lamanya waktu pengamatan yang dilakukan berlangsung selama penelitian yaitu sebanyak 21 hari, mulai dari awal Desember 2019, peneliti sudah memastikan bahwa keluasan dan kepastian data yang diperoleh dari lapangan sudah dapat menjawab rumusan permasalahan sehingga peneliti memutuskan mengakhiri penelitian ini.

Peneliti ingin agar kedalaman objek kajian yang ingin diteliti harus sampai pada titik makna. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh itu telah dicek kembali ke lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dan setelah itu peneliti mengakhiri waktu perpanjangan pengamatan.

b. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian.

Meningkatkan ketekunan dalam penelitian dilakukan dengan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan karena dengan cara yang demikian peneliti telah menemukan data yang secara pasti dan sistematis.

Sebagai bekal bagi peneliti dalam meningkatkan ketekunan maka peneliti telah membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi penelitian yang terkait dengan temuan yang diteliti karena dengan membaca, wawasan dari peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan dan untuk bisa memastikan apakah data itu benar atau dapat dipercaya atau sebaliknya.

c. Trianggulasi

Trianggulasi dalam penelitian ini adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik (cara) dan waktu. Dengan cara yang demikian maka ada tiga model trianggulasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Trianggulasi Sumber

Tujuannya adalah untuk mengecek sumber dan menguji kredibilitas sumber data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tentang strategi penguatan; efisiensi struktur, gaya kepemimpinan, pelayanan, fungsi dan peran/kontribusi, kemampuan manajemen/tata kelola, sumber daya, kinerja, modal sosial, jaringan kerja sama, legalitas hukum, keuangan, aset-aset (sarana-prasarana) dan program prioritas pengentasan kemiskinan. Sumber data yang telah diperoleh dideskripsikan dan dikategorikan mana yang memiliki pandangan yang sama dan mana yang berbeda, lalu kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya diminta kesepakatan (*member-cheek*) dari sumber data yang diperoleh.

2. Trianggulasi Teknik.

Dalam trianggulasi teknik peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan mengecek data dari sumber yang

sama yaitu dari para para Staf/Pengurus PSE-KA, Pastor Paroki dan Pastor Pembantu Gereja Paroki Tukuneno, para ketua lingkungan kelompok umat basis (KUB), OMK, anggota umat yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tetapi dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara kemudian dicek kembali dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Data yang tidak relevan atau data yang berbeda akan didiskusikan lebih lanjut dengan narasumber yang sama ataupun yang berbeda untuk memastikan data mana yang dianggap paling benar atau memang datanya benar hanya persepsi yang berbeda-beda.

3. Analisis Kasus Negatif

Dalam pengertian ini peneliti telah mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan dengan maksud agar dapat mengetahui secara pasti bahwa sumber data yang sudah diperoleh benar-benar terpercaya dan terukur. Dalam temuan peneliti, memang benar ada data yang lebih akurat dari data-data sebelumnya yang telah dikumpulkan dan peneliti telah merubah hasil penelitian ini. Seperti laporan-laporan program prioritas dan pemberdayaan yang dianggap cocok dan sesuai dengan tema penelitianlah yang diambil demikian sebaliknya.

d. **Menggunakan Bahan Referensi.**

Peneliti telah menggunakan bahan referensi untuk mendukung dan membuktikan bahwa data yang diperoleh dari narasumber benar-benar valid atau sesuai dengan kondisi real. Sebagai contoh peneliti tidak hanya melakukan wawancara saja tetapi juga dengan menyertakan bukti rekaman wawancara juga disertakan dengan data informasi berupa foto-foto.

e. **Mengadakan *Member-Cheek*.**

Member-cheek yang dimaksud adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data (para staf KPSE, umat sasaran). Tujuannya adalah untuk meneliti seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Data yang diperoleh telah disepakati oleh pemberi data dan data tersebut dinyatakan valid sehingga keabsahannya dipercaya.

Peneliti telah melakukan diskusi lebih lanjut dengan narasumber untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih akurat dari data-data yang tidak dipahami oleh peneliti. Pelaksanaan *member-cheek* dilakukan setelah satu minggu pengumpulan data dan sudah sampai pada titik kesimpulan kemudian kesimpulan yang diperoleh disamakan atau didiskusikan dengan pemberi sumber data, baik itu dilakukan secara individu atau secara kelompok dalam bentuk diskusi.

3.6.2. *Transferability* (Derajat Keteralihan)

Pengujian *transferability* adalah sebuah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Peneliti mengharapkan naturalistik nilai transfer pada penelitian ini terutama hasil penelitian ini dapat digunakan dalam konteks atau situasi sosial lain sehingga dapat memperkaya penelitian lain terutama bagi penelitian pemberdayaan masyarakat lainnya. Peneliti tidak menjamin validitas eksternal penelitian ini. Oleh karena itu, agar semua orang dapat memahami hasil penelitian kualitatif ini, maka peneliti telah membuat uraian penjelasannya dengan rinci, jelas dan sistematis berdasarkan masukan dari para pembimbing dan penguji penelitian ini sehingga dapat dipercaya dan bisa diterapkan hasil penelitian ini ke dalam situasi kehidupan masyarakat. Bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini diharapkan menjadi jelas dan dapat memutuskan untuk mengaplikasikan hasil penelitian ini ke tempat lain atau sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya. Bila pembaca laporan penelitian ini memahami dan memperoleh gambaran yang sedemikian jelas maka semua hasil penelitian ini bisa dikatakan (*transferability*) atau memenuhi standar transferabilitas (Sanapiah, 1990).

3.6.3. *Dependability* (Derajat Ketergantungan)

Dalam penelitian kualitatif pengujian *dependability* disebut dengan reliabilitas. Pengujian *dependability* adalah apabila proses penelitian tersebut diulangi atau direplikasi. Dalam penelitian kualitatif uji *dependability* dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering kali terjadi peneliti tidak turun ke lapangan untuk

melakukan penelitian, namun bisa memberikan data. Penelitian ini perlu diuji *dependability*, kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada maka peneliti tersebut tidak *reliabel* atau *dependable*. Untuk itu, proses penelitian ini telah dilakukan proses *dependability* dengan cara berdiskusi dengan auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian.

Peneliti telah menunjukkan keseriusan dalam penelitian ini dengan cara menentukan masalah, turun ke lokasi penelitian, menemukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan sehingga aktifitas penelitian ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan oleh karena itu aspek dependabilitasnya patut dipercaya (Sanapiah, 1990).

3.6.4. Confirmability (Derajat Kepastian)

Penelitian *confirmability* dalam sebuah penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Hasil penelitian dapat dikatakan sebagai objektif apabila penelitiannya sudah mendapat kesepakatan dari banyak orang atau telah diuji dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para pembimbing dan penguji dan telah mendapat banyak masukan/kritikan untuk perbaikannya. Dalam penelitian kualitatif uji objektivitas (*konfirmability*) hampir sama dengan uji *dependability*, oleh karena itu dapat dilakukan secara bersamaan.

a. PENGOLAHAN DATA

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian (*coding*), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. (Mudjia Rahardjo, 2017)

b. ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berupa uraian tentang penguatan Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PSE-KA) dan penjelasan tentang program-program prioritas pengentasan kemiskinan. Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah.

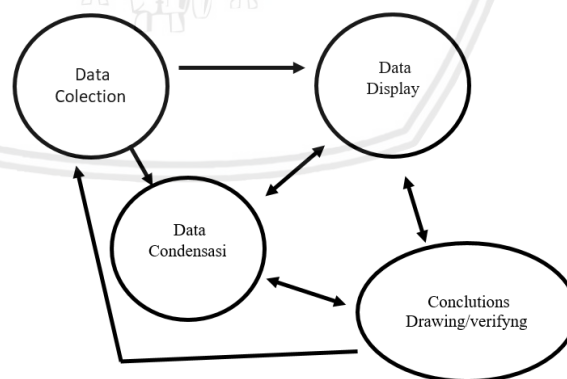
1. Kondensasi Data

Sebelumnya, dalam analisis data kualitatif, sering terdengar istilah *Reduksi Data*. Analisis data jenis reduksi inilah yang kemudian dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana menjadi Kondensasi (pengembunan) data.

Kondensasi data terjadi secara berkesinambungan dalam penelitian selama berorientasi pada beberapa proyek/penelitian kualitatif. Bahkan sebelum data sebenarnya dikumpulkan, antisipasi kondensasi data sebagai seorang peneliti secara tidak sadar sering menarik sebuah kesimpulan

dapat berupa kerangka kerja konseptual, kasus, pertanyaan penelitian dan pengumpulan data yang dianggap mendekati untuk dipilih. Sebagai hasil pengumpulan data, lebih lanjut kondensasi data terjadi: menulis ringkasan, pengkodean, mengembangkan kategor dan menghasilkan kategori.

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan materi (temuan) empirik lainnya. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya membias menjadi lebih padat/ringkak. Letak perbedaan antara reduksi dengan kondensasi terletak pada cara penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijarah tanpa harus memilah (mengurangi) data.



Gambar 3.1 Analisis data jenis reduksi menjadi Kondensasi (pengembunan) data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan kondensasi proses analisis data dalam penelitian kualitatif tentu akan lebih mengakomodir data secara menyeluruh tanpa harus mengurangi temuan lapangan yang diperoleh selama penelitian (proses penjarangan data) berlangsung.

<https://kacamata pustaka.wordpress.com/2018/04/24/kondensasi-dalam-analisis-data-penelitian-kualitatif/> [21/11/2018]



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. PROFIL KEUSKUPAN ATAMBUA

Tahun 1998, Uskup Atambua bersama tim Pusat Pastoral mulai gencar melakukan Program Dialog Gereja Berdikari. Tujuannya adalah mendorong paroki-paroki untuk menjadi paroki yang berdikari atau mandiri dalam tiga hal yaitu: *Pertama*, kemandirian dalam hal iman Kristiani saja (artinya tidak ada Katolik embel-embel lain). *Kedua*, kemandirian dalam hal ketenagaan pastoral baik tertahbis maupun non-tertahbis; dan *Ketiga*, kemandirian dalam hal finansial atau keuangan dan harta benda.

Tahun 2000 Gereja Katolik Indonesia menyelenggarakan SAGKI. Pada SAGKI 2000 ini para Uskup Indonesia bersama imam dan awam membahas tentang Pemberdayaan Komunitas Umat Basis. Sepulangnya dari SAGKI, KA gencar dengan kegiatan pastoral pemberdayaan KUB dengan tekanan pada Komunitas Basis bukan hanya sebagai Kelompok Doa tetapi terutama sebagai Kelompok Kehidupan. Banyak kemajuan dalam bidang Pastoral, Kitab Buci dan Katekese juga dicapai pada masa ini.

Semakin bertambahnya jumlah paroki di KA mendorong Uskup dan dewannya untuk memikirkan perlunya pemekaran wilayah dekenat. Wacana pun mulai digulir hingga pada tahun 2005 Dekanat TTU yang meliputi satu Kabupaten dengan jumlah 20-an paroki dimekarkan menjadi dua dekenat, yakni Dekanat Kefamenanu dan Dekanat Mena. Dengan demikian KA memiliki empat dekenat yakni Dekanat Belu Utara dan

Dekenat Malaka di Kabupaten Belu serta Dekenat Kefamenanu dan Dekenat Mena di Kabupaten TTU. Satu peristiwa akbar lain tercatat yakni pada bulan November 2005, Gereja Indonesia menyelenggarakan SAGKI kedua dengan tema "Gereja yang mendengarkan". Usai SAGKI 2005, tepatnya dua tahun kemudian terjadilah pergantian estafet kegemalaan di KA. Pada 21 September 2007 merupakan momentum bersejarah karena terjadi peristiwa pentahbisan Uskup Atambua yang baru dan sekaligus terjadi estafet kepemimpinan dari Mgr. Anton Pain Ratu, SVD (1984-2007) kepada penggantinya Mgr. Dr. Dominikus Saku, seorang imam Projo KA.

1. Masa Gereja Mandiri

a) Gereja dengan Pastoral Fokus (2008-2013)

Setelah pengalihan estafet kegemalaan Gereja dari Mgr. Anton Pain Ratu, SVD kepada Mgr. Dominikus Saku, Pr terjadilah era baru dalam karya pastoral KA. Pada 23-29 November 2008 bertempat di TOR Lo'o Damian, Emaus, Uskup Atambua yang baru menyelenggarakan Musyawarah Pastoral (Muspas) KA VI atau Muspas I pada masa kepemimpinannya. Muspas ini dihadiri oleh 212 tokoh umat terdiri dari para imam projo KA, para imam biarawan yang bekerja di KA, para utusan kongregasi religius, organisasi Gerejawi, OMK dan Dewan Pastoral Keuskupan hingga Paroki untuk merumuskan utusan isi, misi, strategi dan program pastoral 2009-2013 ini berhasil merumuskan visi: *"Umat Allah KA semakin beriman dalam konteks budayanya, berpendidikan kristiani, berbudaya kreatif, mandiri dan sejahtera dalam terang Sabda Allah"*.

Sedangkan misinya ada delapan butir yakni: *Satu*, Mengembangkan KUB menjadi komunitas doa dan kehidupan. *Dua*, Meningkatkan kecintaan umat terhadap Kitab Suci. *Tiga*, Meningkatkan penghayatan iman umat dalam konteks budaya. *Empat*, Meningkatkan kualitas pendidikan umat melalui segala jenjang dan bidang. *lima*, Meningkatkan taraf hidup umat lewat pengembangan ekonomi berbasis iman. *Enam*, Mengembangkan potensi OMK menjadi pribadi integral, mandiri dan profesional. *Tujuh*, Menjadikan keluarga-keluarga kristiani yang unggul dalam iman, ilmu dan moral. *Delapan*, Meningkatkan partisipasi umat dalam kehidupan sosial-politik.

Untuk mewujudkan visi dan misi pastoral tersebut, Uskup Atambua melakukan berbagai pembenahan, seperti pembenahan struktur dan sistem kerja Puspas KA, pembentukan Komdik KA, pembentukan Puslitbang KA, reposisi KOMKEP KA, optimalisasi Pastoral Keluarga dan Pengembangan Pastoral Kaum awam. Untuk menunjang karya pastoral ini Uskup mengangkat Dewan Pastoral KA periode 2009-2014 yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Komisi Pastoral. Banyak gebrakan yang dilakukan Mgr. Dominikus Saku untuk menggolkan pastoral fokus melalui program Pastoral berbasis data; *on going formation* para imam dan berbagai pertemuan pastores.

b) Gereja Berbasis Persekutuan (2014-2019)

Memasuki Quinquinéal II masa kepemimpinan Mgr. Dominikus Saku diselenggarakannya Muspas VII KA yang berlangsung di Aula Santo Dominikus, Emaus, pada 16-21 September 2013. Peristiwa

bersejarah ini diawali dengan perayaan puncak peringatan 100 tahun karya misi SVD di Indonesia khususnya di Pulau Timor.

Musyawarah Pastoral VII yang langsung diadakan pasca perayaan 100 Tahun SVD ini secara khusus merefleksikan motto tahbisan Uskup Atambua "*Vos Amici Mei Estis*" di bawah panduan para ahli dari berbagai disiplin ilmu Teologi, Kitab Suci, Filsafat, Pendidikan dan Sosiologi dari Seminari Tinggi Santo Mikhael Kupang. Selain itu pembacaan data pastoral dipandu Rm. Dr. Francis Purwanto, SCJ dari Yogyakarta hingga menghasilkan visi, misi dan strategi pastoral KA yang baru untuk periode 2014-2019, yakni:

Visi: Umat Allah KA semakin cerdas dan sejahtera dalam persahabatan Kristiani.

Misi: Meningkatkan mutu hidup umat melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan persekutuan hidup yang membebaskan.

Strategi Pastoral: Sosialisasi visi, misi, strategi dan program kerja pastoral KA; Pembenahan dan optimalisasi sistem dan struktur lembaga penyelenggara sekolah; Peningkatan pelaksanaan pastoral sekolah, Peningkatan pelaksanaan pastoral asrama; Peningkatan mutu tenaga pendidik; Peningkatan kompetensi agen pastoral; Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi keluarga: Peningkatan pendampingan keluarga yang berjenjang dan berkelanjutan; Pembenahan dan peningkatan peran Komisi Sosial Ekonomi dan Komisi Keluarga KA; Peningkatan etos kerja di berbagai bidang kehidupan; Pembenahan dan peningkatan tata kelola keuangan; Pembenahan dan peningkatan tata administrasi pelayanan sakramental; Pengembangan pastoral ekologis; Pemberdayaan dan

optimalisasi peran tokoh-tokoh adat Katolik; Pembenahan dan pengembangan ISKA; Pengembangan kerja sama kemitraan, Pengembangan pastoral data yang berkelanjutan; dan Peningkatan kapasitas pendampingan kelompok kategorial.

Program kerja yang dihasilkan adalah: (1) Peningkatan kemampuan, peran dan fungsi Lembaga Pendidikan Katolik (2) Pengembangan perencanaan di bidang pendidikan dan perekonomian, serta data dan sistem informasi KA; (3) Pengembangan sumber daya di bidang pendidikan dan perekonomian; (4) Pengembangan pendidikan dan usaha perekonomian sesuai permintaan pasar, dan (5) Peningkatan Pendampingan Keluarga Katolik. Fokus Pastoral: (1) Pastoral Pendidikan (2014-2016) dan (2) Pastoral Ekonomi (2017-2018).

2. Keadaan Umat

1) Keadaan Wilayah dan Sosial Ekonomi

Wilayah KA bergunung-gunung dan sebagian besar tidak subur. Keadaan tanah yang terdiri dari padang rumput yang luas cocok untuk usaha peternakan. Mata pencaharian yang paling utama ialah bertani.

Pada tahun 2018, umat Katolik KA berjumlah 577.240 jiwa (89, 63 %) dari seluruh penduduk berjumlah 644.013 orang, menempati tiga kabupaten yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten TTU. Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka luasnya 2.445, 60 Km² dan Kabupaten TTU luasnya 3.044,30 Km². Wilayah KA memiliki luas keseluruhan 5.489,90 Km². Data menunjukkan bahwa 89% umat KA hidup dari bertani. (Helo, 2017:39)

2) Tata Pemerintahan

Menurut data tahun 2014, KA meliputi tiga Kabupaten yakni Kabupaten Belu dengan wilayah administrasi terdiri dari 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kabupaten Malaka dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 127 Desa. Sedangkan Kabupaten TTU dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 24 Kecamatan dan 193 Desa/Kelurahan. Para pejabat pemerintahan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa di tiga Kabupaten ini sebagian besar beragama Katolik dan pada umumnya mempunyai hubungan baik dengan pimpinan Gereja Katolik KA. Dalam urusan-urusan keagamaan pun mereka ikut terlibat aktif. (Helo, 2017:39-40)

3) Agama-Agama

Menurut Badan Pusat Statistika tahun 2018, data pemeluk agama-agama dari 3 Kabupaten di wilayah KA dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Agama-Agama

Kabupaten	Agama					Total
	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Buddha	
Belu	9.564	194.177	15.137	430	44	219.352
Malaka	1.910	153.572	15.340	231	21	171.074
TTU	5.334	229.491	18.609	149	4	253.587
Total	16.808	577.240	49.086	810	69	644.013
%	2,60	89,63	7,62	0,12	0,01	99,98

(Sumber: BPS Kabupaten Belu, Malaka dan TTU Tahun 2018)

Umat Katolik KA pada tahun 2018, berdasarkan Sensus Pemerintah sebanyak: 577.240 jiwa, sedangkan berdasarkan data statistik KA 2018 jumlah umat Katolik sebanyak 530.396 jiwa. Itu berarti

jumlah umat Katolik berdasarkan sensus pemerintah lebih banyak 46.844 jiwa. Hal itu dapat dimengerti karena dalam sensus pemerintah semua orang dari Keluarga Katolik didaftarkan sebagai umat Katolik. Sedangkan dalam data statistik Keuskupan yang dicatat hanyalah mereka yang sudah dibaptis dan dicatat pada buku baptis paroki. (Helo, 2017:40-41)

4) Pendidikan Umat

Dalam hal urusan pendidikan formal di KA ditangani oleh empat Yayasan Pendidikan Katolik yaitu: 1. Yayasan As-Tanara di Kabupaten Belu, 2. Yayasan Liurai di Kabupaten Malaka, 3. Yayasan Snuna di Kabupaten TTU, 4. Yayasan Emaus di Lalian-Belu. Selain keempat yayasan milik Keuskupan itu, ada juga yayasan pendidikan yang dikelola oleh tarekat-tarekat religius seperti Yayasan Regina Angelorum (YASRA) milik Kongregasi SSpS; Yayasan Bentara Sabda Allah milik SVD Timor; Yayasan Franconi milik para Pastor OFMConv.; Yayasan Marsudirini milik OSF di Kefamenanu dan Yayasan Santa Angela milik para suster Ursulin Atambua. Di samping itu masih ada lagi yayasan-yayasan yang dikelola oleh para awam Katolik yang mengusahakan Sekolah-sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Tinggi serta pendidikan non formal lainnya. (Helo, 2017:41)

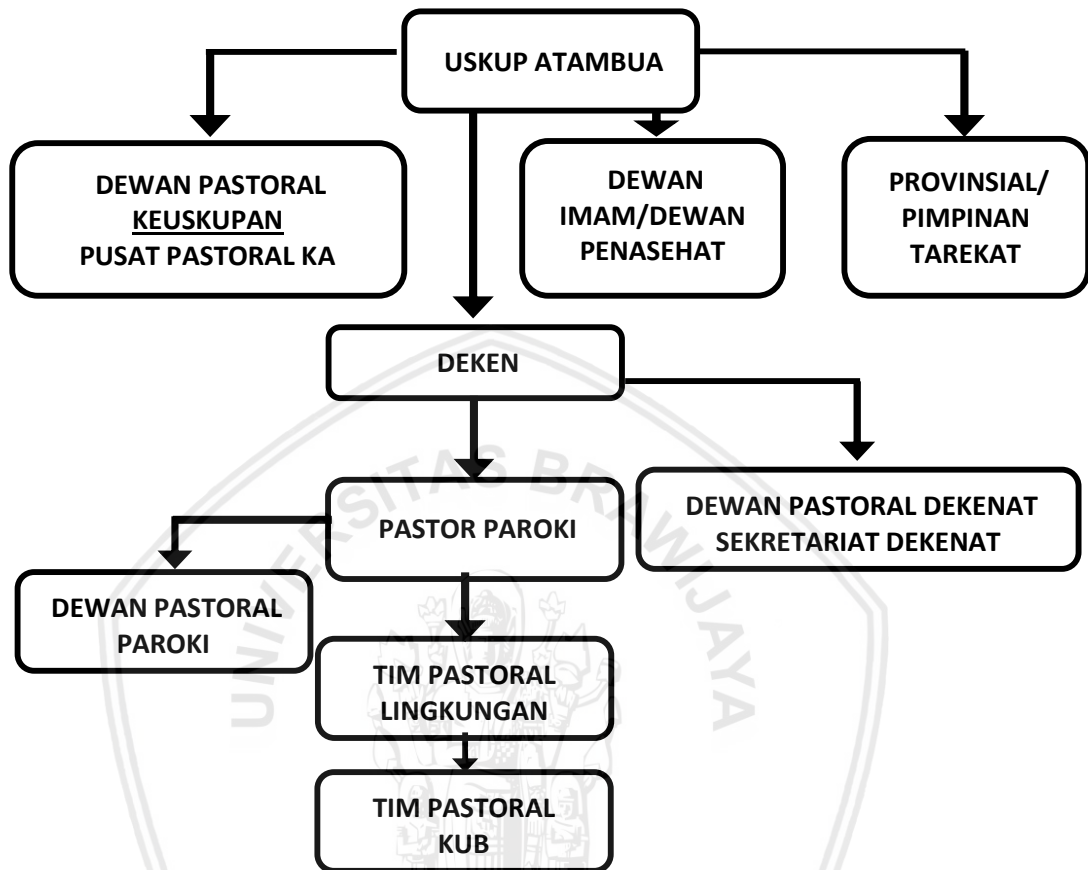
5) Kesehatan Umat

Sampai dengan tahun 1980-an hanya ada suster-suster SSpS dan PRR yang melayani masyarakat/umat dengan Puskesmas,

Poliklinik dan BKIA. Mula-mula para Biarawati/Suster SSpS membuka BKIA/Poliklinik di Halilulik, Betun dan Kefamenanu, sedangkan PRR membuka BKIA/Poliklinik di Noemuti dan Eban. Walau dengan peralatan dan fasilitas yang terbatas, para suster berusaha melayani masyarakat/umat dengan sepenuh hati.

Hingga akhir tahun 2014 jumlah Poliklinik Katolik makin bertambah seiring dengan bertambahnya kongregasi suster dan bruder di KA. Di Kabupaten Belu ada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik yang dikelola oleh para suster SSpS Timor. Sedangkan di Kabupaten TTU ada Rumah Sakit Kusta Katolik, Mgr. Gabriel Manek Naob-Noemuti Timur, milik para suster PRR. Selain kedua Rumah Sakit ini, ada juga Poliklinik dan BKIA Swasta Katolik seperti BKIA Maria Nirmala Naesleu asuhan para Suster JMJ; BKIA Santo Antonius Betun, BKIA Santo Yosef Kefa. BKIA St. Rafael Lahurus dan BKIA Santo Vincentius A Paulo Fulur milik suster SSpS. Klinik Santa Familia Maubesi dan Klinik Christo Rei Lolowa asuhan para suster PI. Klinik Santa Bakita Nurobo asuhan para suster Canosian dan Klinik Santo Agustinus Fatubenaو milik para suster KYM. Baik Rumah Sakit maupun Poliklinik Katolik itu tergabung dalam sebuah perkumpulan dengan nama Persatuan Dharma Karya Kesehatan Indonesia atau yang biasa disingkat Perdhaki yaitu Perdhaki Wilayah KA. (Helo, 2017:42)

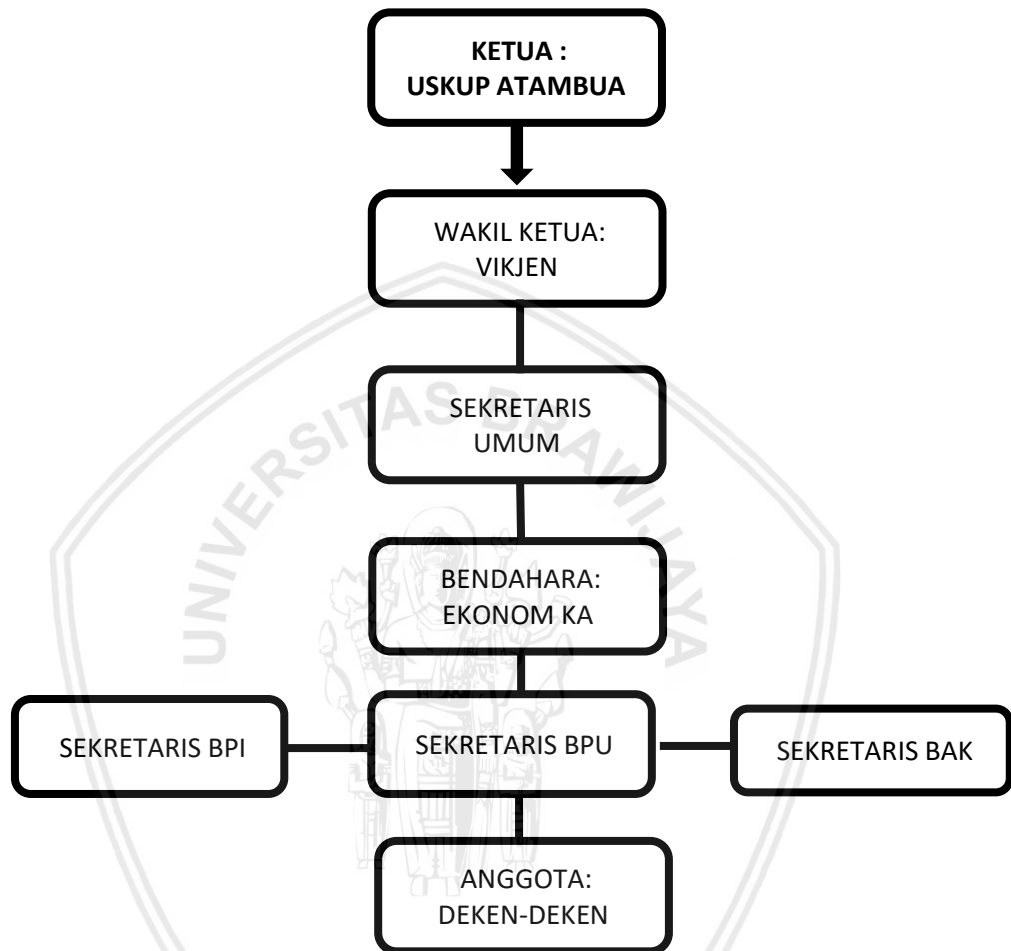
Struktur Dewan Pastoral Keuskupan Atambua



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dewan Pastoral Keuskupan Atambua

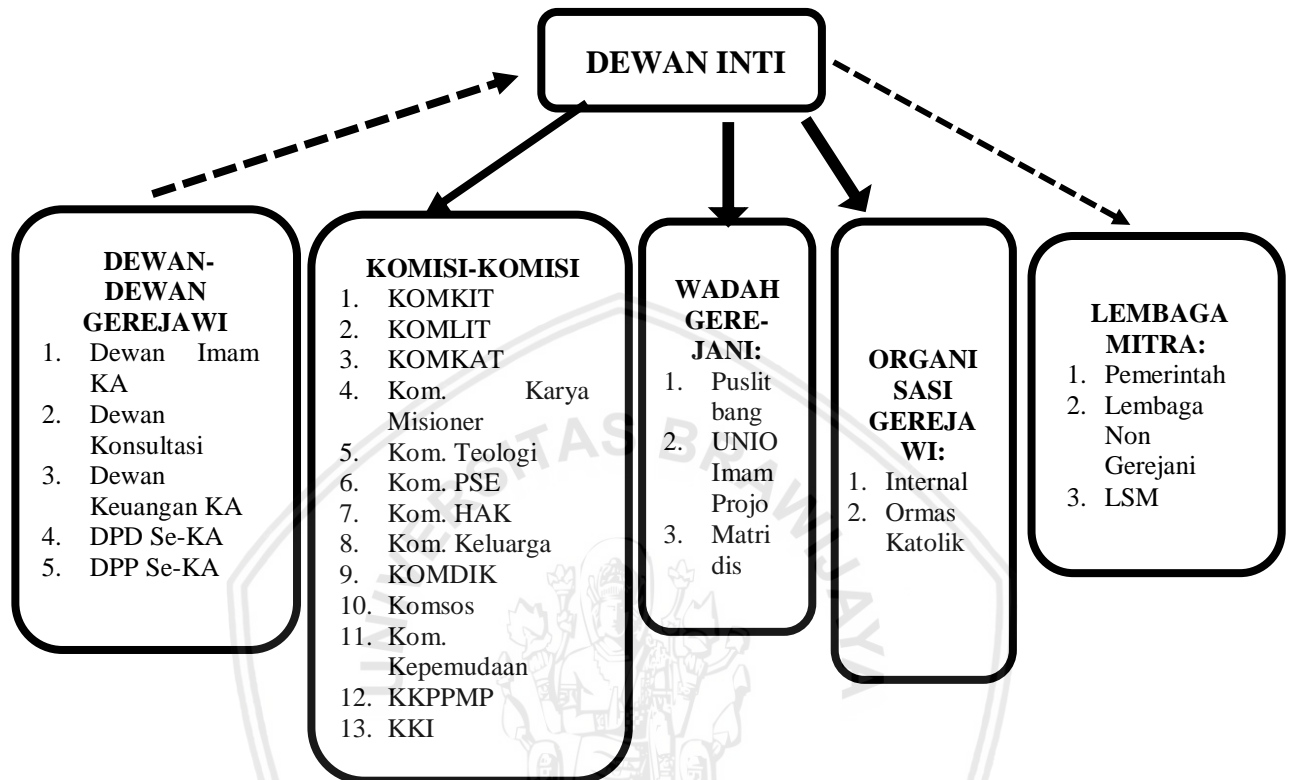
DEWAN PASTORAL KEUSKUPAN ATAMBUA

1. DEWAN INTI



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dewan Inti Pastoral Keuskupan Atambua

2. DEWAN PLENO



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dewan Pleno Pastoral Keuskupan Atambua

4.2. PROFIL KOMISI PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI KEUSKUPAN ATAMBUA (KPSE-KA)

a. Perubahan Nama dan Karya Kerasulan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua

a) Periode Ikatan Petani Pancasila (IPP) Tahun 1967

Sebelum ada Panitia Sosial (Pansos) dan KPSE, Pelayanan Karya kemanusiaan di KA ditangani oleh Lembaga Ikatan Petani Pancasila (IPP) pada tahun 1967. Lembaga ini dipimpin oleh misionaris SVD di Pulau Timor yakni P. Van List Houth, SVD. Pelayanan utama Karya IPP saat itu adalah menjawab persoalan

krisis pangan yang sangat membebani hidup banyak orang. Pada tahun 1967 belum ada perhatian dari pihak manapun atau lembaga donor manapun untuk membantu masyarakat atau umat dalam mengatasi situasi krisis yang terjadi. Usaha-usaha untuk mengatasi krisis pangan saat itu dipercayakan kepada IPP sebagai satu-satunya lembaga Gereja yang hadir pada saat itu. Karya pelayanan IPP saat itu bersifat karitatif karena fokus pada distribusi bahan pangan seperti jagung dan kacang-kacangan disamping membantu mempersiapkan lahan-lahan pertanian rakyat. Om Frans Asten (Karyawan Pertama Seminari Lalian) bersama Bapak Hendrikus Manehat (Karyawan pada IPP) diutus ke beberapa tempat di wilayah KA untuk membantu para petani mempersiapkan lahan pertanian umat/Masyarakat. Hanya bermodalkan sebuah traktor besar, lahan-lahan tidur masyarakat diolah menjadi daerah persawahan seperti daerah (Laran-Betun, Kamanasa, Besikama, Sumur Bor/Sukabitetek, Sadi dan Ponu). IPP juga mengembangkan peternakan baik itu ternak sapi maupun babi. Kepada umat dibagikan sapi dan babi untuk dipelihara secara bergulir. Saat itu belum ada teknologi terbaru yang dimiliki masyarakat dalam mengelolah lahan pertanian. Pada waktu itu IPP menyiapkan beberapa lahan pertanian dan peternakan sebagai lahan percontohan dan pembelajaran bagi para petani untuk mengembangkan bidang pertanian dan peternakan. Pelayanan IPP berlangsung hingga tahun 1980.

b) Periode Yayasan Pengembangan Masyarakat Atambua (YASPEMA) dan Delegatus Sosial (DELSOS) 1981-1983.

Pada tahun 1981 nama IPP diubah menjadi YASPEMA (Yayasan Pengembangan Masyarakat Atambua). Yaspema dipimpin oleh Pastor Stanis Besin, SVD. Fokus karya YASPEMA adalah melanjutkan karya yang sudah dilakukan oleh IPP seperti pengembangan peternakan, pertanian dan *Emergency*/pendistribusian bahan pangan untuk menjawab kebutuhan umat yang terjadi saat itu.

Pada tahun 1981 Uskup Atambua menunjuk dan mengangkat seorang Delsos untuk menangani kerasulan sosial ekonomi dalam Keuskupan dan mewakili Uskup dalam urusan yang berkaitan dengan karya Komisi PSE. Delsos adalah ketua PANSOS (Panitia Sosial) yang saat ini disebut KPSE Keuskupan. Pada tahun 1981 Pastor Anton Solo, Pr ditunjuk sebagai DELSOS KA.

c) Periode Yayasan Sosial St. Yoseph Keuskupan Atambua (YASSKA) Tahun 1983-2002.

Pada tahun 1983 YASPEMA diubah menjadi YASSKA (Yayasan Sosial St.Yoseph KA). YASSKA hadir untuk membangun kemitraan dengan lembaga donor yang mendukung karya Kerasulan PSE di KA. Pimpinan yang diangkat untuk menangani YASSKA sebagai berikut: 1) Pastor Anton Solo, Pr (1983-Oktober 1984). 2) Pastor Yakobus Bura Luli, SVD (Oktober 1984-1985). 3) Pastor Karl Scholly, SVD (1985-1986). 4) Pastor Makarius Molo, Pr (Agustus

1987-Oktober 1998). 5) Drs. Arkadius Parera (Oktober 1998-Maret 1999). 6) Bpk. Hironimus A. Karangora dan wakilnya adalah Pastor Jerry Lanigen, SVD (Maret 1999-Januari 2002). 7) Pastor Urbanus Hala, Pr (Februari 2002 sampai sekarang).

d) Periode (Oktober 2002–sekarang) Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua (PPSE-KA)

Pada bulan Oktober 2002 berdasarkan permintaan KA maka Notaris Atambua telah mengeluarkan keputusan untuk pembubaran YASSKA dengan No: 12 tahun 2002. Selanjutnya Uskup Mgr. Anton Pain Ratu, SVD, Uskup Atambua mengeluarkan surat keputusan dengan No. 614/2002 tentang pengumuman pembubaran Yayasan Sosial St. Yosef KA (YASSKA) dan menugaskan Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-KA (PPSE-KA), sebagai organisasi KA untuk mengemban Pastoral PSE yang selama ini dijalankan oleh YASSKA. Keputusan ini juga telah mengangkat sejumlah orang sebagai petugas dan anggota PPSE-KA antaranya:

Badan Pengurus Inti: a) Ketua: Bapak Maternus Bili, Bsc (almarhum). b) Wakil Ketua/Sekretaris I/Direktur pelaksana Harian: Pastor Urbanus Hala, Pr. c) Wakil Direktur/sekertaris adalah Bapak Hironimus Ani Karangora. d) Bendahara/pengawas keuangan: Pastor Fransiskus Kou, SVD. e) Anggota: Pastor Paulus Nahak, SH., Pr dan Pastor Jerry Lanigan, SVD.

Badan Pengurus Pleno: a) Personalia Pengurus Inti. b) Para Deken. c) Utusan dari Dekenat: Bapak Trensus Kapu, Bapak Vinsen Nurak, Bapak Paulus Nouju.

Badan Pelaksana Harian: a) Direktur: Pastor Urbanus Hala, Pr. b) Wakil Direktur: Bpk H. Ani Karangora. c) Bendahara: Sr. Claudia Dalo, OSU. d) Anggota: Pastor Jerry Lanigan, SVD dan para karyawan PPSE-KA pemegang SK Uskup Atambua.

4.3 PROFIL GEREJA PAROKI ST. PETRUS TUKUNENO-KEUSKUPAN ATAMBUA

a. Latar Belakang Berdirinya Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno

Proses berdirinya Paroki Tukuneno tidak terlepas dari peran serta para pemuka masyarakat dan tokoh awamnya. Ketika itu yang memerintah sebagai kepala kampung Lafaekfera atau yang dikenal dengan Mandez Lolowa adalah Hendrikus Nuak. Hendrikus dibantu oleh wakilnya, Yosef Koy Bere, seorang berpendidikan *Hollands Indische School*. Kedua orang ini dipilih oleh masyarakat setempat karena dianggap mampu memimpin masyarakat Lafaekfera sekaligus untuk mengimbangi kekuatan luar dan dalam terutama dua lingkungan yang saat itu dikatakan rawan.

Melihat adanya situasi yang kurang mendukung, Yosef Koi Bere mengambil inisiatif, mengemukakan pikirannya untuk mendirikan sebuah Gereja. Inisiatif ini dikemukakan dalam sebuah kesempatan Doa Rosario dari rumah ke rumah, kedua tokoh ini bersama tokoh awam lainnya berbicara dengan umat seputar masalah-masalah yang ada di sekitar

lingkungan Lafaekfera dan usul menjadi sebuah paroki lepas dari paroki Katedral Atambua. Umat sepenuhnya mendukung upaya pendirian paroki ini. Karena itu, pada Mei 1986 dibentuk sebuah tim kecil terdiri dari unsur tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat seperti Henderikus Nuak (Kepala Kampung Lafaekfera), Yosef Koy Bere (Wakil Kepala Kampung Lafaekfera), Leonardus Lopez (Ketua Lingkungan Lafaekfera), Aplonarius Luan (Kakancam Tasifeto Barat), Dominggus Da Silva (Kepala SDK Lafaekfera), Petrus Saik dan Yosef Pareira (Guru), Ezekiel Bere dan Agus Bau Luan (Tokoh Masyarakat).

Tim kecil ini menyepakati untuk menggunakan tanah milik Henderikus Nuak, berdasarkan kemauannya sendiri. Di tanah ini sekarang telah ada bangunan susteran PRR Lafaekfera. Setelah penentuan lokasi ini, tim kecil ini bersama dengan pastor Paroki Katedral mengadakan survei. Namun, upaya, semangat dan niat yang baik ini belum mendapat respon karena ternyata ada banyak persyaratan yang belum dipenuhi walaupun tanah yang dimaksud sudah dibeli. Karena itu, dalam waktu yang cukup lama tanah itu dibiarkan kosong karena sudah menjadi milik paroki. Meski belum mendapat tanggapan yang positif dari pihak Gereja tetapi tim kecil ini tidak putus asa. Suatu ketika muncul pikiran dari Yosef Koy Bere tentang lokasi Gereja. Beliau mengusulkan penggunaan tanah kebun sekolah milik SDK Lafaekfera yang kini telah berdiri bangunan Gereja Tukuneno. Ada dua alasan mengapa lokasi ini dipilih yakni hasil panen dari tanah ini setiap tahunnya tidak memuaskan, ada masyarakat tertentu yang menggunakan kesempatan untuk

memindah-mindahkan batas tanah mereka yang bersebelahan dengan tanah ini sehingga tanah ini semakin lama semakin sempit.

Ide ini diterima, setelah mendapat kata sepakat, tim kecil mengajukan usul ke Paroki Katedral dengan menyertakan berbagai alasan dan persoalan pokok mengenai status tanah lokasi tersebut. Gagasan tentang lokasi Gereja tidak serta merta sekali jadi. Ada upaya dari beberapa tokoh Katolik serta masyarakat lain yang berupaya memindahkan lokasi ini ke lingkungan lain dengan lokasi baru tetapi ada embel-embelnya. Ada juga pihak lain yang dengan diam-diam telah mengangkat material bangunan seperti batu dan pasir ke tanah yang mereka inginkan sendiri. Meski demikian usaha ini gagal lantaran tanah yang dimaksud tidak memenuhi syarat, bahkan ada pihak yang dengan sangat keras menantang dan berusaha memboikot usaha ini. Melihat situasi yang mungkin akan berkepanjangan dan tidak akan selesai maka tim tetap bersikukuh untuk tetap pada kebun SDK Lafaekfera sebagai persiapan lokasi bangunan Gereja.

b. Menuju Paroki Definitif.

Pada 15 Februari 1987 diadakan pertemuan pembentukan panitia pembangunan gedung Gereja Paroki Tukuneno yang dipimpin oleh Rm. Makarius Molo, Pr. Kemudian pada 5 Juli 1987 panitia pembangunan gedung Gereja mengadakan pertemuan untuk peletakan batu pertama. Pada 6 Juli 1987 diadakan peletakan batu pertama oleh Mgr. Anton Pain Ratu, SVD. Pembangunan gedung Gereja berlangsung dua tahun hingga akhirnya pada 29 Oktober 1989, Gereja Paroki Tukuneno resmi diberkati dibawah perlindungan St. Petrus.

Para pastor yang pernah bertugas di Paroki St. Petrus Tukuneno adalah Rm. Makarius Molo, Pr sebagai pastor paroki (1987-1992); Rm. Dominikus Atini, Pr (†) sebagai pastor pembantu (1990-1992); P. Alex Magu, SVD sebagai pastor Paroki (1992-2005); P. Bernard Ado Asan, SVD (ex) sebagai pastor pembantu (1993-1997); P. Servulus Kumpul, SVD (ex) sebagai pastor pembantu (1999-2002); P. Paulus Kerans, SVD, pastor pembantu (Juli-Desember 1999); Rm. Herminus Bere, Pr, pastor pembantu (Maret-Desember 2002); Rm. Vinsesius Babu Kolo, Pr, pastor pembantu (7 Juni 2004-2006); Rm. Urbanus Hala, Pr, sebagai pastor paroki (5 Juni 2005-saat ini, sejak sejarah ini ditulis); Rm. Adianto A. Ampolo, Pr, pastor pembantu (1 November 2010 saat sejarah ini ditulis); Rm. Isfridus T. Tnopo, Pr, pastor pembantu (2011-2015).

Dewan Pastoral Paroki: Tahun 1989-1994: Ibu Irmida Manek Seran; Tahun 1994-1997: Drs. Marcus J. Mau; Tahun 1997-2000: Benediktus Ulu Leki; Tahun 2000-2006: Drs. Marcus J. Mau; Tahun 2006-2010: Drs. Petrus Bria Seran, MM; Tahun 2010-2015: Drs. Petrus Bria Seran, MM.

Dewan Keuangan Paroki: Tahun 1989-1994: Fransiskus Bouk; Tahun 1994-1997: Arnoldus Masan; Tahun 2006-2010: Drs. Mikhael Seran; Tahun 2010-2015: Paulus Theodorus Nahak, BA.

c. Letak Geografis

Tabel 4.2 Batas Wilayah

Batas	Keterangan
Utara	Gereja Paroki Katedral
Timur	Gereja Paroki Nela
Barat	wilayah daerah Oenitas yang termasuk dalam kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
Selatan	wilayah daerah Oenitas yang termasuk dalam kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

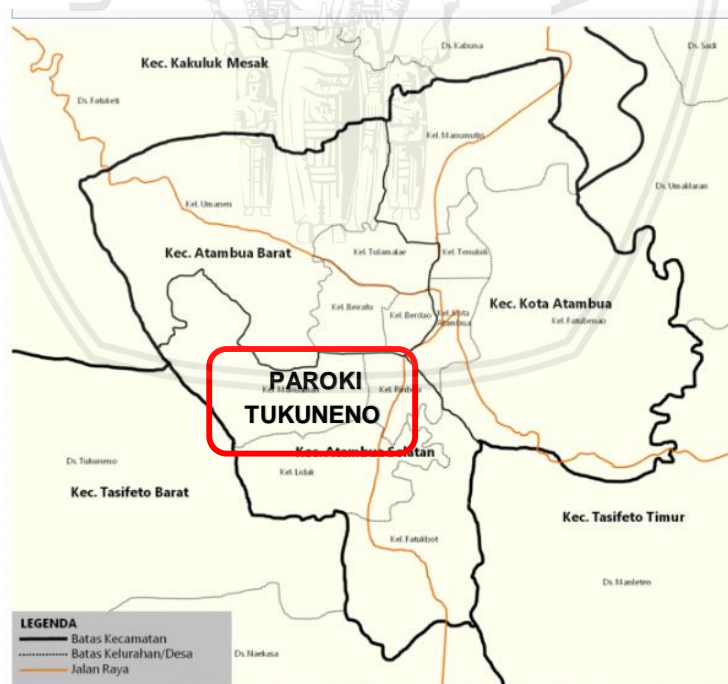
(Sumber Biografi Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-KA).



Gambar 4.4 Peta Wilayah Pastoral KA yang Meliputi 3 Kabupaten (Belu, Malaka dan TTU)



Gambar 4.5 Peta Kabupaten Belu, Salah Satu Wilayah Adminidtrasi Pastoral KA



Ukuran pratayang ini: 655 x 599 piksel. Resolusi lain: 262 x 240 piksel | 525 x 480 piksel | 656 x 600 piksel | 840 x 768 piksel | 1.

Gambar 4.6 Peta Geografis Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno, Terletak Dalam Wilayah Kecamatan Atambua Selatan



Gambar 4.7 Peta Geografi Letak Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno
(Dalam Lingkaran Merah)

d. Sarana Pendukung

1. Gedung Gereja

Bangunan Gereja ini tidak begitu luas namun cukup untuk menampung umat untuk kegiatan rohani terlebih perayaan ekaristi. Walaupun sudah beberapa kali mengalami renovasi tetapi bangunan Gereja ini masih tetap kokoh.

2. Gedung Paroki / Gedung Pertemuan

Paroki Tukuneno juga memiliki 1 buah gedung pertemuan yang berdekatan dengan bangunan Gereja. Gedung ini tidak terlalu luas dan hanya dapat menampung sekitar 250 orang. Walaupun demikian gedung ini dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan seperti rapat DPP, ruang pertemuan bagi Legio Maria, ruang pertemuan bagi OMK dan pelajar serta terkadang digunakan sebagai tempat resepsi.

3. Sarana Pendidikan

a. Perguruan Tinggi

Dalam wilayah Paroki terdapat satu buah sekolah tinggi yakni **Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur**. Lembaga ini bernaung di bawah yayasan Aleksander Bria Seran.

b. SMA dan SMK

Ada dua sekolah tingkat menengah atas yang ada dalam wilayah Paroki Tukuneno yakni SMKN 1 Atambua dan SMA Fajar Timur. SMKN 1 Atambua adalah sekolah negeri yang mayoritas siswanya beragama Katolik.

4. Organisasi Gerejani

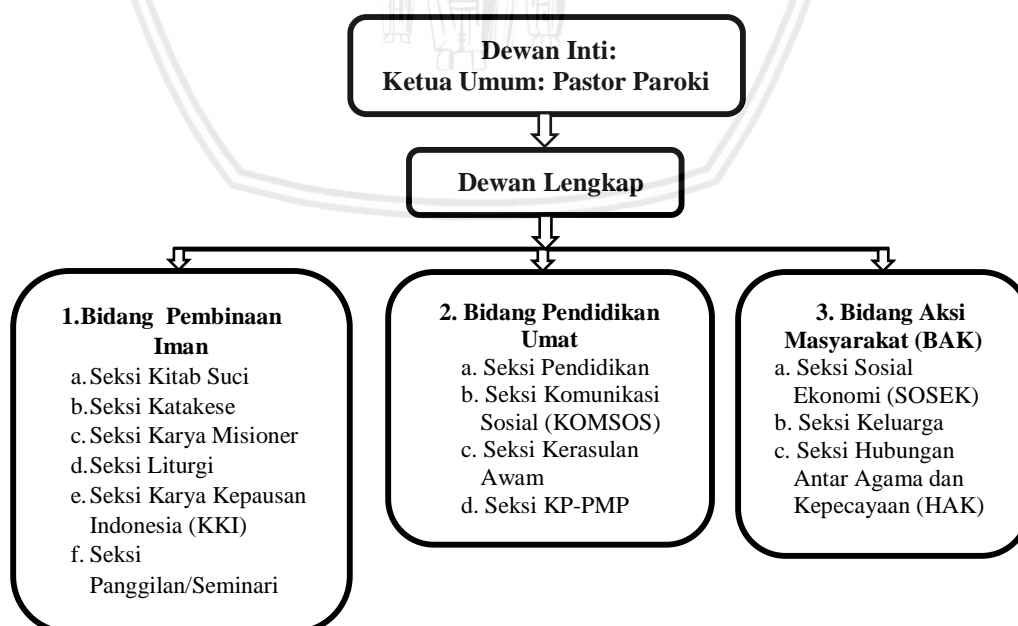
Selain pluralitas suku, sumber daya manusia yang merupakan potensi paroki ini adalah profesi kerja dari umat. Kebanyakan umat berprofesi sebagai guru dan pegawai serta pengusaha yang boleh dikata tingkat kesejahteraan hidup mereka memadai. Potensi ini bisa menjadi pendukung dan penopang Gereja menuju Gereja yang lebih mandiri. Kesadaran umat semakin lama semakin meningkat juga menjadi potensi dalam pengembangan Gereja ke depan. Potensi-potensi ini telah ada tinggal bagaimana para agen pastoral baik terahbis maupun tidak terahbis mengelola sumber daya ini sehingga bisa diberdayakan secara lebih optimal.

5. Kegiatan Pastoral

a. Kegiatan Sosial Ekonomi melalui Seksi Sosial Paroki (SSP)

Memiliki tugas pokok yakni membantu Pastor Paroki dalam usaha mengembangkan reksa pastoral sosial ekonomi (Sosek) di paroki. Sedangkan penjabaran tugas yakni: 1) Mensosialisasikan visi dan misi PSE, 2) Mengembangkan Spritualitas PSE melalui animasi dan motivasi, 3) Mengkoordinasi dan memfasilitasi reksa pastoral PSE, 4) Mengadakan pendampingan bagi kelompok-kelompok pengembangan ekonomi di paroki, 5) Menjalin kerja sama/kemitraan, 6) Merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pastoral Sosek Paroki. (Sumber Biografi Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-KA)

Susunan Keanggotaan Dewan Pastoral Gereja Paroki Santo Petrus Tukuneno-Dekenat Belu Utara Masa Bakti 2015-2018



Gambar 4.8 Struktur Organisasi DPP St. Petrus Tukuneno-
Dekenat Belu Utara Masa Bakti 2015-2018

4.4 KARAKTERISTIK UMAT/KOMUNITAS SASARAN GEREJA PAROKI ST. PETRUS TUKUNENO YANG DIBERDAYAKAN.

1. Keadaan Demografis, Jumlah Keluarga, Pendidikan dan Tingkat Pendapatan.

a. Keadaan Demografis

Menurut data statistik Paroki tahun 2018, jumlah umat sebanyak 13.306 dengan komposisi laki-laki sebanyak 6.665 orang (50,09%) dan perempuan sebanyak 6.641 orang (49,90%) dengan ratio jenis kelamin laki-laki sebanyak 100,36 % sedangkan perempuan sebanyak 99,63 %. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa jumlah umat laki-laki lebih banyak dari jumlah umat perempuan.

Tabel 4.3 Komposisi Jumlah Umat dan Ratio Jenis Kelamin.

	Laki-Laki	Perempuan
Komposisi Jumlah Umat.	50,09 %	49,90 %
Ratio Jenis Kelamin	100,361 %	99,63 %

Sedangkan bila dilihat dari profesi atau jenis pekerjaannya, sebagian besar umat berprofesi di sektor swasta dan sebagian kecil sebagai pegawai pemerintah. Total jumlah sebagai petani dan peternak sebanyak 2.105 (43,40%), sebagai buruh sebanyak 372 (7,87%), sopir sebanyak 274 (5,56%), tukang ojek sebanyak 709 (14,60%), TKW/TKI sebanyak 200

(4,12%), pengusaha sebanyak 91 (1,87%), nelayan sebanyak 2 orang (0,04%), pensiunan 160 (3,48 %) pegawai negeri (Guru dan PNS) sebanyak 820 (16,91%), diikuti dengan TNI-Polri sebanyak 105 (2,16%).

Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan Umat.

Jenis Pekerjaan									
PNS	TNI/ Polri	Peng usaha	Pensiu- nan	Petani/ Peter- nak	Nela- yan	Buruh	Sopir	Ojek	TKI/ TKW
16,91 %	2,16 %	1,87 %	3,48 %	43,40 %	0,04 %	7,87 %	5,56 %	14,6 0 %	4,12 %

(Sumber: Biografi Paroki Tukuneno Tahun 2018)

b. Jumlah Keluarga

Jumlah KK Katolik sebanyak 798. Jumlah ini tersebar dalam wilayah Paroki yang terdiri dari 1 stasi yakni stasi Halituku, 30 lingkungan dan 160 KUB. Dari 30 lingkungan yang tersebar ini, 5 diantaranya berada di stasi Halituku.

c. Pendidikan

Jumlah umat yang berpendidikan secara keseluruhan adalah 11.736 (88,20%) yang terdiri dari buta huruf 342 (3 %), belum sekolah 1.228 (9%) SD 2.854 (21,44%), SLTP 1.978 (14,86%), SLTA 3.151 (23,68%), Sarjana dan Diploma 1.552 (11,66%) dan yang sementara di berada dalam proses bangku pendidikan 2.201 (16%).

Tabel 4.5 Pendidikan Umat.

Pendidikan Terakhir						
SD	SMP	SMA	Sarjana/ Diploma	Buta Huruf	Belum Sekolah	Masih sekolah
21,44 %	14,86 %	23,68 %	11,66%	3 %	9 %	16%

(Sumber: Biografi Paroki Tukuneno Tahun 2018)

d. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan umat rata-rata mengikuti standar UMR Provinsi NTT yaitu Rp. 1.795.000 (Sesuai SK Gubernur NTT No. 342/KEP/HK/201 tentang UMP NTT 2019). Namun tingkat pendapatan di sektor swasta menyesuaikan dengan jenis pekerjaan dan waktu lamanya bekerja. Jika banyak pekerjaan yang dilakukan dengan durasi waktu yang panjang maka tentu penghasilannya semakin banyak. Sementara bagi pegawai pemerintah menyesuaikan dengan strata pendidikan dan jenis jabatannya. Dalam data yang diperoleh melalui kantor sekretariat paroki ada juga umat yang memiliki tabungan di Bank dan Koperasi. Yang menabung di Bank (berbagai jenis Bank) yaitu sebanyak 1.668 orang (12,5%), sementara yang memiliki tabungan di koperasi Kredit Union (CU) sebanyak 835 orang (6,2%).

2. Kelompok Sasaran, Pendekatan Dan Karakteristik Informan.

a. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pemberdayaan yang dilakukan oleh tim Seksi Sosial Ekonomi Tukuneno bersama tim Panitia PSE-KA

adalah warga/umat yang rentan terhadap kemiskinan yaitu mereka yang berstatus pengangguran, berpendidikan rendah, tidak diperhatikan dalam lingkungan sosial, berpenghasilan kecil atau secara umum umat dari kalangan berstatus kelas bawah yang kurang tersentuh oleh bantuan pemerintah dan pembangunan. Mereka itu seperti para buruh tani yang juga tinggal di lahan milik orang lain, petani pemilik lahan sempit, pengusaha kecil, perajin rumah tangga, ibu rumah tangga, para pemuda, penjaga toko.

Kelompok sasaran Tim PSE tidak saja menjangkau warga masyarakat/umat di sekitar Gereja, tetapi secara luas sudah menjangkau umat di seluruh Gereja Paroki di wilayah administratif KA seperti di desa-desa dan di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Belu.

Dalam mengimplementasikan program prioritas pengentasan kemiskinan khususnya program pemberdayaan, masyarakat menerimanya secara terbuka dan siapa saja boleh menerimanya tanpa memperhatikan agama yang dianutnya, suku dan tempat domisilinya. Yang paling penting adalah masyarakat mau berpartisipasi dalam setiap program. Gereja dalam hal ini Komisi PSE, tidak meletakkan agama sebagai kriteria perekrutan dan pembentukan kelompok-kelompok sasaran. Namun sesuai dengan kondisi demografis penduduk di sekitar Gereja bermayoritas Kristen Katolik, mengakibatkan kelompok sasaran yang terbentuk juga beranggotakan umat Katolik. Umat dari

golongan sosial apa saja dapat masuk dalam kelompok sasaran yang dibentuk agar juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan dana bagi keberlanjutan kelompok.

Pembentukan kelompok sasaran adakalanya dibentuk berdasarkan kesamaan jenis kegiatan dan kesamaan kepentingan sehingga dalam pembinaan kelompok, mereka dapat saling membagi pengetahuan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam penguatan kelompok karena penguatan kelompok salah satunya dapat dicapai melalui kualitas SDM anggota yang tergabung di dalamnya.

b. Pendekatan

Kelompok sasaran akan diorganisasikan, dibantu dan bangkitkan dalam rangka memobilisasi kekuatannya menuju kemandirian kelompok. Upaya yang dilakukan Tim PSE adalah melalui pendekatan-pendekatan kearifan lokal atau menurut kebiasaan adat setempat sehingga dapat menyentuh aspek akar persoalan yang mereka hadapi. Pendekatan penempatan kader yang bertugas mendampingi kelompok pun kalau bisa diusahakan orang yang cakap berbahasa daerah dan atau mengetahui *local wisdom* setempat sehingga komunikasi dan pendistribusian informasi dapat berjalan lancar sehingga keberhasilan program dapat tercapai.

Pada awal-awal tahun 1967 Gereja KA melalui Ikatan Petani Pancasila (IPP) (sebutan KPSE waktu itu), melakukan

pendekatan kepada umat atau masyarakat secara individual karena umat pada masa itu masih sangat sulit untuk diubah pola pikirnya. Baru pada akhir-akhir tahun 2000-an mulai dilakukan pendekatan secara kelembagaan melalui kerja sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan Desa, LSM lokal dan LSM Internasional. Tim PSE memainkan peranan sebagai motivator, komunikator, dinamisator dan fasilitator terhadap kelompok sasaran.

Kegiatan pengembangan masyarakat menuju pemberdayaan masyarakat yang dilakukan KPSE menggunakan pendekatan “dari dalam” atau langsung pada kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa dalam pendampingan, masyarakatlah yang aktif melakukan perubahan. Pendekatan “dari dalam” dilakukan dengan cara tinggal bersama masyarakat (*live-in*) selama program berlangsung (biasanya 2-3 tahun) untuk lebih mengetahui situasi dan kondisi di lapangan sekaligus dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat dinilai sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan untuk membangun dirinya sendiri. Kelompok sasaran program perlu diperlakukan sebagai aktor yang mampu mandiri, mampu mengatasi persoalannya sendiri dengan mencari alternatif penyelesaian masalah secara bijaksana menurut kearifan lokalnya. Tugas KPSE melalui Tim Sosek dan Panitia PSE adalah membantu mereka dalam mengembangkan

pengetahuan dan mengaktualisasikan potensi-potensi sumber daya alam dan manusia yang masih belum tergalai.

Karya PSE yang dilakukan Gereja bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang berpola dan berpusat pada manusia. Kerasulan PSE berusaha membangun kekuatan dan kemandirian dengan mengupayakan proyek pengembangan berdasarkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat. Pemberdayaan berbasis masyarakat lokal menjadi pilihan dalam pengembangan karena masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah-wilayah pedesaan atau yang berbatasan dengan kota masih memiliki lahan yang luas yang dapat dikembangkan menjadi potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang besar.

Pendekatan program strategis untuk mendampingi masyarakat lokal yang digunakan adalah pemberdayaan berbasis masyarakat lokal (*community developoment*). Pemberdayaan model ini adalah pendekatan pembangunan yang halus dan sangat menghargai kearifan lokal setempat karena Gereja meyakini bahwa masyarakat akan sejahtera dan makmur apabila kearifan lokalnya tidak diganggu dan habitat alamnya tidak dirusaki. Pendekatan pemberdayaan dilakukan juga dengan memanfaatkan potensi SDM yang dimiliki masyarakat lokal. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat lokal agar secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengelola dan melindungi sumber ekonomi yang dimiliki yang

semuanya akan bermuara pada usaha menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat tersebut.

Pemberdayaan dengan model pembangunan alternatif menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), berparadigma *bottom up* dan lokalitas. Model ini mendorong struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya dan menentang struktur penindasan melalui pembuatan regulasi yang berpijak pada keadilan sosial. Pendekatan dalam pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, menekankan partisipasi orang lokal, bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar atau model pembangunan modern beraroma Eropa. Model pembangunan alternatif yang digalakkan KPSE-KA bercirikan partisipatoris dan menekankan pemenuhan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia. Perspektif partisipatoris artinya menekankan partisipasi luas, aksesibilitas, keterwakilan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang kemudian akan mempengaruhi nasib mereka. Tujuan pemberdayaan yang menuju pembangunan yang menekankan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia artinya bahwa pembangunan harus berusaha memenuhi kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*) kebebasan (*freedom*) dan identitas (*identity*), sebaliknya membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*poverty*)

kerusakan (*destruction*) tekanan (*represion*) dan alienasi (*elienasi*). (Zubaedi, 2013:140-141)

Selama ini Pemerintah Daerah Belu dan Pemprov NTT juga telah berusaha memberdayakan masyarakat melalui program-program seperti PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, Anggur Merah (Anggaran Untuk Mensejahterakan Rakyat), KUR, bantuan bibit bagi petani dan lain sebagainya namun cara pendekatan yang tidak “merakyat” atau berorientasi proyek sehingga mengakibatkan program-program tersebut kini sebagian tidak lagi terkontrol dan bahkan tidak ada lagi keberlanjutannya. Memang pemerintah berusaha menjadikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan tetapi cara pendekatannya tidak mengikuti kearifan lokal yang berlaku di daerah/kelompok sasaran sehingga terkadang kebutuhan dan keinginan hakiki masyarakat banyak yang tidak terpenuhi. Para petugas yang mendampingi masyarakat sasaran juga tidak mengetahui bahasa daerah dan kearifan lokal setempat sehingga distribusi informasi juga terkadang tidak lancar yang akhirnya menimbulkan miskomunikasi di antara anggota kelompok sasaran. Pendekatan *live-in* yang dibuat oleh tim PPSE tidak dicontohi/dilakukan oleh para petugas pemerintah sehingga pemerintah dinilai belum mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sasaran dengan tepat.

3. Karakteristik Informan

Tabel 4.6 Karakteristik Informan

No.	Nama	Umur	Status	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Rm. UH, Pr	60	Tidak Menikah	S3	Pastor Paroki Gereja St. Petrus Tukuneno merangkap Ketua KPSE-KA
2.	Rm. HM, Pr	50	Tidak Menikah	S3	Pastor Sekretaris KPSE-KA
3.	Rm. AA, Pr	37	Tidak Menikah	S3	Pastor Moderator OMK-KA dan merangkap Moderator OMK Paroki Tukuneno
4.	Rm. EH, Pr	43	Tidak Menikah	S3	Pastor (Sekretaris Uskup Atambua) merangkap tugas di Kantor Puspas
5.	Bapak YH	45	Menikah	S2	Ketua Pusat Pastoral KA
6.	Ibu IT	40	Menikah	S1	Bendahara KPSE-KA
7.	Ibu IM	37	Menikah	S1	Ketua Koordinator Program Peternakan Babi
8.	Bapak SJ	40	Menikah	S1	Ketua Program Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
9.	Nona MT	30	Belum Menikah	S1	Staf Program Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
10.	Bapak WL	55	Menikah	S1	Koordinator Program Pertanian Lahan Kering
11.	Bapak ED	45	Manikah	S2	Staf LSM CRS sebagai Pengawas LSM CRS
12.	Nyong YVN	34	Belum Menikah	SMK	Staf LSM CRS yang bertugas di Desa Mauhautias.
13.	Bapak AS	60	Menikah	S2	Ketua DPP Paroki St. Petrus Tukuneno merangkap Ketua Lingkungan Tini
14.	Nona VT	25	Belum Menikah	S1	Ketua OMK Paroki Tukuneno
15.	Nyong NRS	32	Belum Menikah	D3 Kesehatan Hewan	Staf Program Peternakan

Lanjutan Tabel 4.6

No.	Nama	Umur	Status	Pendidikan	Pekerjaan
16.	Nona MGRT	27	Belum Menikah	SMA	Ketua Kelompok Peternak Babi
17.	Bapak VNS	50	Menikah	SMA	Pegawai Kantor Sekretariat Paroki St. Tukuneno.
18.	Bapak ARB	31	Menikah	S1	PSN/Umat Paroki St. Petrus Tukuneno
19.	Bapak YT	56	Menikah	SMA	Anggota Kelompok Tani

4.5 PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN.

1. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi oleh Seksi Sosial Paroki Tahun 2018 Di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno-Atambua.

Ada 7 kegiatan yang sementara dilaksanakan atau sementara berjalan di Tukuneno dan dapat di lihat di halaman lampiran. Kegiatan pemberdayaan itu seperti:

1. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Profesional bagi OMK (Pelatihan Pembuatan Tahu, Tempe dan Susu Kedelei)
2. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Ternak Babi.
3. Kegiatan Pengembangan Pertanian Lahan Kering.
4. Pemberdayaan Kelompok Tenun Ikat.
5. Diklat Pembuatan Rosario
6. Diklat Pengelolaan Keuangan Dalam Rumah Tangga.
7. Ekonomi Kreatif OMK Tukuneno di Rumah Coffe-Estri.

2. Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan

Untuk mengukur atau menilai tingkat keberhasilan atau kesuksesan sebuah kegiatan pemberdayaan dapat dilihat dari beberapa aspek yang sederhana. Menurut peneliti, indikator keberhasilan itu dapat diamati dari:

a. Pendapatan

Jika diukur dari pendapatan yang diperoleh dari hasil pemberdayaan dari kegiatan di atas, dapat dikatakan belum maksimal atau belum mencapai standar UMR Provinsi NTT yaitu Rp. 1.795.000, karena kegiatan pemberdayaan ini masih bersifat latihan sehingga hasil dari pemberdayaan ini hanya dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan. Para pemuda yang terlibat hanya diberikan uang saku sebesar Rp. 400.000-500.000/bulan oleh Pastor moderator OMK, kecuali para pemuda yang ikut terlibat dalam peternakan babi dimana hasil yang mereka peroleh dari pengembangan indukan sebesar 80 %, sedangkan 20 % diserahkan ke PPSE-KA (Misalnya jika satu ekor indukan babi beranak 10 ekor anak babi maka 8 ekor akan menjadi milik anggota kelompok sedangkan 2 ekor akan disetorkan ke KPSE). Uang saku yang diperoleh menurut hemat peneliti hanya dapat digunakan untuk biaya transportasi, sementara untuk kebutuhan lain diperoleh dari pekerjaan sampingan, entah itu sebagai ojek, penjaga toko, pekerja serabutan atau lain sebagainya.

Realitas ini menandakan bahwa dengan tingkat penghasilan yang kecil itu, tidak akan dapat menanggulangi beban konsumsi atau meringankan biaya hidup dan juga tidak bisa disimpan sebagai tabungan masa depan. Jika disimpulkan dari temuan di atas menurut penetapan UMP NTT maka tingkat keberhasilan dalam aspek pendapatan masih dalam proses atau belum mencapai UMP. Sedangkan jika diukur menurut kemampuan majikan (Pastor Moderator), upah itu sudah sesuai kinerjanya karena dihitung berdasarkan pemasokan/keuntungan hasil usaha dan biaya operasional usaha.

Sementara itu, standar yang digunakan Bank Dunia menggunakan dua macam standar yakni standar indeks berdasarkan tingkat konsumsi dan standar hidup minimum. Indeks pertama adalah kemiskinan yang spesifik di setiap negara. Indeks kedua bersifat global yang membandingkan secara silang di antara negara. Indeks kedua ini menghasilkan garis kemiskinan tinggi dan garis kemiskinan rendah yang meliputi pendapatan perkapita antara US \$ 275, 0-US \$ 370, 0. (Safi'i, 2011: 25).

Sementara nilai tukar dolar per Maret 2019 adalah Rp. 14.000,-. Jika menggunakan standar Bank dunia maka pendapatan perkapita setiap bulan adalah jika \$ 275 x Rp. 14.000 = Rp. 3.850.000 atau jika \$ 370 x Rp. 14.000 = Rp. 5.180.000,-. Standar Bank Dunia ini jika dibandingkan dengan tingkat penghasilan yang diperoleh oleh OMK Tukuneno maka

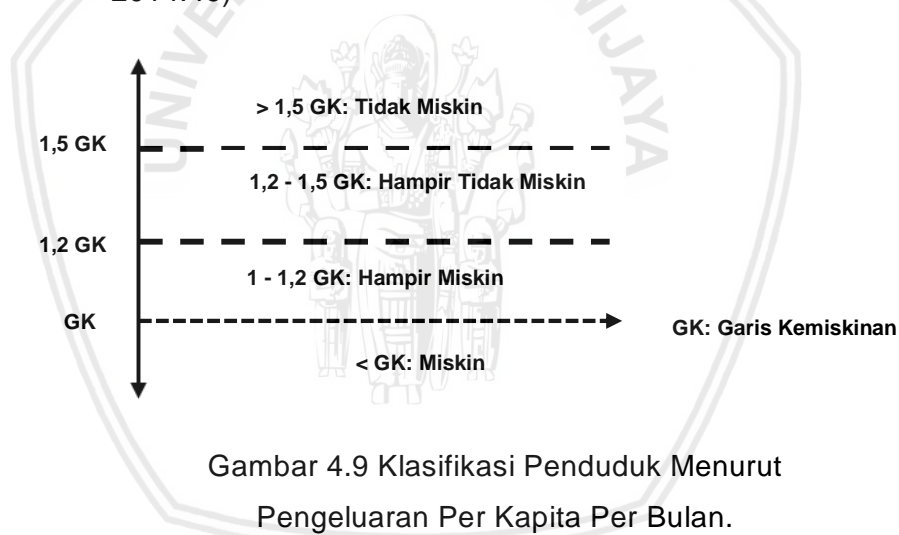
repository.ub.ac.id

dapat disimpulkan bahwa OMK Tukuneno masih belum berhasil dalam proses pemberdayaan karena tingkat penghasilan mereka masih jauh dari standar dunia. Lebih jauh, dengan tingkat penghasilan di bawah standar Bank Dunia maka dikatakan miskin. Secara sederhana Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan, sejauh mana seseorang dikatakan miskin apabila ia berada di bawah tingkat standar hidup minimum. Hal ini diperkuat lagi dengan definisi kemiskinan yang disampaikan oleh Marianti dan Manawar bahwa seseorang dikatakan miskin apabila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum seperti yang disepakati secara umum. (Maipita, 2014:8-9)

Sementara itu untuk mengukur kemiskinan dari analisis Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan BPS dengan membandingkan tingkat pendapatan OMK Tukuneno yang sebesar Rp. 400.000-500.000,-maka dapat disimpulkan bahwa mereka masuk dalam kelompok “hampir tidak miskin” karena pengeluaran perkapita perbulan sebesar pendapatannya (1,5 x Rp. 319.280 = Rp. 478.920). Untuk diketahui bahwa Kabupaten Belu memiliki GK sebesar Rp 319.280/kapita/bulan. (BPS Kabupaten Belu, 2018).

BPS mengklasifikasikan 4 (empat) kelompok masyarakat berdasarkan GK yaitu kelompok masyarakat “miskin”, “hampir miskin”, “hampir tidak miskin” dan “tidak miskin”. Bila pengeluarannya per kapita per bulan dari

seorang individu berada di bawah GK maka ia dikatakan “miskin”. Bila berada pada kisaran 1 hingga 1,2 x GK, maka ia dikatakan “hampir miskin”. Bila berada pada kisaran 1,2 hingga 1,5 x GK maka dikelompokkan dalam kategori “hampir tidak miskin”. Sedangkan bila di atas 1,5 maka dikategorikan penduduk “tidak miskin”. BPS menyatakan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri serta seorang anak termasuk dalam kategori manakah, tergantung GK di wilayah itu dan tingkat pengeluarannya. (Maipita, 2014:46)



Gambar 4.9 Klasifikasi Penduduk Menurut Pengeluaran Per Kapita Per Bulan.

(Sumber: Maipita, 2014:46)

Sementara itu, untuk mengukur kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan pendapatan ini dapat juga digunakan model konsumsi pangan setara beras oleh Prof. Sajogyo. Sajogyo mencoba mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan ekuivalen daya beli beras berdasarkan ukuran pendapatan. Suatu keluarga atau

individu dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari ekuivalen harga beras sebanyak 480 kg/kapita/tahun bagi yang tinggal di pedesaan dan sebanyak 720 kg/kapita/tahun bagi yang tinggal di perkotaan. Dalam konsep ini, garis kemiskinan di pedesaan sebesar harga beras 480 kg, sedangkan di perkotaan sebesar harga 720 kg. Berdasarkan metode ini, individu atau rumah tangga dapat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu: 1) nyaris cukup makan, 2) miskin sekali, 3) miskin, 4) tidak miskin.

Tabel 4.7 Pengelompokan Penduduk Menurut Tingkat Pendapatan Menggunakan Garis Kemiskinan Sajogyo.

Kategori	Pendapatan Per Kapita Per Tahun (P) Setara Harga Beras (Kg)	
	Tinggal di Desa	Tinggal di Kota
Nyaris Cukup Makan	$P < 240 \text{ Kg}$	$P < 360 \text{ Kg}$
Miskin Sekali	$240 \text{ Kg} \leq P \leq 360 \text{ Kg}$	$360 \text{ Kg} \leq 540 \text{ Kg}$
Miskin	$360 \text{ Kg}-480 \text{ Kg}$	$540 \text{ Kg}-720 \text{ Kg}$
Tidak miskin	$> 480 \text{ Kg}$	$> 720 \text{ Kg}$

(Sumber: Maipita, 2014:52)

Dalam perhitungannya, GK atau batasan pengelompokan pada tabel 4.7 dapat dikonversi ke dalam rupiah. Misalnya bila rata-rata harga beras per Kg sebesar Rp. 10.000 di desa dan Rp. 12.000 di kota. Maka batasan pada tabel 4.7 dapat dikalikan dengan harga beras di kedua wilayah tersebut. Dalam kasus ini, seseorang dikatakan miskin apabila jumlah pendapatannya dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000 (Rp. 10.000 x 480 Kg) atau rata-rata kurang dari (Rp.

$4.800.000:12 = \text{Rp. } 400.000$ per bulan jika ia tinggal di pedesaan.

Seseorang juga dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari Rp. 8.640.000 (Rp. 12.000 x 720 Kg) atau rata-rata (Rp. 8.640.000 : 12) Rp. 720.000 per bulan jika ia tinggal di kota.

Dari analisis Sajogyo ini jika dikaitkan dengan tingkat pendapatan para pemuda/OMK Paroki Tukuneno yang hanya sebesar Rp. 400.000-Rp. 500.000/bulan maka di katakan "miskin" (Miskin Sekali) karena mereka ini tinggal di perkotaan yang menurut pengkuran Sajogyo, orang yang tinggal di kota dikatakan miskin apabila konsumsi berasnya < 720 Kg. Jika uang Rp. 500.000 dibelanjakan beras semua maka hanya mendapatkan $\text{Rp. } 500.000 : \text{Rp. } 12.000 = 41 \text{ Kg}$ beras/bulan, maka $41 \text{ kg} \times 12 \text{ bulan} = 492 \text{ Kg}$. ($492 \text{ Kg} < 720 \text{ Kg}$)

Sebelumnya para pemuda atau umat Gereja Tukuneno yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi setelah diadakannya kegiatan pemberdayaan oleh KPSE-KA mereka kini telah memiliki penghasilan setiap bulan meskipun kurang dari standar UMP NTT, kurang dari standar Bank Dunia dan kurang dari standar Sajogyo menurut ukuran konsumsi beras. Untuk mencari tambahan, mereka harus menambah waktu bekerja entah sebagai ojek, buruh kasar, bertani, beternak, pedagang asongan ataupun pekerja serabutan lainnya.

b. Kemandirian

Sampai saat ini kegiatan pemberdayaan masih atau sedang terus berjalan sesuai permintaan dari dari umat melalui Seksi Sosek Paroki Tukuneno. Kontrol atau pengawasan pun masih tetap dilakukan karena masih ada umat/pemuda yang diberdayakan belum sepenuhnya menguasai ilmu keterampilan yang dibagi. Sumber daya manusianya menurut pengamatan peneliti bisa dikatakan hampir memenuhi syarat karena mereka rata-rata adalah umat yang berpendidikan SLTA dan bahkan ada yang berstatus sarjana, hanya saja sebagian dari mereka belum mendapat pekerjaan tetap. Namun, SDM-nya perlu terus dilatih sehingga mampu bersaing ke level yang lebih tinggi. Pemberdayaan yang dilakukan oleh KPSE-KA adalah wujud nyata dari melatih SDM agar mampu membawa perubahan kesejahteraan.

Menurut Teguh (2007:80), tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai kemandirian dan membentuk individu dan masyarakat yang mampu berdayasaing. Kemandirian masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat mampu untuk berpikir, mampu memecahkan persoalan dengan tepat dengan mempergunakan kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif dengan dukungan sumber daya yang bersifat fisik dan material.

Secara umum komunitas umat Tukuneno yang diberdayakan sudah mampu mencapai kemandirian seperti

yang dimaksud oleh Teguh di atas, hanya perlu untuk terus diperhatikan dan dikontrol sehingga motivasi dan semangat mereka tetap terpelihara sehingga tidak berhenti atau mundur. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumodingrat dalam (Teguh, 2007: 82) bahwa Pemberdayaan itu melalui suatu proses belajar hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tetap perlu dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus-menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Dengan adanya pengawasan yang terus-menerus, peneliti menyimpulkan secara umum bahwa masyarakat/umat yang diberdayakan hampir menuju ke tahap kemandirian karena belum mampu secara mandiri mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang masih terus dikontrol seperti pelatihan pembuatan tahu, tempe dan susu kedelai, pengembangan peternakan babi, pengembangan pertanian lahan kering, pemberdayaan kelompok tenun ikat dan kegiatan ekonomi kreatif bagi OMK Tukuneno.

c. Keberlanjutan.

Sesuai kontrak kerja antara KPSE dengan LSM-LSM lokal dan internasional, semua program prioritas pengentasan kemiskinan dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PPSE kepada umat Tukuneno tentu akan selesai atau

berhenti. Namun PPSE yang memprakarsai jalannya program-program itu, terus melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Belu untuk tetap menjalin hubungan dan meningkatkan kepercayaan sehingga keberlanjutan dari program-program tersebut tetap diawasi oleh Pemerintah. LSM-LSM lokal dan internasional akan menghentikan masa kontraknya dengan PPSE sesuai perjanjian dan selanjutnya, jalinan kerja sama diserahkan kepada Pemerintah Belu sehingga tetap ada dukungan dana melalui dinas terkait.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan terhadap kelompok sasaran masih dilakukan untuk mengantisipasi mandeknya kegiatan yang sudah berjalan. Umat (kelompok sasaran) masih membutuhkan dukungan bantuan dana dan pendampingan dari pihak lain termasuk untuk biaya operasional kegiatan. Tingkat ketergantungan kepada pihak lain yang masih terlalu sering dan tidak akan pernah berhenti, menunjukkan bahwa komunitas/kelompok yang diberdayakan masih belum mampu melanjutkan secara mandiri keberlangsungan kelompoknya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sumodiningrat dalam Teguh (2007:84), yang menyatakan bahwa masyarakat yang sudah atau dalam proses menuju kemandirian pun masih perlu perlindungan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan. Kemandirian itu perlu dipelihara dan dipupuk terus-menerus

sehingga selanjutnya dapat menciptakan kedewasaan sikap masyarakat. Selain itu, ketergantungan terhadap pihak lain menandakan bahwa masyarakat atau kelompok sasaran masih dalam proses tahap demi tahap dalam jangka waktu yang lama masih membutuhkan pihak lain sebagai mitra pemberdayaan. Terkadang dari satu tahap ke tahap berikutnya membutuhkan banyak pengorbanan. Tahapan itu tidak dapat dipaksakan karena justru akan menimbulkan bumerang bagi pemerintah dan bagi LSM-LSM pendonor ataupun bagi masyarakat itu sendiri.

d. Pengetahuan/Skill

Orientasi karya PSE salah satunya adalah memberikan pencerahan dalam bentuk transfer pengetahuan. Melalui kegiatan pemberdayaan yang diberikan, maka jelas ada pengetahuan keterampilan dibagi yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah banyak kegiatan dilaksanakan sehingga dipastikan umat yang terlibat dapat merealisasikan pengalaman tersebut dalam kehidupannya.

Menurut Teguh, (2007:80-81) untuk mencapai kemandirian diperlukan proses belajar, maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan tersebut. Dengan proses belajar akan diperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan

yang memadai untuk mengantarkan kemandirian ke pangkuan masyarakat.

Jika diukur tingkat keberhasilan dalam aspek pengetahuan, bisa dipastikan komunitas ini berhasil karena banyaknya transfer pengetahuan dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan hanya perlu terus dilakukan pembimbingan atau sosialisasi secara terus-menerus sehingga pengetahuan yang telah diperoleh tidak hilang atau dilupakan.

e. Terbentuknya Kelompok-Kelompok Pemberdayaan Secara Mandiri.

Dengan terbentuknya kelompok-kelompok pemberdayaan secara mandiri dapat dipastikan bahwa masyarakat atau umat telah mampu menerima dan melaksanakan proses pemberdayaan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah kelompok umat yang mampu mengembangkan usaha-usaha seperti peternakan babi, kelompok penenun, kelompok Pijar (Persehatian Pelajar), kelompok pemasaran hasil-hasil pemberdayaan di Rumah Estribi, kelompok tani di beberapa lingkungan (KUB) dan lain sebagainya. Dengan teridentifikasinya kelompok-kelompok ini bisa dipastikan bahwa kegiatan pemberdayaan membawa dampak positif bagi pengorganisasian kelompok masyarakat. Timbulnya semangat gotong royong dan rasa solidaritas, kesadaran, komitmen, afeksi, kekuatan modal sosial dan saling

memotivasi di antara mereka yang sangat kuat, bisa dikatakan bahwa indikator ini berhasil.

f. Mampu Membuka Lapangan Pekerjaan Bagi Orang Lain.

Dampak dari pemberdayaan atau pelatihan keterampilan yang telah dan yang sementara berlangsung membawa dampak positif bagi pengembangan usaha ekonomi (industri rumahan). Misalnya dampak bagi pertanian lahan kering, peternakan babi dan tenun ikat yang telah dikembangkan di rumah-rumah warga secara mandiri dan industri rumahan tersebut telah merekrut para pekerja meskipun dalam jumlah sangat kecil. Itu berarti bahwa sumber daya alam lokal sudah dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomis tinggi dan sumber daya manusianya mulai diperhitungkan. Komunitas lokal telah merasakan dampak dari pengembangan produk lokal yakni dapat memenuhi kebutuhan hidup secara gampang karena harga produk lokal yang sudah bersaing di pasaran. Saat ini umat berlomba-lomba untuk membangun kemandirian melalui produk lokal. Dengan adanya kesadaran umat untuk mendirikan industri rumahan sendiri dengan memanfaatkan SDA lokal maka dapat dikatakan bahwa indikator ini berhasil.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 PROSES PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI (PSE) DI GEREJA PAROKI ST. PETRUS TUKUNENO.

Komisi PSE/PPSE/SSP (Sosek) adalah lembaga kerasulan Gereja yang bervisi-misi untuk melayani seluruh umat KA dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Paroki St. Petrus Tukuneno melalui seksi sosial ekonominya terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan KPSE-KA jika ada kebutuhan-kebutuhan umat Paroki Tukuneno yang mendesak untuk diperhatikan terutama persoalan sosial kemanusiaan. Misalnya jika umat membutuhkan sosialisasi menyangkut pengembangan ekonomi, maka Seksi Sosek akan berkoordinasi dengan PPSE-KA untuk difasilitasi dalam pengadaan tenaga pelatih/penyuluh. Pastor UH, Pr dalam wawancara empat mata di ruang kerjanya menjelaskan bahwa KPSE/PPSE-KA hanya memfasilitas permintaan dari paroki-paroki yang mengajukan proposal jika mereka membutuhkan pendampingan. Ditegaskan pula bahwa pihak KPSE-KA tidak menyediakan dana bagi setiap permintaan yang diajukan, namun hanya menyediakan tenaga teknis. Dana untuk melaksanakan kegiatan pendampingan diatur oleh Gereja Paroki yang bersangkutan. Contohnya kegiatan pengolahan tempe dan tahu yang pernah digagas oleh OMK Tukuneno, semua alat dan bahan atau dana harus disiapkan oleh OMK, kemudian pihak SSP (Sosek) akan berkoordinasi dengan Panitia PSE-KA untuk memfasilitasi tenaga penyuluh atau pelatih, jasanya pun akan dibayarkan oleh OMK Paroki Tukuneno. Untuk kegiatan

yang bersifat permintaan khusus, maka Gereja Paroki yang bersangkutan yang harus menyediakan biaya operasionalnya, kecuali kegiatan-kegiatan pelatihan yang masih ada hubungan dengan program strategis seperti bertani, beternak atau pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan maka akan difasilitasi oleh KPSE karena ada LSM Internasional yang masih bekerja sama.

Dalam pelaksanaan program-program strategis, mulai dari awal perencanaan program selalu ada rapat koordinasi. Misalnya penyusunan kalender kerja PSE untuk masa kerja satu tahun. Berbagai pihak yang berkepentingan dalam setiap program prioritas diundang untuk menyusun kalender pastoral PSE yang dipimpin oleh Uskup Atambua. Semua Pastor Paroki bersama DPP-nya diundang hadir juga untuk menyampaikan kebutuhan dan masalah yang dihadapi dalam menjalankan program-program PSE. Seksi Sosial Ekonomi paroki-lah yang paling memahami kebutuhan di lapangan karena merekalah yang langsung berhadapan dengan umat atau komunitas akar rumput di wilayah kerjanya.

“Komisi PSE hadir sebagai Animator yang berfungsi sebagai lembaga yang memberi pencerahan wawasan kepada umat tentang bagaimana mengembangkan potensi-potensi lokal yang belum tergali untuk kepentingan kehidupan sosial dan ekonomi. KPSE tidak memiliki dana untuk proyek pengembangan kegiatan pemberdayaan. Biasanya Gereja Paroki secara otonom yang merencanakan suatu kegiatan pemberdayaan atau kegiatan pencerahan ekonomi, mengundang KPSE bersama PPSE untuk difasilitasi jalannya kegiatan. KPSE hanya memfasilitasi tenaga teknis atau tenaga pelatih menurut rancangan proposalnya, misalnya penyuluhan pertanian atau kursus menjahit maka KPSE akan mengirim tenaga penyuluh yang dimaksud namun KPSE tidak menyediakan dana bagi jalannya kegiatan. Jalinan kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau Desa akan dilakukan jika misalnya tenaga pelatih yang diminta tidak ada atau tidak sesuai dengan kompetensi. Pemerintah akan bersedia memfasilitasi permintaan yang dimaksud karena pemerintah juga memiliki

kepentingan dalam memberantas kemiskinan”. (Wawancara dengan Rm. UH, Pr pada tanggal 3 Desember 2018)

Dalam perencanaan program kerja, kegiatan-kegiatan yang diusulkan adalah program pengentasan kemiskinan harus di-sah-kan oleh Uskup Atambua, sehingga uskup juga dapat memantau jalannya kegiatan itu mulai dari awal hingga hasil yang dicapai. Saling koordinasi antar pastor paroki kepada Uskup Atambua akan selalu dilaporkan selama kegiatan berjalan. Sekretaris KPSE yang bertugas mengontrol jalannya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan di Gereja-Gereja paroki akan melaporkan hasil temuannya kepada uskup dan KPSE dalam sidang evaluasi setiap semester.

5.2 KONTRIBUSI PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI (PSE) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI WILAYAH GEREJA PAROKI ST. PETRUS TUKUNENO.

Komisi PSE Keuskupan Atambua mendukung pengentasan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan teknis seperti bidang pertanian, peternakan, perikanan, lembaga keuangan mikro atau credit Union, wirausaha dan industri. Melalui program prioritas/strategis yang masih berjalan dengan dukungan dana dari Pemerintah RI (Kementerian terkait), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, LSM-LSM lokal dan internasional diharapkan dapat berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah kerja KA termasuk di wilayah Gereja St. Petrus Tukuneno.

“Dalam memberantas kemiskinan, KPSE bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Desa serta LSM-LSM lokal dan internasional sehingga dapat meringankan langkah untuk satu tekad dan motivasi memberantas penyakit sosial ini. Untuk mengentaskan kemiskinan ada enam program strategis yang sedang berjalan” (Wawancara dengan Rm. UH, Pr pada tanggal 3 Desember 2018)

Secara umum ada 6 program strategis yang telah dan sementara dilaksanakan oleh PPSE-KA dengan bantuan kerja sama dari beberapa LSM nasional dan Internasional di seluruh wilayah administrasi Keuskupan Atambua. Seluruh kegiatan pemberdayaan dapat dilihat di halaman lampiran. Secara umum 6 program strategis yaitu Tanggap Darurat, Pertanian Lahan Kering, Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih, Advokasi dan Pemberdayaan dan Peternakan Babi.

Sementara program pemberdayaan yang sementara dilakukan di wilayah administrasi Gereja Paroki Tukuneno selama tahun 2018 yakni Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Profesional bagi OMK (Pelatihan Pembuatan Tahu, Tempe dan Susu Kedelei), Pelatihan Pengembangan Ternak Babi, Pengembangan Pertanian Lahan Kering, Pemberdayaan Kelompok Tenun Ikat, Diklat Pembuatan Rosario, Diklat Pengelolaan Keuangan Dalam Rumah Tangga dan Ekonomi Kreatif OMK Tukuneno di Rumah Coffe-Estri.

5.3 HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH GEREJA PAROKI ST. PETRUS TUKUNENO DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI (PSE)

Hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan program-program prioritas PSE sangat kompleks. Setiap program dengan cerita prosesnya masing-masing dan bersifat kasuistik karena setiap kelompok dengan kapasitas SDM anggota dan lingkungan sosial budaya yang berbeda-beda. Dalam wawancara dengan ketua PSE-KA, Pastor UH, Pr., beliau sangat menyayangkan sikap masyarakat sasaran yang sangat dangkal menghayati

dan menerima pelayanan dari tim PSE-KA. Pada umumnya masyarakat sasaran menganggap dan menilai kehadiran tim Panitia PSE-KA sebagai lembaga yang membagi-bagi uang secara cuma-cuma ketika masyarakat datang dan menghadiri undangan sosialisasi yang diadakan oleh tim PSE-KA. Masyarakat menganggap LSM yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial memiliki dana yang kuat sehingga tentu kehadiran LSM dinilai sebagai sebuah kesempatan untuk dapat “uang proyek” dan “uang duduk”. Pastor UH sangat menyayangkan pemahaman masyarakat yang keliru ini, karena sebenarnya kehadiran program-program prioritas PSE-KA bukan program “bagi-bagi uang” tetapi sebenarnya kehadiran tim PSE-KA adalah moment untuk memperbaiki sistem mata pencaharian masyarakat yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Perlu diketahui bahwa KPSE-KA dengan segala macam programnya hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat sasaran agar mereka semakin menyadari kondisi mereka dan semakin sigap dan siap untuk menghadapi segala perubahan jaman dan kondisi iklim dan cuaca yang semakin berubah tak menentu. Sebenarnya misi, visi, nilai dan mandat PSE-KA secara garis besar menginginkan perubahan mindset dan mental masyarakat yang harap “instan” sehingga program-program prioritas dapat berhasil dan mengena pada situasi dan kondisi serta kebutuhan mereka sehingga masalah kemiskinan dan kesenjangan dapat diatasi. Tranfer pengetahuan adalah misi terbesar PSE-KA karena tanpa pengetahuan maka masyarakat sasaran tidak akan mampu menghadapi segala tantangan jaman. Misalnya tantangan program pertanian lahan kering yang dikerjakan PSE-KA dengan menggandeng CRS sebagai lembaga donornya, partisipasi

masyarakat adalah tantangan yang tidak gampang diatasi karena mental dan kemauan masyarakat yang cenderung lebih suka mengkritik dan menikmati hasil ketimbang melakukan/menjalankan proses yang rumit. Mental seperti ini yang perlu diubah terlebih dahulu sebelum anggaran dana dikucurkan ke kelompok sasaran.

“Masyarakat terkadang terjebak dalam pemahaman yang keliru bahwa yang nama kegiatan yang melibatkan banyak orang berarti tentu banyak dana. Masyarakat menilai tim PSE yang turun ke lokasi akan membagi-bagi dana bantuan berupa uang tunai. Pemahaman ini membuat dampak kegiatan pemberdayaan tidak membawa nilai tambah bagi skill dan pengetahuan mereka. Pola pikir mereka yang salah terhadap program membuat tim PSE terus-menerus mendampingi mereka sampai habis masa kontrak program. Ketergantungan terhadap pendampingan dan kontrol ini dapat dipastikan bahwa program belum berhasil mengentaskan masalah kemiskinan. Mental instan ketimbang melewati proses inilah yang terus-menerus disadarkan oleh tim PSE. Dahulu pastor Barat (Eropa) sering memberi bantuan langsung kepada umat berupa beras dan uang tunai untuk membantu mereka yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan namun dampaknya sangat buruk yakni masyarakat malah tergantung pada bantuan bukan berusaha menanam padi untuk mendapatkan beras. Sekarang sudah beda, masyarakat diberikan pengetahuan keterampilan untuk sendiri mengelola lahannya untuk bisa makan dan minum dari hasil pekerjaannya sendiri”. Wawancara dengan Rm. UH, Pr pada tanggal 3 Desember 2018.

Sementara untuk komunitas anak muda di Tukuneno menurut pengamatan peneliti sangat kompleks karena secara psikologis, anak-anak muda yang sementara bertumbuh dalam jati dirinya sedang giatnya mencari sesuatu pekerjaan yang lebih cocok dengan kepribadiannya. Akibatnya segala kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh tim Sosek terkesan “sambil lalu” akibat sikap acuh tak acuh. Untuk segala hambatan dalam setiap program pemberdayaan bagi OMK Tukuneno dapat dilihat pada halaman lampiran.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi di paroki-paroki dalam KA adalah kerasulan PSE belum menjadi kesadaran dan kerja sama kristiani di tingkat paroki. Pastor paroki sebagai animator kerasulan sosial belum sepenuhnya menggerakkan umatnya agar kerasulan PSE terlaksana dalam seluruh kehidupan umat di paroki. Bahkan, sebagian pastor paroki masih berpikir bahwa kerasulan PSE adalah tugas dan tanggung jawab Komisi PSE.

Salah satu staf PPSE yang bersaksi bahwa hambatan lain yang dihadapi LSM-LSM yang bekerja sama dengan KPSE-KA seperti CRS dan lain-lain adalah undangan sosialisasi bagi masyarakat yang terkadang tidak diindahkan dan sikap acuh tak acuh sehingga terkadang pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Tantangan lainnya adalah bertabraknya kegiatan LSM-LSM dengan urusan adat-istiadat yang terjadi di kampung seperti acara adat, pesta nikah, kematian, pesta sakramen Gereja dan urusan-urusan lain yang menyangkut adat-istiadat. Selain itu mindset masyarakat desa yang cenderung mengagungkan mobilisasi pekerjaan merantau keluar daerah atau negeri lebih menjanjikan ketimbang bekerja di desa sendiri. Tantangan ini membuat tim LSM-LSM tidak mampu berbuat banyak untuk kesejahteraan masyarakat karena seringkali yang selalu hadir untuk kegiatan sosialisasi hanyalah para orang tua yang sudah lanjut usia. Kendala lain adalah perubahan iklim yang tidak menentu dalam aktivitas bertani sehingga terkadang hasil pertanian cenderung tidak memuaskan sementara pengetahuan yang diberikan oleh LSM CRS dirasa cukup untuk dipraktekkan.

“Banyak sekali hambatan yang kami hadapi di lapangan. Masyarakat memiliki banyak sekali urusan yang menghalangi kegiatan-kegiatan kelompok. Misalnya sikap masyarakat sasaran yang sangat dangkal menghayati dan menerima

pelayanan dari tim PSE-KA. Mereka menilai kehadiran tim Panitia PSE-KA sebagai lembaga yang membagi-bagi uang secara cuma-cuma. Terkaang undangan sosialisasi bagi masyarakat tidak diindahkan dan sikap acuh tak acuh sehingga pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu. Bertabraknya kegiatan LSM-LSM dengan urusan adat-istiadat yang terjadi di kampung seperti acara adat, pesta nikah, kematian, pesta sakramen Gereja dan urusan-urusan lain. Mindset masyarakat cenderung mengagungkan mobilisasi pekerjaan merantau keluar daerah atau negeri lebih menjanjikan ketimbang bekerja di desa sendiri. Seringkali hadir untuk kegiatan sosialisasi hanyalah para orang tua yang sudah lanjut usia. Perubahan iklim yang tidak menentu dalam aktivitas bertani sehingga hasil pertanian cenderung tidak memuaskan". (Wawancara dengan Bapak Wly pada tanggal 12 Desember 2018)

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut tim PPSE bekerja sama dengan semua stakeholder baik itu pemerintah Desa, para ketua kelompok sasaran dan para pendamping untuk mencari alternatif jadwal lain. Misalnya agenda pertemuan yang bertabrakan dengan acara adat atau acara keluarga (kampung) maka dicari hari penggantinya setelah semua urusan adat selesai melalui mekanisme musyawarah. Tentang mindset masyarakat yang salah menilai kehadiran tim PPSE dan mental masyarakat yang cenderung mengagungkan pekerjaan merantau lebih menjanjikan, diatasi melalui sistem sosialisasi atau penyadaran terus-menerus melalui setiap kesempatan pertemuan sehingga dapat memberi pemahaman akan visi dan misi Gereja Katolik melalui tim PPSE.

Uskup Atambua dalam setiap kesempatan pertemuan dengan dewan imam dan seluruh pastor paroki di Emaus-Nenuk-Kota Atambua selalu juga menghidupkan kesadaran para imam tentang motto tahtisan uskup, visi dan misi keuskupan sehingga para imam sungguh-sungguh menjalankan suara uskup sehingga umat yang digembalakan dapat merasakan kehadiran Gereja

Katolik dalam misi sosial kemanusiaan terutama terkait pelaksanaan visi dan misi Kerasulan PSE.

5.4 STRATEGI PENGUATAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI (PSE) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI WILAYAH GEREJA PAROKI ST. PETRUS TUKUNENO.

Penguatan kelembagaan KPSE-KA lebih kepada bagaimana menata manajemen atau pengelolaan organisasi secara profesional dalam internal organisasi agar visi dan misi yang sudah dirumuskan dapat tercapai dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Gereja Katolik dengan ajaran sosial Gerejanya yang menjiwai Kerasulan PSE tentu sebagai salah satu syarat kuat kepercayaan publik terhadap KPSE-KA. Namun, perlu terus ditingkatkan kinerja dan manajemen keorganisasian sehingga lembaga ini tetap kuat dan semakin eksis dalam memberantas kemiskinan.

Dalam wawancara dengan ketua PPSE-KA, beliau menjelaskan hal yang sederhana bahwa sebenarnya KPSE-KA berdiri kokoh berkat para donatur yang terus memberikan sumbangan sebagai rasa solidaritas mereka terhadap saudara-saudara yang miskin dan papah. Para donatur yang hampir sebagian besar berasal dari luar negeri telah membantu KPSE-KA dalam bentuk dana untuk pengelolaan kelembagaan sekaligus bagi operasional program-program prioritas.

“Lembaga PSE-KA tidak memiliki uang atau dana untuk membantu masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Kecuali setiap tahun secara terus-menerus LSM-LSM internasional mendonorkan dana untuk Gereja Katolik melalui Komisi PSE maka sudah pasti kekuatan lembaga akan mampu merancang program-program yang tepat sasaran bagi pengentasan masalah kemiskinan. Gereja Katolik memiliki kekuatan untuk merubah mindset umat agar menyadari kemiskinan sebagai masalah yang

bisa menimpa siapa saja. Gereja melalui KPSE sudah sangat terorganisir dan tersistem keorganisasiannya, namun perlu untuk meningkatkan kepercayaan di mata masyarakat dan LSM pendonor sehingga mampu membuktikan pelaksanaan visi dan misi PSE". (Wawancara dengan Rm. UH pada tanggal 3 Desember 2018)

Penguatan kelembagaan PSE ditingkatkan melalui faktor internal organisasi dan faktor eksternal atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Pada umumnya suatu lembaga atau organisasi menguatkan kelembagaannya berdasarkan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang belum mencapai target. Segala hal yang belum mencapai target berdasarkan visi, misi, mandat dan nilai-nilai telah diidentifikasi oleh Tim PPSE seperti:

a. Faktor Internal

Faktor internal ini menjadi arah dasar bagi KPSE dan kepanitiannya serta seksi Sosek (SSP) Tukuneno untuk semakin memperkuat kelembagaannya agar semakin terpercaya dan semakin loyal dalam pelayanan kepada masyarakat marginal. Faktor itu seperti a) Meningkatkan kemandirian lembaga melalui perbaikan kemampuan desain Program/*Design Project* dan pengelolaan lembaga (Keuangan, manajemen organisasi, pendanaan khusus (*funrecing*)), b) Meningkatkan kapasitas advokasi berbasis pengorganisasian kelompok marginal dan c) Merevisi SOP yang sekarang sudah ada seperti program, keuangan, kepegawaian dan administrasi.

b. Faktor Eksternal

Sedangkan faktor eksternal atau isu-isu yang berkembang luas di masyarakat adalah landasan yang digunakan KPSE dan kepanitiannya

serta seksi Sosek (SSP) Tukuneno untuk dapat menyusun rencana program pendampingan dan pemberdayaan yang sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat marginal. Faktor itu seperti: a) Meningkatkan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat marginal untuk mendorong perubahan, b) Mendorong perubahan kebijakan untuk pro masyarakat marginal dan gender, c) Mendorong kerja sama jaringan untuk melakukan advokasi terhadap hak-hak kaum marginal, d) Mendorong kerja sama dalam semangat persekutuan untuk membangun perdamaian dan mengurangi konflik dan d) Meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat yang mengalami kekerasan dan terkena bencana.

Beberapa isu yang disinyalir membuat masyarakat marginal semakin terpinggirkan atau tidak mendapat perhatian telah diidentifikasi oleh Komisi PSE dan kepanitiannya serta seksi Sosek (SSP) di seluruh paroki sehingga dapat digunakan untuk menyusun program pendampingan dan pemberdayaan yang tepat sasaran sehingga dapat melindungi masyarakat marginal dari perlakuan yang tidak memihak pada kesejahteraan mereka. Tujuan-tujuan dan solusi yang ditetapkan atau dirancang dan diharapkan dapat melindungi masyarakat miskin dari perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Beberapa isu itu seperti terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Isu Strategis, Tujuan Dan Solusi

Isu Strategis	Tujuan	Solusi
Kurangnya pendampingan dan rendahnya pelayanan kepada masyarakat marginal.	Meningkatkan kapasitas kaum marginal baik kualitas maupun kuantitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah lembaga donor dengan Program kerja jangka panjang. - Pendamping lapangan tinggal bersama dengan masyarakat di Desa (<i>Leave-in</i>).
Pola hidup masyarakat dalam mengolah sistem pertanian, ekonomi, sosial budaya masih bersifat tradisional.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi tepat guna dan pemanfaatannya untuk kehidupan ekonomi keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah lapangan dilaksanakan di setiap desa. - Pertemuan reguler dengan dinas teknis dan DPRD. - Monitoring bersama dengan Dinas teknis dan DPRD. - Publikasi media tentang kegiatan inovatif.
Pola pendampingan dari setiap NGO terhadap kaum marginal masih bersifat karitatif.	Membangun kesadaran masyarakat tentang peran serta kehadiran NGO di tingkat desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Sharing Program bersama antar NGO - Jadwal diskusi rutin antar NGO - Pendampingan masyarakat secara rutin.
Masih ada kesenjangan dalam tatanan sosial masyarakat.	Meningkatkan rasa solidaritas dan cinta damai antara anggota masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya kelompok-kelompok tani di tingkat desa. - Kerja gotong royong terbangun di tingkat desa.
Masyarakat di daerah rawan bencana sulit dijangkau dan kurang mendapat layanan publik.	Mendekatkan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat di daerah sulit dan rawan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> - Penghijauan bersama daerah rawan bencana. - Terbentuknya team tanggap darurat tingkat desa. - Ada tanda peringatan dini di tingkat desa.

(Sumber: Rencana Strategis Periode 2014-2019 PPSE-KA)

c. Analisis Kekuatan dan Kelemahan, Peluang dan Ancaman untuk Penguatan Kelembagaan PSE/Seksi Sosial Gereja Paroki (SSP/Sosek) St. Petrus-KA.

Analisa kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman ini bersifat deskriptif. Analisa ini berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan

menurut kontribusinya masing-masing yang dapat digunakan KPSE untuk dapat menguatkan kelembagaannya.

❖ **Analisis Internal**

Tabel 5.2 Analisis Internal

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur ada sesuai dengan pembagian kerja • Kepengurusan aktif • Management baik dalam arti ada keterbukaan. • Staff bekerja sesuai tugas 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada JOB Desk • Belum ada staf Monev karena masih merespons Proyek dari pada lembaga • Belum ada pertemuan rutin antara pendiri, pengurus dan staf untuk melihat capaian lembaga selama setahun.
SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Staf PPSE memiliki SDM dan pengalaman kerja yang baik, Semangat belajar dan motivasi yang tinggi. • Jiwa pengabdian pada komunitas (Tinggal di Desa). • Pengalaman bekerja di wilayah konflik. • Pelayanan yang melibatkan, mencerdaskan dan menghidupkan. • PPSE bekerja dengan hati untuk meningkatkan pelayanan. • Ada dukungan dari para Donatur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada staf yang belum maksimal dalam menyelesaikan tugas. • Belum ada peningkatan kapasitas yang teratur/sistimatis. • Pendampingan dengan kaum marginal sangat singkat bergantung pada Program.

Lanjutan Tabel 5.2

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
Keuangan, Pendanaan dan Asset Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sumber pendanaan dari Program yang jelas. • Menejemen keuangan sesuai kebutuhan mitra. • Punya asset organisasi. • Laporan keuangan tertulis dan tersimpan dengan rapi. • Gaji staff sesuai standar UMR Provinsi NTT. • Hasil Audit baik. • Staff keuangan trampil dalam pengelolaan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum punya dana sendiri (Private sector). • Pendanaan tergantung donor. • Tidak punya pendanaan inti (<i>core funding</i>) • Belum punya penggalangan dana (<i>fund raising</i>)
Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan komponen evaluasi dan monitoring secara teratur. • Rapat bulanan yang dibuktikan dengan agenda dan notulensi. • Monev dibuat berdasarkan data lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi, tergantung kesibukkan program. • Belum punya staf monev tetap.
Legalitas	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada Akta Notaris • Memiliki NPWP. No NPWP PPSE-KA : 01.414.9728.92200 0 	<ul style="list-style-type: none"> • Akta perlu diperbarui. • Belum terdaftar di KEMENKUMHAM RI • Belum tercatat di KESBANGPOL
Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah mempeoleh data dan informasi. • Punya akses inSformasi terhadap layanan perempuan dan anak, dan masalah sosial lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data-data belum tersedia secara detail.

Lanjutan Tabel 5.2

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • PPSE membangun jejaringan dengan LSM lokal, kepolisian, DPRD Kabupaten, PEMDA-Belu, NGO International, Jaringan Lintas Agama, Pers dan unsur terkait lainnya. • PPSE adalah Lembaga Gereja yang terpercaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada jadwal pertemuan rutin.

(Sumber: Rencana Strategis Periode 2014-2019 PPSE-KA)

❖ Analisis Eksternal

Tabel 5.3 Analisis Eksternal

ASPEK	KESEMPATAN / PELUANG	ANCAMAN
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat membutuhkan pendampingan yang intensif. • Masyarakat siap menerima perubahan. • Adanya kelompok-kelompok pemberdayaan di kabupaten Belu. • Kerja sama baik dengan unsur Lintas Agama. • Masyarakat mulai sadar untuk kerja kelompok. • Masyarakat ingin belajar hal baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periode Program yang pendek. • Adanya pola pikir yang salah dari masyarakat tentang program. • Kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih rendah. • Masih ada masyarakat yang bekerja secara individu. • Kebijakan atau keputusan dalam musyawarah masih didominasi oleh kaum laki-laki. • Daerah-daerah rawan bencana dan terpencil jarang dan atau belum dijangkau oleh LSM Lokal dan LSM International.

Lanjutan Tabel 5.3

ASPEK	KESEMPATAN / PELUANG	ANCAMAN
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rekomendasi dari Pemerintah mulai dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat marginal • Adanya dukungan dari DPRD Belu • Ada kepercayaan dari Pemerintah terhadap PPSE dalam pendampingan kepada masyarakat. • Hubungan kerja yang baik dengan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kebijakan yang memperkuat Program. • Hubungan LSM lokal dan pemerintah masih rendah. • Belum ada dukungan teknis dari SKPD terhadap Program yang di jalankan • Alokasi anggaran masih kecil untuk <i>Pro Poor</i> dan <i>Responsif Gender</i>.
Dana & Donor	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Lembaga Donor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai dana tetap. • Minimnya lembaga Donor yang membuka akses ke Kab. Belu. • Intervensi LSM ke Kab. Belu masih kurang.

(Sumber: Rencana Strategis Periode 2014-2019 PPSE-KA)

d. Penguatan Pada Aspek Struktur, Kepemimpinan, Pelayanan, Fungsi/Peran, Kinerja, Keuangan, Tata Kelola dan Sumber Daya dan Modal Sosial.

Melalui penguatan kapasitas kelembagaan KPSE, PPSE dan Seksi Sosek Paroki Tukuneno, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari lembaga-lembaga pendonor sehingga Gereja Katolik-KA dapat berkontribusi bagi penanganan masalah kemiskinan di wilayah

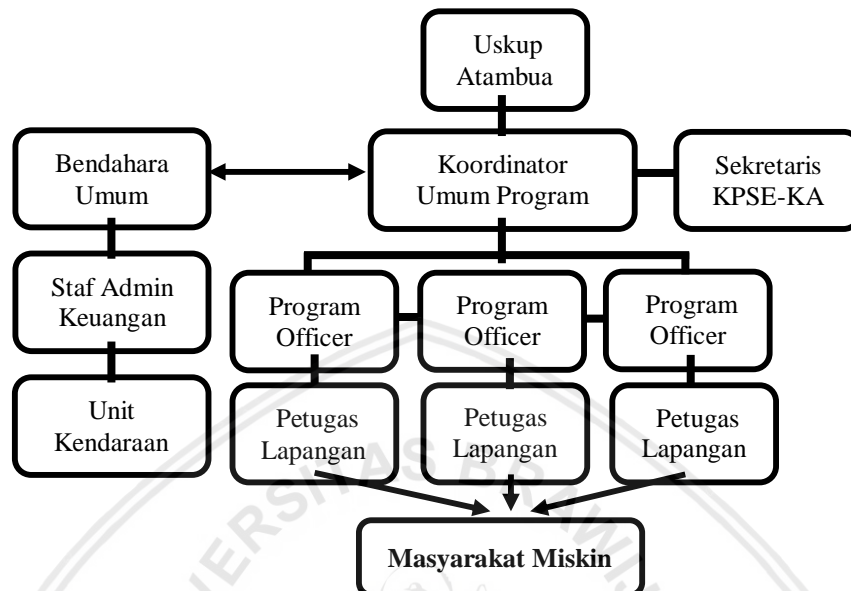
pastoralnya. Pengelolaan kelembagaan yang transparan, akuntabel, sumber daya yang kuat, struktur keorganisasian yang jelas, tata menajemen kelembagaan yang ketat dan disiplin, kinerja dan pelayanan yang royal dan mengummat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari lembaga pendonor untuk terus memberi sumbangan dana untuk keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan.

1. Efisiensi Struktur

Lembaga pemberdayaan masyarakat yang kuat adalah lembaga yang *establish* yakni lembaga yang mampu membentuk struktur hierarkhi keorganisasian yang jelas dan terjalin interaksi koordinasi yang saling mendukung sehingga kelancaran pelaksanaan rencana visi, misi, mandat dan nilai-nilai yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik terlebih kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran program dapat terpenuhi.

Dalam kelembagaan KPSE-KA terdapat struktur yang jelas. Hal ini dapat dibuktikan dari sturuktur hierarki keorganisasian berikut.

Struktur Organisasi PPSE-Keuskupan Atambua Periode 2017-2021



Gambar 5.1 Struktur Organisasi Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi (PPSE)-KA Periode 2017-2021

2. Kepemimpinan

Seorang pemimpin yang menahkodai suatu lembaga atau kelompok merupakan tugas yang besar karena peran dan fungsinya sangat kompleks, bisa jadi fungsi kontrolnya sampai pada hal yang di luar tugas dan tanggungjawabnya. Seorang pemimpin harus mampu melaksanakan seluruh visi dan misi lembaganya melalui kinerja para stafnya sehingga keberhasilan program dapat mencapai target. Pastor UH, Pr, selain sebagai ketua Panitia PSE-KA juga merangkap sebagai Pastor Paroki Gereja Tukuneno sehingga tampak sibukannya dalam menjalankan tugasnya. Dalam memimpin seksi sosial ekonomi di Gereja Paroki Tukuneno dan PPSE-KA, beliau sangat mempercayakan para stafnya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara mandiri tanpa harus banyak

berkoordinasi jika masalah atau tantangan di lapangan mendesak untuk diselesaikan. Jika mendesak maka keputusan dapat diambil oleh stafnya. Para staf diyakini memiliki keahlian di bidangnya sehingga Pastor UH sangat meyakini bahwa apapun tantangan di lapangan dapat di atasi oleh para staf.

Dalam wawancara dengan Bapak WLY salah satu senior PPSE-KA, menuturkan bahwa Pastor UH sangat mempercayai para stafnya dalam segala urusan karena beliau yakin kompetensi staf ketika direkrut sudah sesuai dengan keahliannya sehingga tidak perlu dikontrol ketika berhadapan dengan permasalahan di lapangan.

3. Pelayanan

Banyak pengakuan dari masyarakat akar rumput yang menjadi kelompok sasaran visi dan misi Kerasulan PSE bahwa pelayanan yang diberikan oleh seksi sosial ekonomi paroki Tukuneno cukup baik karena seksi ini mampu mengenali konteks masyarakat melalui pola pendekatannya sesuai keinginan masyarakat. Kerasulan PSE Tukuneno dinilai cukup profesional karena mampu mengenali permasalahan masyarakat dan mampu menyelesaikannya, mampu melakukan pendekatan yang tepat karena dasar dari pelayanan dalam Gereja Katolik kepada umatnya adalah cinta kasih tanpa memandang suku, agama dan struktur sosial. Siapapun yang membutuhkan bantuan akan diusahakan untuk diperhatikan.

"Kami senang karena Tim PPSE bersama aparat Pemerintah Desa bisa hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan melalui tokoh adat dan tokoh masyarakat secara pribadi bahkan sanggup tinggal bersama masyarakat selama

bertahun-tahun untuk memantau perkembangan program. Tinggal dekat dengan masyarakat itu tanda bahwa tim PPSE sangat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati dengan masyarakat. Selama ini kami hanya diberikan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Belu tetapi itu hanya sebatas bantuan yang kini telah selesai dan tidak ada tindak lanjutnya. Kami sangat puas dengan perhatian Gereja melalui tim ini”(Wawancara dengan Bapak YT, Tanggal 13 dan 14 Desember 2018)

Konteks pelayanan kerasulan PSE adalah bidang sosial dan ekonomi, indikator pelayanannya adalah ketika hak ekonomi masyarakat tidak terpenuhi atau terabaikan. Sebagai suatu lembaga pelayanan dalam Gereja, KPSE diperuntukkan bagi semua orang. Setiap orang dipanggil untuk menjadi rasul dalam pelayanan sosial. Setiap umat Kristiani harus menjadi pelaku karya kasih karena dia adalah murid Kristus (Yoh.13:35). KPSE dan jajarannya tidak melakukan monopoli dalam karya PSE, tetapi menurut tanggungjawabnya dalam kesatuan keputusan Gereja. Komisi PSE menjadi animator dan motivator utama dalam menggerakkan Umat Kristiani untuk mewujudkan solidaritas Kristiani menurut dimensi sosial ekonomi. Pastor paroki dan Seksi Sosek sebagai animator kerasulan sosial mempunyai tanggungjawab untuk menggerakkan umatnya agar kerasulan PSE terlaksana dalam seluruh kehidupan umat di Paroki.

4. Fungsi dan Peran/Kontribusi

a. Fungsi:

Menjadi animator yaitu memberikan penguatan kepada masyarakat untuk mampu menyuarkan hak-hak dasarnya dan

mengadvokasi hak-hak masyarakat kepada para pengambil kebijakan. Menjadi motivator yaitu mendorong masyarakat untuk mampu menggali dan menganalisa masalah-masalah sosial, mampu melihat potensi-potensi lokal dan mengembangkannya. Menjadi inspirator yaitu menjadi inspirator bagi masyarakat dalam upaya pemenuhan hak-hak dasarnya. Menjadi inovator yaitu membantu masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi-potensi lokal demi peningkatan mutu hidupnya.

b. Peran

Mengadvokasi dan memberikan pencerahan dalam menemukan gagasan baru lewat Kitab Suci, Ajaran Sosial Gereja, tradisi-tradisi Gereja, perkembangan riset dan teknologi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasarnya dan melibatkan, mengembangkan dan mencerdaskan masyarakat. (Sumber: Rencana Strategis PPSE-KA Periode 2014-2019)

5. Kemampuan Manajemen/Tata Kelola

Dalam pelaksanaan kegiatan program-program prioritas pada kelompok-kelompok sasaran, terlebih dahulu tim Sosial ekonomi mengidentifikasi masalah dan kebutuhan di lapangan baru kemudian merencanakan penganggaran kegiatan yang hendak dilakukan. Penelitian awal dilakukan untuk menghindari miskomunikasi antara LSM-LSM pendahulu yang mungkin belum menyelesaikan kontrak perogramnya dengan kelompok masyarakat pada sebuah lokasi. Jika

dalam kelompok sasaran tersebut telah lebih dahulu bekerja sama dengan LSM yang tidak bermitra dengan PPSE-KA maka tim sosial ekonomi paroki tidak akan merencanakan kegiatan pada kelompok masyarakat tersebut. Kemampuan menganalisa temuan itu penting sekali sehingga program pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh PPSE-KA tidak salah sasaran.

Kemampuan tim sosial ekonomi paroki dalam mengenali kelompok sasaran sangat baik karena tim ini dalam mengontrol dan mengavaluasi kelompok sasaran selalu tinggal bersama (*Live-In*) dengan masyarakat dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka mengenal secara baik karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Kemampuan *live-in* inilah yang membuat LSM-LSM Internasional sangat mempercayai kinerja PPSE-KA sehingga berdampak pada jalinan kerja sama yang berlangsung terus-menerus. Jalinan kerja sama LSM-LSM internasional dengan Gereja Katolik-KA terus digalakkan karena KPSE dianggap mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan.

6. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah SDM sebagai kriteria untuk membidangi setiap program prioritas. SDM mencakup deskripsi atau profil kualitas SDM. Profil tersebut mencakup latar belakang pendidikan, wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan, kemampuan manajemen konflik dan manajemen masalah dan memikirkan alternatif solusi serta mengambil keputusan

dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi.

Para staf yang dipercayakan untuk memantau dan melaksanakan program-program prioritas umumnya memiliki kualifikasi pendidikan sesuai bidangnya mulai dari yang tamat SLTA/SMK pertanian, D3 kesehatan hewan, sarjana pendidikan hingga sarjana magister pertanian. Mereka yang direkrut adalah orang-orang yang berkompeten dan telah memiliki pengalaman kerja dengan berbagai LSM sehingga diyakini dapat mengatasi persoalan di lapangan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh KPSE-KA, selalu dikoordinir oleh para pekerja sosial yang berkompeten dalam bidangnya. Dalam eksekusi program prioritas ke kelompok-kelompok sasaran, maka PSE-KA akan mengirimkan tenaga teknisnya yang berkompeten dalam bidangnya sehingga kegiatan yang dimaksud dapat berjalan sesuai rencana. Para pekerja sosial dari PSE-KA ini dikontrak dengan perjanjian kerja selama program PSE-KA berjalan. Jika habis masa kontrak maka para pekerja ini dapat memutuskan hubungan kerja dengan lembaga PSE-KA.

7. Kinerja

KPSE-KA sebagai lembaga kemanusiaan dari tahun ke tahun selalu membenahi diri dalam fokus pelayanannya kepada kaum miskin dan papah. Arah dasar PSE tahun 2018-2022 lebih berfokus

pada tema “*Melindungi Dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal*” dimana tema ini berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Masyarakat lokal pada tingkat komunitas akar rumput harus merasakan kinerja dan pelayanan kerasulan PSE agar program-program pemberdayaan dapat membebaskan masyarakat/umat prasejahtera dari persoalan kemiskinan.

Kinerja yang baik dinyatakan melalui efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan yang baik. Para staf Sosek di Paroki Tukuneno maupun di tingkat Keuskupan bekerja sebaik-baiknya agar masyarakat akar rumput dapat merasakan pelayanan Gereja. Contoh program prioritas pertanian lahan kering sangat membantu masyarakat karena masyarakat diajarkan untuk bisa menghadapi perubahan iklim. Oleh karena kinerja yang baik dan bertanggungjawab inilah, KPSE-KA selalu dipercaya oleh LSM-LSM internasional untuk terus menjalin kerja sama.

8. Modal Sosial/Jaringan Kerja Sama dengan Pihak Luar

PPSE-KA telah membangun kemitraan dengan berbagai lembaga donor diantaranya: MISEREOR, CRS, OXFAM-GB, ACF, WFP, KARINA, TIFA, ILO, AusAID, BAKTI, SNV, PERDAKHI dan Yayasan BaKTI. Jaringan kerja sama yang diusahakan KPSE adalah bentuk kerja sama dalam hal support dana dalam kegiatan operasional sehingga seluruh program prioritas dapat berhasil sukses dalam mengentaskan persoalan kemiskinan masyarakat lokal.

Kerasulan PSE dalam jaringan kerja sama internal Gereja maupun eksternal dengan pemerintah dan organisasi non pemerintah (NGO) harus ditempatkan sebagai wujud solidaritas Kristiani untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia dan pengembangan potensi dan sumber daya dalam masyarakat. Untuk itu, kerasulan PSE sangat memperhatikan partisipasi masyarakat, disiplin pengelolaan, keterbukaan dalam tata kelola, bersih dan sistem pertanggungjawaban yang jelas.

Hubungan interaktif antara Gereja Katolik, Pemerintah Pusat dan daerah dan dengan LSM-LSM lokal dan internasional mutlak diperlukan dalam rangka misi bantuan sosial kemanusiaan. Apa lagi permasalahan kemiskinan adalah masalah bersama. Dalam usaha mengatasinya berbagai pihak perlu bergandengan tangan. Gereja Katolik tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, perlunya bantuan pihak lain. Komunikasi yang intens dalam bentuk dialog selalu dilakukan agar penyatuan ide dan gagasan program pengentasan kemiskinan dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat miskin.

9. Keuangan

Dana untuk operasional kegiatan program prioritas diperoleh dari Keuskupan sebanyak Rp. 15 juta/tahun dan lebih banyak suntikan dana dari LSM-LSM Internasional yang dapat mencapai miliaran rupiah. Dalam wawancara dengan ketua PSE KA, beliau menyatakan perasaannya dimana ia sangat menyayangkan dana

yang sangat terbatas dari pihak KA. Dana 15 juta rupiah itu tidak dapat dipakai untuk menggolkan semua program prioritas tetapi hanya dapat digunakan untuk operasional atau perjalanan ke lapangan untuk para staf untuk memantau jalannya kegiatan program. Untuk membantu komunitas akar rumput sangat mustahil diambil dari dana 15 juta. Beliau menangkap pesan atau makna dari dana 15 juta yang berasal dari uskup Atambua, bahwa PSE-KA harus mampu menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak asing atau LSM-LSM Internasional agar dapat menyumbang dana bagi kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

“Dana yang diberikan oleh Keuskupan kepada setiap komisi hanya sebesar 15 juta rupiah per tahun. Itu sangat mustahil digunakan selama 1 tahun bagi operasional kita. Uang itu tidak akan cukup membiayai keperluan lembaga KPSE. Untuk mencari tambahan dana maka dilakukanlah kerja sama dengan LSM-LSM lokal dan internasional yang memiliki visi dan misi yang sama dengan KPSE. Banyak LSM yang telah membantu kita, termasuk juga pemerintah pusat dan daerah”. Wawancara dengan Rm. UH, Pr pada tanggal 3 Desember 2018.

Dalam pengelolaan atau pertanggungjawaban keuangan, staf yang mengurus keuangan selalu memberi laporan secara berkala setiap akhir bulan, semesteran dan tahunan kepada ketua KPSE-KA, PPSE-KA, Uskup Atambua dan kepada LSM-LSM internasional dalam rapat pertanggungjawaban.

5.5 STRATEGI KOMISI PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI-KEUSKUPAN ATAMBUA (KPSE-KA) DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANJUTAN PROGRAM-PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN.

Pastor UH, Pr, menegaskan dalam wawancara bahwa strategi mempertahankan keberlanjutan program PSE yaitu dengan terus mem-*follow up* semua program yang pernah dilaksanakan sehingga tidak mandek atau mubazir. Komunikasi secara bertahap dan terus-menerus sebagai bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga pendonor akan tetap dilakukan untuk menjaga hubungan baik demi keberlanjutan program. Gereja lokal tidak memiliki dana cukup untuk melanjutkan program-program strategis yang sudah berjalan. Karena itu, dukungan dana dari berbagai pihak sangat dibutuhkan karena permasalahan kemiskinan adalah masalah bersama yang tidak akan habis diberantas.

“Lembaga PSE-KA tidak memiliki dana untuk membantu masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Kecuali setiap tahun LSM-LSM internasional mendonorkan dananya untuk Gereja Katolik melalui KPSE maka sudah pasti kekuatan lembaga akan mampu merancang program-program yang tepat sasaran. KPSE sudah sangat terorganisir dan tersistem keorganisasiannya, namun perlu untuk meningkatkan kepercayaan di mata masyarakat dan LSM pendonor sehingga mampu membuktikan pelaksanaan visi dan misi PSE”. (Wawancara dengan Rm. UH, Pr pada tanggal 3 Desember 2018)

Bapak WLY dalam penjelasan singkatnya juga mengatakan bahwa dalam kemitraan dengan lembaga pendonor untuk melaksanakan kegiatan prioritas memiliki jangka waktu. Waktu yang disepakati bermaksud untuk menilai seberapa jauh keberhasilan program dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di wilayah-wilayah sasaran. Biasanya durasi yang disepakati adalah 2-3 tahun kontrak dan setelah itu ada evaluasi dari tim

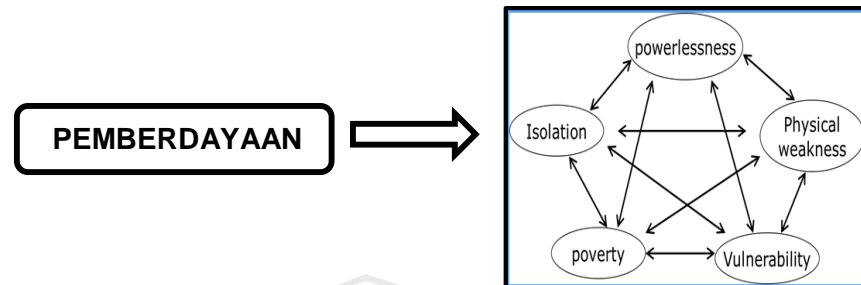
lembaga pendonor untuk melihat perkembangan dan hasil yang dicapai. Kontrak akan diperpanjang jika dianggap belum maksimal dalam pencapaian hasil dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Para pendamping lapangan juga akan menyesuaikan dengan kontrak kerja dengan lembaga pendonor dan dapat diperpanjang masa kontraknya jika masih dibutuhkan kinerjanya.

Program-program pertanian yang hampir seluruhnya dilaksanakan di desa-desa tentu akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. Sebelum melakukan sosialisasi program kepada kelompok tani telah lebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa untuk meminta persetujuan sehingga jelas. Bahwa ketika nanti LSM CRS selesai masa kontraknya, maka Pemerintah Desa yang akan melanjutkan program yang sudah dilakukan. Dampaknya positifnya akan juga dirasakan oleh pemerintah desa yaitu masyarakat akan hidup sejahtera lebih baik lagi karena lahan pertanian mereka menghasilkan panen meskipun di tanah yang kering dan tandus. (Wawancara dengan Bapak Wly pada tanggal 12 Desember 2018)

LSM-LSM yang berfokus pada bidang pertanian, kesehatan, air bersih dan sanitasi serta tanggap darurat akan melanjutkan programnya jika hasil pencapaian di kelompok sasaran belum mencapai target. Setelah selesai masa kontrak LSM dengan PPSE maka segala macam program yang telah dibuat oleh LSM melalui PPSE dengan kelompok sasaran akan dilanjutkan oleh dinas terkait dari Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Desa setempat. Contoh dalam bidang pertanian, maka PPL dari Dinas Pertanian Kabupaten yang akan mem*follow-up* kelompok tani sasaran agar keberlanjutan kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai dapat terus berjalan.

5.6 REKONSTRUKSI TEORI DAN PROPOSISI

a. Rekonstruksi Teori



Gambar 5.2 Konsep Pemberdayaan oleh Eddy Ch. Papilaya

Pertanyaan sederhana yang perlu dilontarkan terkait keberhasilan kegiatan pemberdayaan yang sudah dibahas di bab 4 adalah sudah berhasilkah kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut mampu membawa umat Gereja Paroki Tukuneno keluar dari lingkaran perangkap kemiskinan seperti yang dimaksud oleh Eddy Ch. Papilaya dalam Zubaeda (2013:24), dalam konsep hakekat pemberdayaan?

Jawabannya adalah bahwa masih dalam proses menuju kemandirian karena jika diukur dari 6 indikator keberhasilan yang diukur di atas masih ditemukan berbagai kekurangan dan kelemahan yang perlu ditingkatkan pengawasan dan pelaksanaannya seperti pada indikator pendapatan, kemandirian dan keberlanjutan sehingga umat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dinilai masih sangat rentan masuk dalam perangkap kemiskinan. Pendapatan yang kecil, kemandirian kelompok yang belum tercapai dan ketergantungan kepada pihak lain menandakan bahwa mereka sangat besar kemungkinan masuk dalam perangkap kemiskinan.

Solusi tepat yang perlu dilakukan terkait persoalan ini agar umat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yaitu; *pertama*, perlunya memperluas jaringan kerja sama seperti memperluas jaringan pemasaran untuk produk-produk pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan penjualan dan berdampak pada penghasilannya. *Kedua*, bahan-bahan dasar sumber daya alam lokal perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin namun bertanggungjawab dalam pelestariannya sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi umat. *Ketiga*, para pemangku kepentingan harus bertanggungjawab dalam pembinaan yang berkelanjutan bagi kelompok-kelompok umat yang sudah diberdayakan sehingga tidak terkesan “lepas tanggungjawab” sesaat setelah selasai proses pemberdayaan.

Menurut pengamatan peneliti, realitas yang terjadi di lapangan bahwa program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh KPSE bagi umat Gereja Tukuneno telah sedikit menekan angka kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan melalui program pemberdayaan peternakan babi dan tenun ikat yang secara fisik tampak berkembang sekali baik secara finansialnya (keuntungan) maupun secara keanggotaan yakni bertambahnya jumlah kelompok baru yang terus bertumbuh karena termotivasi oleh keberhasilan yang ditunjukkan oleh kelompok pemberdayaan sebelumnya. Umat secara sadar mengembangkan kelompok peternakan babi dan tenun ikat karena permintaan pasar yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Untuk sektor peternakan babi misalnya informasi yang diperoleh di lapangan bahwa usaha rumah makan se'i babi di kota Atambua serta RPH (Rumah Potong Hewan) membutuhkan babi

pedaging setiap hari kurang lebih 20 ekor dan itu pun tidak ada peternak yang mampu suplay. Selain itu kebutuhan babi pedaging untuk Negara Timor Leste setiap bulan 200 ekor juga tidak ada yang mampu suplay. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh umat Tukuneno untuk menjawab kebutuhan pasar sehingga telah mendatangkan keuntungan ekonomis bagi kelompok peternakan babi. Keuntungan yang diperoleh dari sektor peternakan babi ini yakni sebesar 80 % sedangkan 20 % disetorkan ke KPSE sebagai lembaga yang menyediakan kandang, bibit babi dan pakan. Contohnya jika 1 ekor indukan babi beranak 10 ekor anak babi maka 8 ekor akan menjadi hak milik anggota kelompok peternak sedangkan 2 ekornya disetorkan ke KPSE. 8 ekor anak babi yang hak milik kelompok bisa dipelihara atau bahkan bisa dijual tergantung keputusan kelompok. Untuk diketahui bahwa harga 1 ekor anak babi (umur 3 bulan) di pasaran NTT sebesar 1 juta rupiah sedangkan yang berumur 2 tahun ke atas sebesar 5-6 juta rupiah.

Sementara pada program pemberdayaan tenun ikat, dengan adanya peluang pasar yang begitu menjanjikan dimana ada kebijakan Pemerintah Daerah NTT yang mewajibkan para PNS dan pegawai swasta termasuk siswa sekolah-sekolah (SD, SLTP dan SLTA) untuk wajib menggunakan pakaian adat pada hari Kamis. Kebijakan ini telah diperdakan sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Kebijakan inilah membuat umat Gereja Tukuneno berlomba-lomba untuk membentuk kelompok tenun ikat untuk memenuhi permintaan konsumen. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan 1 lembar kain tergantung kerumitan motifnya dan bahan pembuatannya. Modal yang digunakan untuk

membuat kain tenun berkisar 200-300 ribu rupiah. Biasanya harga 1 lembar kain tenun dengan motif yang sederhana sebesar 1 juta rupiah sementara dengan motif yang tergolong rumit bisa sebesar 3 sampai belasan juta rupiah. Proses pembuatan 1 lembar kain tenun agar cepat selesai tergantung kesibukan pribadi si penenun, bisa 1 hingga 3 bulan. Jika penenun fokus dengan tenunan tanpa ada kesibukan lainnya maka kain akan cepat selesai dibuat. Dengan patokan harga yang cukup tinggi bisa dipastikan dapat mensejahterakan umat yang terlibat dalam pemberdayaan ini. Untuk menjual kain tenunan biasanya dilakukan secara bersama-sama (penjualan bersama) di Rumah Coffe Estribi Tukuneno sehingga kesepakatan harga yang ditetapkan dapat menguntungkan dan menghindari para pengumpul kain tenun (lintah darat) yang membeli kain tenun di bawah harga pasaran. Dengan keuntungan sebesar 1 juta hingga belasan juta, peneliti dapat memastikan bahwa pemberdayaan melalui tenun ikat ini juga dapat mengentaskan kemiskinan.

b. Proposisi

1. Winarni dalam Teguh Sulistiyani (2017:78) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal yakni pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat miskin yang memiliki daya yang masih terbatas tetapi juga dapat dilakukan pada masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan atau dalam istilah BPS adalah mereka yang "hampir miskin". Pemberdayaan haruslah dapat dikembangkan hingga

mencapai kemandirian. Di samping itu, pemberdayaan hendaknya tidak menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (dependency) tetapi sebaiknya harus dapat menghantar masyarakat menuju proses kemandirian.

KPSE dalam program prioritas pengentasan kemiskinannya selalu menempatkan masyarakat/umat sebagai subyek/pelaku pembangunan karena mereka adalah aktor pembangunan yang diyakini memiliki kekuatan atau potensi yang bisa diajak bekerja sama untuk mengembangkan potensi SDA lokalnya demi kesejateraanannya. KPSE yakin bahwa jika potensi SDA lokal dikelola dengan baik, bertanggungjawab, bijaksana serta menghargai hasil alam yang ada maka akan mendatangkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat itu sendiri. Melalui program prioritas (Tanggap Darurat, Pertanian Lahan Kering, Sanitasi dan Air Bersih, Kesehatan, Advokasi dan Pemberdayaan dan Peternakan Babi), KPSE berusaha mengembangkan, mengelolah dan memperkuat potensi/daya dan menciptakan kemandirian masyarakat sehingga mereka mampu untuk berdaya saing yang lebih tinggi dalam kehidupan sosial ekonominya. Namun dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang perlu terus dievaluasi hasil-hasilnya sehingga dapat membawa umat keluar dari perangkap kemiskinan.

Melalui konsep pemberdayaan yang dijelaskan Winarni dan temuan di lapangan, maka peneliti merumuskan proposisi untuk

proses PSE dan kontribusi KPSE dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno yakni **“Jika pemberdayaan dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dengan baik, bijaksana dan bertanggung jawab maka dapat membawa umat keluar dari perangkap kemiskinan”**.

2. Menurut Teguh Sulistiyani (2017:115), LSM yang bergerak dalam misi kemanusiaan perlu menguatkan kelembagaannya (*capacity building*) sehingga mampu meningkatkan dan mempertahankan keterampilan, pengetahuan, peralatan dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara kompeten atau untuk kapasitas yang lebih besar (skala yang lebih besar) dan dapat mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat miskin. Agen pembaharu pemberdayaan masyarakat merupakan *stakeholder* yang harus ditingkatkan keberdayaannya dan kemantapan kelembagaannya sehingga mampu menjalankan visi dan misi kelembagaan dan diharapkan apa yang menjadi tujuan kelembagaan itu dapat tercapai. Agen pembaharu pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memiliki pengaruh, kapasitas dan pengetahuan tentang kearifan lokal serta memahami *social mapping* masyarakat setempat yang akan diberdayakan. Kemampuan memahami realitas masyarakat yang akan diberdayakan diperlukan sehingga program-program kelembagaan yang dirancang dapat tepat sasaran dan tidak mubasir sesaat setelah terlaksana seluruh program-program pemberdayaan. Masalah-masalah sosial yang meliputi kesenjangan sosial dan harapan-harapan masyarakat

tentang akan terjadinya perubahan sosial perlu dipelajari secara detail dan teliti oleh agen pembaharu pemberdayaan agar rencana pengentasan masalah kemiskinan dapat berhasil dan membawa masyarakat miskin keluar dari persoalan yang dihadapi. Hasil-hasil pembangunan fisik ataupun mental yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati masyarakat miskin, diharapkan mampu dinikmati secara merata oleh kelompok masyarakat sasaran. Dalam hal ini, penguatan kelembagaan KPSE pada aspek; Struktur, SDM, Keuangan, Pendanaan dan Asset Organisasi, Monitoring dan Evaluasi, Legalitas, Data dan Informasi dan Jaringan kerja sama dapat menentukan keberhasilan lembaga PSE dalam mengentaskan masalah kemiskinan dan keberlanjutan program prioritas pengentasan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran penerima manfaat program.

Pendapat yang disampaikan oleh Teguh sangat tepat sesuai dengan situasi yang dialami oleh KPSE-KA. Bahwa masalah kemiskinan harus ditangani oleh sebuah lembaga resmi atau sebuah lembaga yang besar yang memiliki kapasitas mengurus masalah kemanusiaan dalam skala yang luas. Dalam hal ini Gereja memiliki pengaruh yang sangat besar dan kuat untuk menggalang rasa solidaritas dari sesama yang mampu atau memiliki kelebihan harta untuk dibagi-bagikan kepada yang masih berkekurangan. Dengan melalui derma juga yang diberikan umat setiap hari/per minggu akan disisihkan bagi kaum miskin dan papah dan sebagian lagi untuk kepentingan operasional Gereja. Lembaga PSE juga

telah memiliki jaringan kerja sama yang luas dengan Pemerintah RI, LSM lokal dan internasional sehingga mampu merealisasikan visi dan misinya.

Dari hasil temuan ini peneliti merumuskan sebuah proposisi untuk strategi penguatan PSE dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno yakni **“Jika jalinan kerja sama diperluas maka lembaga akan semakin kuat sehingga kekurangan dan kelemahan visi dan misi lembaga yang belum terealisasi dapat dicapai.”**

3. 2 (Dua) proposisi di atas dapat ditarik lagi satu proposisi yakni **“Jika ada kerja sama kemitraan antara kelompok masyarakat, Pemerintah dan swasta maka pemberdayaan akan dapat mendatangkan kemandirian bagi semua pihak yang terlibat”.**

Dari temuan di lapangan, didapati bahwa umat yang diberdayakan masih membutuhkan dukungan dari pihak lain sebagai mitra pemberdayaan karena mereka belum bisa melanjutkan usahanya tanpa bantuan modal dan bimbingan pihak lain baik dari pemerintah maupun swasta. Pemberdayaan juga hanya dapat dilakukan apabila ada dukungan dari berbagai pihak karena dengan melibatkan semua *stakeholder* yang memiliki tujuan sama dalam memberantas kemiskinan maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Kelompok masyarakat yang belum mandiri namun memiliki potensi SDA lokal harus dapat melakukan kerja sama dengan kelompok yang memiliki potensi SDM lebih sehingga dapat saling menunjang dalam proses pemberdayaan

demikian mencapai kesejahteraan bersama. Kelompok yang kuat memberi daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah.

Temuan di atas sejalan dengan definisi pemberdayaan masyarakat bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Prijono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung arti pertama, "*to give power or authority*", kedua, "*to give ability to or enable*". Pemaknaan pertama mengandung arti "memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya". Sedangkan pemaknaan kedua berarti "memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu" (Teguh, 2007:77-78).

Pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari pihak yang memiliki kekuatan/daya lebih kepada pihak yang lemah adalah bentuk kerja sama untuk saling menguntungkan. Di satu sisi pihak yang kuat semakin kuat dan di sisi lain pihak yang lemah semakin juga dikuatkan. Langkah tepat yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kapasitas keorganisasian masyarakat, Pemerintah dan swasta sehingga ketiganya saling bersinergi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Kemandirian dicapai melalui sebuah proses yang membutuhkan pengorbanan yang maksimal. Kelompok pemberdayaan yang dibentuk oleh tim Sosek Tukuneno terus berproses untuk mencapai tahap itu. Pembimbingan yang ketat masih perlu dilakukan agar produk-produk pemberdayaan dapat bersaing di level lokal dan nasional dan berdampak bagi kesejahteraan kelompok. Proses pemberdayaan PSE yang dilakukan oleh seksi Sosek di Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno, dilaksanakan sesuai prosedur bahwa melalui pengajuan proposal yang diajukan ke seksi Sosok Tukuneno dan KPSE akan mendapat persetujuan Uskup sehingga proses pemberdayaan dapat membawa umat keluar dari perangkap kemiskinan dan semua pihak yang bertanggungjawab dalam Kerasulan PSE ini dapat sama-sama menikmati hasil-hasil pemberdayaan.

Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus dientaskan oleh semua pihak baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri sehingga kesejahteraan sosial dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak tanpa kecuali. Kontribusi PSE dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno sementara dilakukan melalui program strategis/prioritas dan mendapat dukungan dana dari Pemerintah RI (Kementerian Terkait), Pemerintah Kabupaten/Desa, LSM-LSM lokal dan internasional. Kerjasama ini telah berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan yang di wilayah Keuskupan Atambua.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa realisasi suatu perencanaan akan menghadapi hambatan baik secara internal maupun eksternal. Masalah akan timbul ketika harapan tidak berjalan lurus dengan kondisi di lapangan. Kerasulan PSE begitu mantap dalam rancangan program prioritasnya namun dukungan moril dari sebagian umat dan para pastor paroki masih sebatas opini dan belum ada realisasi nyata. Terkadang kerasulan PSE belum menjadi kasadaran dan kerja sama Kristiani di tingkat paroki. Pastor paroki sebagai animator kerasulan sosial belum sepenuhnya menggerakkan umatnya agar kerasulan PSE terlaksana dalam seluruh kehidupan umat di paroki. Bahkan, sebagian pastor paroki masih berpikir bahwa kerasulan PSE adalah tugas dan tanggung jawab KPSE.

KPSE adalah Lembaga yang kuat yang mampu mengkoordinir semua elemen yang berkepentingan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi. Segala kelemahan dan kekurangan kelembagaan baik secara internal dan eksternal terus diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap elektabilitas KPSE. Pada umumnya suatu lembaga atau organisasi menguatkan kelembagaannya berdasarkan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dan tantangan atau hal-hal yang belum mencapai target. Kerasulan PSE menguatkan kelembagaannya melalui isu-isu internal organisasi dan isu eksternal yang berkembang di masyarakat. Usaha untuk menguatkan kelembagaan PSE terus dilakukan dengan mengidentifikasi sejumlah masalah dan isu yang berkembang.

Pada prinsipnya ide untuk keberlanjutan sebuah kegiatan pemberdayaan dimaksudkan untuk melestarikan dan mempertahankan upaya yang sudah dilaksanakan. Hal itu dilakukan karena ada dampak positifnya.

Baik Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai agen pelaku utama pembangunan, harus turut merasakan dampak pemberdayaan tersebut. Mempertahankan keberlanjutan program-program pemberdayaan adalah strategi KPSE-KA agar masyarakat dapat merasakan peran Gereja dalam bidang sosial kemanusiaan. KPSE mempercayakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melanjutkan karya PSE dengan maksud agar hasil-hasil yang telah dicapai dapat terus berjalan.

6.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk mengentaskan persoalan kemiskinan maka perlu melibatkan umat dalam proses pengambilan keputusan seperti melibatkan umat/masyarakat dalam rapat/musyawarah perencanaan kegiatan dan anggaran sehingga masyarakat dapat memberikan usul dan saran sesuai dengan masalah yang dihadapi dan dapat mendefinisikan kemiskinan yang tepat menurut keadaannya. KPSE harus dapat merancang program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan umat. Karena itu, Seksi Sosek Paroki St. Petrus Tukeneno perlu meningkatkan kinerjanya terutama strategi *Live-In* (Tinggal bersama umat selama program berjalan) sehingga dalam perencanaan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif mampu membawa umat keluar dari perangkap kemiskinan. Dalam tupoksi sosek, jelas sekali ditegaskan bahwa tugas pokok sosek paroki adalah membantu Pastor Paroki dalam usaha mengembangkan reksa pastoral sosial ekonomi (Sosek) di paroki dengan penjabaran tugas salah satunya ialah mensosialisasikan visi dan misi PSE, sehingga perlu sekali melaksanakan tugas dan tanggung jawab

ini secara serius sehingga dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di wilayah Gereja Paroki St. Petrus Tukuneno.

Faktor kepemimpinan yang mengummat dan “berjiwa merangkul” sangat menentukan keberhasilan program kerasulan PSE. Karena itu, para Pastor perlu mendekati diri dengan umat terutama OMK seperti terlibat langsung dalam kegiatan umat baik itu di lingkungan Gereja Paroki maupun dalam kegiatan pemberdayaan yang digeluti oleh umat karena merekalah generasi penerus Gereja dan Bangsa. Para Pastor Paroki khususnya Pastor Paroki St. Petrus Tukuneno perlu juga selalu mengikutsertakan para staf/anggota yang terdaftar dalam struktur DPP, terlebih Seksi Sosek dalam setiap kegiatan pastoralnya sehingga para staf sosek dapat mengetahui kondisi sosial ekonomi umat paroki Tukuneno secara merata. Pengenalan secara menyeluruh situasi dan kondisi umat secara merata penting sekali sehingga segala program pemberdayaan dapat merata dinikmati, tidak hanya dinikmati oleh sebagian umat saja namun di seluruh wilayah paroki, sebab hal ini dapat berdampak bagi realisasi visi dan misi Uskup Atambua dan visi dan misi KPSE.

Komisi dan Panitia PSE-KA perlu menjalin kerja sama yang intens melalui komunikasi dan pertanggungjawaban yang transparan dengan lembaga-lembaga pendonor baik dari Pemerintah maupun swasta dan LSM internasional sehingga sumbangan dana yang diberikan dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan program-program strategis. Kerja sama itu dapat mewujudkan visi, misi, mandat dan nilai-nilai kerasulan PSE sehingga semakin banyak orang miskin tertolong dan dapat hidup mandiri setelah diberdayakan. Tata kelola kelembagaan yang sudah tersistem dan

berjalan harus lebih ditingkatkan kedisiplinan dan pengawasannya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan umat dan lembaga-lembaga pendonor.

Uskup Atambua perlu meningkatkan pengawasannya terhadap pelaksanaan visi, misi dan strategi pastoral Keuskupan Atambua seperti turun langsung “blusukan” untuk menemui para pastor paroki dan anggota DPP di setiap paroki. Sebab telah terumuskan jelas bahwa perlu diupayakan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga-keluarga kristen di wilayah KA, tetapi kenyataan yang terjadi bahwa di Gereja-Gereja paroki lain (selain Gereja Paroki Tukuneno) tidak terlaksana gerakan PSE sehingga perlu sekali dilakukan pengaktifan peran seksi Sosek paroki sehingga salah satu poin strategi pastoral keuskupan dapat terlaksana. Kontrol oleh Uskup terhadap seksi Sosek melalui para pastor paroki dan para ketua DPP perlu ditingkatkan sehingga visi dan misi serta strategi pastoral (*Meningkatkan Mutu Hidup Umat Melalui Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi; peningkatan ekonomi keluarga; Pembenahan dan peningkatan peran Komisi Sosial Ekonomi*) yang telah dirancang dapat terealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi dan Hermanto Siregar dan M Parulian Hutagaol. 2016. *Pengembangan Agribisnis Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Perdesaan*. Lembaga Peneliti SMERU Jl. Cikini Raya No. 10A, Jakarta 10310-Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Jl. Kamper Wing 2 Level 5, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680.
- Asaad. 2015. *Efektivitas Program Bantuan Dana Bergulir Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan*. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).
- Bachri, B. S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- BPS Kabupaten Belu. 2018. *Kabupaten Belu Dalam Angka- Belu Regency in Figures 2018*. Atambua: Diterbitkan Oleh / Publised by : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu/ BPS.
- _____. 2017. *Kabupaten Malaka Dalam Angka 2017-MALAKA Regency In Figures*. Atambua: Diterbitkan Oleh / Publised by : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu/ BPS.
- _____. 2018. *Kabupaten Malaka Dalam Angka 2018-MALAKA Regency In Figures*. Atambua: Diterbitkan Oleh / Publised by : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu/ BPS.
- BPS Kabupaten TTU. 2018. *Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka 2018-Timor Tengah Utara Regency in Figures*. Kefamenanu: Diterbitkan Oleh/Publised By : © BPS Kabupaten Timor Tengah Utara.
- BPS Statistik Pendapatan Februari 2018-*Income Statistik February 2018*. Penyunting/Editor: Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan. Penerbit/Publised by: BPS RI/BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2018/06/04/769946b424c9a22b0732c3e5/statistik-pendapatan-februari-2018.html>
- Ekardo, Apando dan Firdaus dan Nilda Elfemi. 2014. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan*. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat.
- Ensiklik Rerum Novarum” Paus Leo XIII.
- Fajarwati, Alia dan Eva Latifah Puspita Sari dan Nirania Galuh Putrie Soewarno. 2017. *Strategi untuk Mengatasi Permasalahan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kabupaten Temanggung*. Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia 123.
- Gaudium et Spes, no. 1.
- Girsang, W. 2009. *Strategi Pengentasan Kemiskinan di Pulau Kecil di Propinsi Maluku*. Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Kampus Poka-Ambon. *Jurnal Agrikultura* 2009, 20(3): 176-184
- Gunawan. Kuncoro, Mudrajad dan Elfindri dan Abdullah, Amin dan Wirawansawono, Sarliti dan Tjondronegoro, Sediono M. P dan Satria, Arif

- dan Kartadinata, Sunaryo dan Lutan, Rusli dan Ancok, Djamaludin dan Hafidhuddin, Didin dan Sumodiningrat. 2010. *Pengentasan Dari Kemiskinan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- Helo, Yosef. 2017. *Ziarah Pastoral Keuskupan Atambua Dari Masa ke Masa (1938-2015)*. Yogyakarta: Bajawa Press.
- Hermanto, D. 2011. *Penguatan Kelompok Tani; Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani*. (1. Jurnal Litbang Pertanian), 371–390. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161. <http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/in>.
- Janiar, L. V. 2017. *Analisis penguatan peran kelembagaan terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di indonesia, 1 Jilid 3* (Jurnal Ilmu Ekonomi), 352–364. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/a>.
- Kristiyanto, A. 2011. *Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Mikro Olahraga*. 12, No. 2 (Jurnal Ekonomi Pembangunan), 200–211. Jurusan POK FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta Jalan Menteri Supeno 13 Manahan Surakarta. <https://media.neliti.com/media/publicatio>.
- Lianto dan Sanggar Kanto dan Siti Kholifah. 2015. *Penguatan Kelembagaan Pengelola Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik*. 18 Nomor 4 (Jurnal Wacana), 231–240. Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya. <https://media.neliti.com/media/publicatio>.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maleong, L. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Rosda.
- Mathew B. Miles, Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Prayogo, Dody dan Yosef Hilarius. 2012. *Efektivitas Program CSR/CD dalam Pengentasan Kemiskinan; Studi Peran Perusahaan Geotermal di Jawa Barat*. Dosen Sosiologi FISIP UI.
- Rencana Strategis Periode 2014 – 2019 Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE –KA)
- Safi'l, H. M. 2011. *Ampih Miskin Model Kebijakan dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Kandangan: Averroes Press.
- Saklik, Yohanes Philipus. 2017. *Arah Dasar Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) 2018-2022 Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jakarta: Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konfrensi Wali Gereja Indonesia (PSE-KWI)
- Sri Subekti, D. 2015. *Penguatan Kelompok Tani Melalui Optimalisasi dan Sinergi Lingkungan Sosial*. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. 8 No. 3 (jurnal JSEP), 50–56. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/ar>.
- Sanapiah, F. 1990. *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Statistik, Badan Pusat. 2016. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 2003. *Bukan Kapitalisme Bukuan Sosialisme-*

- Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*. Jakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbang, Grace dan Agus Suman dan Kliwon Hidayat dan Paulus Kindangen. 2012. *Peran Gereja Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Tomohon Sulawesi Utara*. Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan-Universitas Brawijaya: Malang. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Budi Utomo: Manado-North-Sulawesi. Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan, Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya-Malang. Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi-Manado-Sulawesi Utara. Fakultas Ekonomi, Universitas Samratulangi-Manado-North Sulawesi.
- Supriono, Agus, D. 2013. *Strategi Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Rakyat di Kabupaten Situbondo*, 10 No. 3(Jurnal Penelitian Hutan Tanaman), 139–146. Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto, Jember Jawa Timur, 68121. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan, Bogor Jl. Gunung Batu No. 5 PO Box 331 Bogor 16610. <http://ejournal.forda-org/ejournal-lit>.
- Suryawati, C. 2005. *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- Teguh, Ambar Sulistiyani. 2007. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Tiza, Agustinus Longa dan Abdul Hakim dan Bambang Santoso Haryono. 2014. *Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)*. Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya-Malang.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana 2017.
- Rencana Strategis Periode 2014-2019 Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE –KA)
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Rajawaligrafindo Persada.
- Zakiah dan Atika Zahra Maulida. 2107. *Analisis Strategi Dan Evaluasi Kinerja Penganjakan Kemiskinan Dalam Program Pembangunan Desa Perspektif Ekonomi Mikro Islam*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari, Banjarmasin. Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat-Wacana dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- <http://www.mirifica.net/2014/02/06/penggerak-kerasulan-pse-regio-nusra-bertemu-di-bali/> [31/10/2018].